



YK
KOTA
YOGYAKARTA

EVALUASI HASIL RPJMD

Kota Yogyakarta
Tahun 2022

Tahun Anggaran

2023

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota dapat melaksanakan evaluasi hasil RPJMD setidaknya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Untuk menjamin pelaksanaan RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 pada tahun 2022, perlu untuk melakukan proses evaluasi hasil RPJMD untuk memastikan bahwa RPJMD dapat berjalan dengan baik dan dapat direalisasikan dengan maksimal.

Hasil evaluasi terhadap sasaran dan program dalam RPJMD Kota Yogyakarta periode 2017-2022 pada tahun 2022 diharapkan dapat memberi gambaran umum terhadap kinerja pembangunan Kota Yogyakarta untuk pelaksanaan RPJMD tahun 2022 serta sebagai bahan evaluasi dalam merencanakan dokumen RPJMD pada periode berikutnya.

Kami menyadari bahwa Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 pada periode tahun 2022 ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan ini sangat dibutuhkan sehingga dapat menjadi masukan dalam memperbaiki kinerja di masa mendatang. Besar harapan kami bahwa laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 28 Februari 2023
a.n. Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH



IE. AMAN YURIADIJAYA, M.M.
NIP. 19651213 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Dasar Hukum.....	I - 3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I - 4
1.4. Lingkup Pekerjaan.....	I - 4
1.5. Sistematika Pelaporan.....	I - 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	II - 1
2.1. Review RPJPD Kota Yogyakarta.....	II - 1
2.2. Review RPJMD Kota Yogyakarta.....	II - 3
2.3. Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan.....	II - 9
BAB III GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.....	III - 1
3.1. Gambaran Geografis dan Fisik.....	III - 1
3.2. Gambaran Demografi.....	III - 7
BAB IV ANALISIS REALISASI RPJMD TAHUN 2022.....	IV - 1
4.1. Analisis Realisasi Keuangan APBD Tahun 2022.....	IV - 2
4.2. Analisis Realisasi Sasaran Daerah, Sasaran dan Program Perangkat Daerah Berdasarkan Misi RPJMD Tahun 2017-2022.....	IV - 14
4.2.1. Misi 1: Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat.....	IV - 18
4.2.2. Misi 2: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Kota Yogyakarta.....	IV - 23
4.2.3. Misi 3: Memperkuat Moral, Etika, dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta.....	IV - 28
4.2.4. Misi 4: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.....	IV - 32
4.2.5. Misi 5: Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan.....	IV - 39
4.2.6. Misi 6: Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman.....	IV - 45
4.2.7. Misi 7: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.....	IV - 50
4.3. Analisis Realisasi RPJMD Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017.....	IV - 56
4.3.1. Sasaran 1: Kemiskinan Masyarakat Menurun.....	IV - 57
4.3.2. Sasaran 2: Keberdayaan Masyarakat Meningkat.....	IV - 58
4.3.3. Sasaran 3: Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat.....	IV - 62
4.3.4. Sasaran 4: Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun.....	IV - 63

4.3.5.	Sasaran 5: Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan	IV - 65
4.3.6.	Sasaran 6: Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun	IV - 67
4.3.7.	Sasaran 7: Kualitas Pendidikan Meningkatkan	IV - 69
4.3.8.	Sasaran 8: Harapan Hidup Masyarakat Meningkatkan	IV - 70
4.3.9.	Sasaran 9: Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkatkan.....	IV - 73
4.3.10.	Sasaran 10: Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkatkan	IV - 74
4.3.11.	Sasaran 11: Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan	IV - 75
4.3.12.	Sasaran 12: Infrastruktur Wilayah Meningkatkan.....	IV - 76
4.3.13.	Sasaran 13: Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan	IV - 78
BAB V	PENUTUP	V - 1
5.1.	Kesimpulan	V - 1
5.2.	Rekomendasi	V - 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Yogyakarta.....	II - 7
Tabel 2. 2.	Formulir E.78 Evaluasi terhadap Hasil RPJMD.....	II - 11
Tabel 2. 3.	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	II - 13
Tabel 3.1.	Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta.....	III - 2
Tabel 3.2.	Luas Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemiringan Lahan.....	III - 3
Tabel 3.3.	Luas Wilayah Kota Yogyakarta Menurut Ketinggian	III - 4
Tabel 3.4.	Luas Penggunaan Lahan Kota Yogyakarta Berdasarkan Status Peruntukan Lahan Tahun 2017 – 2021	III - 5
Tabel 3.5.	Jumlah Penduduk, kepadatan, dan Rasio Jenis Kelamin Kota Yogyakarta.....	III - 7
Tabel 3.6.	Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur di Kota Yogyakarta Tahun 2021	III - 8
Tabel 4. 1.	Tabel Misi, Sasaran, dan Jumlah Program RPJMD Kota Yogyakarta	IV - 2
Tabel 4. 2.	Anggaran dan Realisasi APBD Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	IV - 4
Tabel 4. 3.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Yogyakarta pada Pelaksanaan RPJMD Tahun 2022.....	IV - 8
Tabel 4. 4.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta pada Pelaksanaan RPJMD Tahun 2022.....	IV - 12
Tabel 4. 5.	Predikat Perangkat Kerja Berdasarkan Status Ketercapaian.....	IV - 14
Tabel 4. 6.	Rekapitulasi Capaian Sasaran Daerah Berdasarkan Status Ketercapaian Tahun 2021 & 2022.....	IV - 14
Tabel 4. 7.	Realisasi dan Capaian Sasaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 - 2022	IV - 16
Tabel 4. 8.	Rekapitulasi Sasaran Perangkat Daerah Berdasarkan Status Ketercapaian Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	IV - 18
Tabel 4. 9.	Rekapitulasi Capaian Program Perangkat Daerah Berdasarkan Status Ketercapaian Tahun 2021	IV - 18
Tabel 4. 10.	Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 1 Kota Yogyakarta	IV - 19
Tabel 4. 11.	Faktor Pendorong Keberhasilan Sasaran Daerah Misi 1 Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	IV - 20
Tabel 4. 12.	Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran Daerah Misi 1 Kota Yogyakarta Tahun 2022	IV - 21
Tabel 4. 13.	Rekapitulasi Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 1 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022.....	IV - 22
Tabel 4. 14.	Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 1 yang Tidak Tercapai (<100%) Tahun 2022.....	IV - 22
Tabel 4. 15.	Faktor Penghambat Realisasi Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 1 pada Hasil RPJMD Tahun 2022.....	IV - 23

Tabel 4. 16.	Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 2 Kota Yogyakarta	IV - 24
Tabel 4. 17.	Faktor Pendorong Keberhasilan Sasaran Daerah Misi 2 Kota Yogyakarta Tahun 2022	IV - 25
Tabel 4. 18.	Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran Daerah Misi 2 Kota Yogyakarta Tahun 2022	IV - 26
Tabel 4. 19.	Rekapitulasi Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 2 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022.....	IV - 27
Tabel 4. 20.	Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 2 yang Tidak Tercapai (<100%) pada Hasil RPJMD Tahun 2022.....	IV - 27
Tabel 4. 21.	Faktor Penghambat Realisasi Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 2 pada Hasil RPJMD Tahun 2022.....	IV - 28
Tabel 4. 22.	Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 3 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022	IV - 29
Tabel 4. 23.	Faktor Pendorong Keberhasilan Sasaran Daerah Misi 3 Kota Yogyakarta Tahun 2022	IV - 30
Tabel 4. 24.	Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran Daerah Misi 3 Kota Yogyakarta Tahun 2022	IV - 30
Tabel 4. 25.	Rekapitulasi Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 3 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022.....	IV - 30
Tabel 4. 26.	Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 3 yang Tidak Tercapai (<100%) pada Hasil RPJMD Tahun 2022.....	IV - 31
Tabel 4. 27.	Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 3 yang Tidak Tercapai (<100%) pada Hasil RPJMD Tahun 2022.....	IV - 32
Tabel 4. 28.	Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 4 Kota Yogyakarta	IV - 33
Tabel 4. 29.	Faktor Pendorong Keberhasilan Sasaran Daerah Misi 4 Kota Yogyakarta Tahun 2022	IV - 34
Tabel 4. 30.	Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran Daerah Misi 4 Kota Yogyakarta Tahun 2022	IV - 35
Tabel 4. 31.	Rekapitulasi Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah	IV - 37
Tabel 4. 32.	Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 4 yang Tidak Tercapai (<100%) pada Hasil RPJMD Tahun 2022.....	IV - 37
Tabel 4. 33.	Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 4 yang Tidak Tercapai (<100%) pada Hasil RPJMD Tahun 2022.....	IV - 38
Tabel 4. 34.	Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 5 Kota Yogyakarta	IV - 40
Tabel 4. 35.	Faktor Pendorong Keberhasilan Sasaran Daerah Misi 5 Kota Yogyakarta Tahun 2022	IV - 41
Tabel 4. 36.	Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran Daerah Misi 5 Kota Yogyakarta Tahun 2022	IV - 42
Tabel 4. 37.	Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 5 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022	IV - 43

Tabel 4. 38.	Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 5 yang Belum Tercapai (<100%) pada Hasil RPJMD Tahun 2022.....	IV - 43
Tabel 4. 39.	Faktor Penghambat Realisasi Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 5 pada Hasil RPJMD Tahun 2022.....	IV - 44
Tabel 4. 40.	Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 6 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022.....	IV - 46
Tabel 4. 41.	Faktor Pendorong Keberhasilan Sasaran Daerah Misi 6 Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	IV - 46
Tabel 4. 42.	Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran Daerah Misi 6 Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	IV - 47
Tabel 4. 43.	Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 6 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022.....	IV - 48
Tabel 4. 44.	Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 6 yang Belum Tercapai (<100%) pada Hasil RPJMD Tahun 2022.....	IV - 48
Tabel 4. 45.	Faktor Penghambat Realisasi Program Perangkat Daerah Misi 6 pada Hasil RPJMD Tahun 2022.....	IV - 49
Tabel 4. 46.	Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 7 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022.....	IV - 51
Tabel 4. 47.	Faktor Pendorong Keberhasilan Sasaran Daerah Misi 7 Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	IV - 51
Tabel 4. 48.	Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran Daerah Misi 7 Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	IV - 51
Tabel 4. 49.	Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 7 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022.....	IV - 52
Tabel 4. 50.	Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 7 yang Belum Tercapai (<100%) pada Hasil RPJMD Tahun 2022.....	IV - 52
Tabel 4. 51.	Faktor Penghambat Realisasi Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 7 pada Hasil RPJMD Tahun 2022.....	IV - 53
Tabel 4. 52.	Rekapitulasi Capaian Indikator Program Berdasarkan Evaluasi Hasil RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	IV - 56
Tabel 4. 53.	Capaian Program Sasaran Daerah 1 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022.....	IV - 57
Tabel 4. 54.	Capaian Program Sasaran Daerah 2 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022.....	IV - 58
Tabel 4. 55.	Capaian Program Sasaran Daerah 3 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022.....	IV - 62
Tabel 4. 56.	Capaian Program Sasaran Daerah 4 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022.....	IV - 63
Tabel 4. 57.	Capaian Program Sasaran Daerah 5 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022.....	IV - 65
Tabel 4. 58.	Capaian Program Sasaran Daerah 6 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022.....	IV - 67
Tabel 4. 59.	Capaian Program Sasaran Daerah 7 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022.....	IV - 69
Tabel 4. 60.	Capaian Program Sasaran Daerah 8 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022.....	IV - 70
Tabel 4. 61.	Capaian Program Sasaran Daerah 9 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022.....	IV - 73
Tabel 4. 62.	Capaian Program Sasaran Daerah 10 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022.....	IV - 74

- Tabel 4. 63. Capaian Program Sasaran Daerah 11 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022..... IV - 75
- Tabel 4. 64. Capaian Program Sasaran Daerah 12 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022.....IV - 76
- Tabel 4. 65. Capaian Program Sasaran Daerah 13 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022.....IV - 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1.	Siklus Pengendalian Dokumen Perencanaan	II - 9
Gambar 3.1.	Peta Administrasi Kota Yogyakarta	III - 2
Gambar 3.2.	Persentase Penggunaan Lahan di Kota Yogyakarta Tahun 2021.....	III - 6
Gambar 4. 1.	Komposisi Sasaran dan Program Kota Yogyakarta dalam RPJMD	IV - 1
Gambar 4. 2.	Proyeksi APBD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022	IV - 3
Gambar 4. 3.	Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta pada Pelaksanaan RPJMD Tahun 2022	IV - 4
Gambar 4. 4.	Proporsi Realisasi PAD Kota Yogyakarta pada Pelaksanaan RPJMD Tahun 2022	IV - 5
Gambar 4. 5.	Proporsi Realisasi Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta pada Pelaksanaan RPJMD Tahun 2022	IV - 6
Gambar 4. 6.	Proporsi Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Kota Yogyakarta pada Pelaksanaan RPJMD Tahun 2022.....	IV - 6
Gambar 4. 7.	Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Pelaksanaan RPJMD Tahun 2022	IV - 9
Gambar 4. 8.	Proporsi Realisasi Belanja Operasi Kota Yogyakarta pelaksanaan RPJMD Tahun 2022	IV - 10
Gambar 4. 9.	Proporsi Realisasi Belanja Modal Kota Yogyakarta pelaksanaan RPJMD Tahun 2022	IV - 10
Gambar 4. 11.	Status Ketercapaian Sasaran Daerah, Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 1 Kota Yogyakarta Tahun 2022	IV - 19
Gambar 4. 12.	Status Ketercapaian Sasaran Daerah, Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 2 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022.....	IV - 24
Gambar 4. 13.	Status Ketercapaian Sasaran Daerah, Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 3 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022.....	IV - 28
Gambar 4. 14.	Status Ketercapaian Sasaran Daerah, Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 4 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022.....	IV - 33
Gambar 4. 15.	Status Ketercapaian Sasaran Daerah, Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 5 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022.....	IV - 40
Gambar 4. 16.	Status Ketercapaian Sasaran Daerah, Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 6 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022.....	IV - 45
Gambar 4. 17.	Status Ketercapaian Sasaran Daerah, Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 7 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022.....	IV - 50
Gambar 4. 18.	Perbandingan Program dan Indikator Program Perangkat Daerah	

	Kota Yogyakarta Tahun 2021-2022	IV - 55
Gambar 4. 19.	Proporsi Status Capaian Fisik dan Keuangan Program Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022.....	IV - 56

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda merupakan unsur penyelenggara pemerintah yang mempunyai ketugasan dalam perencanaan daerah, yakni meliputi perencanaan, penyusunan, pengendalian, serta evaluasi rencana pembangunan daerah. Dalam konteks perencanaan, prinsip perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan nasional yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan yang berwenang untuk mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang didasari oleh potensi dan kondisi masing-masing daerah. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan dengan transparan, responsis, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Dalam suatu sistem perencanaan daerah, pengendalian dan evaluasi merupakan salah satu bagian terpenting setelah proses perencanaan dan pelaksanaan. Secara umum hal ini bertujuan untuk mengukur capaian dan keberhasilan proses perencanaan dan pelaksanaan rencana. Perencanaan daerah yang baik, tidak selalu memberikan hasil yang baik. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya proses pelaksanaan yang baik dan konsisten dengan perencanaan. Dalam hal ini, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu upaya untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya.

Pengendalian dan evaluasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu: 1) tahapan pengendalian, yaitu proses pengumpulan dan analisis data dan informasi yang bersifat periodik terhadap proses implementasi program/kegiatan untuk mengetahui kekurangan dan membantu proses penyempurnaan pelaksanaan program/kegiatan, serta 2) tahapan evaluasi, yaitu proses penilaian dalam pencapaian tujuan perencanaan dan penilaian kinerja/realisasi hasil perencanaan pembangunan, baik kinerja secara fisik maupun kinerja keuangan daerah.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil program daerah dari seluruh aspek demi menjamin pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pengendalian dan evaluasi juga bertujuan untuk memberikan informasi dan justifikasi atas rencana, implementasi, dan hasil perencanaan yang telah dilakukan. Informasi tersebut dapat menjadi umpan balik dan pertimbangan bagi pemerintah dalam perumusan dokumen perencanaan selanjutnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Bab IV menjabarkan bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan :

Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah:

- a. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJMN dan RTRW Nasional
- b. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah
- c. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD, dan
- d. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun lingkup pengendalian dan evaluasi mencakup:

- 1.) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup provinsi maupun kabupaten/kota;
- 2.) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada lingkup provinsi maupun kabupaten/kota;
- 3.) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah pada lingkup provinsi maupun kabupaten/kota.

Salah satu pokok pengendalian dan evaluasi yang telah dijelaskan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 ialah evaluasi terhadap Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baik perumusan, pelaksanaan, kebijakan, maupun hasil capaian. Evaluasi terhadap hasil RPJMD berdasarkan peraturan sebagaimana tersebut mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dicapai. Evaluasi hasil RPJMD dilakukan melalui penilaian pelaksanaan RPJMD, guna mengetahui realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, evaluasi hasil RPJMD kabupaten/kota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil RKPD kabupaten/kota. Hal ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan evaluasi hasil RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 secara berkala untuk mengetahui capaian pelaksanaan RPJMD dan mengidentifikasi ketidaksesuaian maupun faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan agar pemerintah dapat melakukan tindakan perbaikan di tahun-tahun selanjutnya, serta RPJMD Kota Yogyakarta dapat direalisasikan dengan baik pada akhir periode tahun 2022. Jika hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa terjadi

ketidaksesuaian dengan tahapan dan tata cara penyusunan, perundang-undangan yang berlaku, maupun perubahan-perubahan dasar lainnya, maka dokumen RPJMD dapat dilakukan perubahan yang dapat mempengaruhi perubahan renstra perangkat daerah yang kemudian ditetapkan dengan peraturan yang berlaku. Adapun pelaksanaan evaluasi hasil RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 pada periode tahun 2022 akan dilakukan oleh Walikota Yogyakarta dan nantinya akan disampaikan kepada Gubernur DIY.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan ini mencakup dasar hukum yang mengatur mengenai ketentuan evaluasi, bagian-bagian yang penting untuk dievaluasi, serta dasar hukum terhadap cakupan pembahasan dalam evaluasi.

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam kegiatan Evaluasi Hasil RPJMD Kota Yogyakarta yakni:

- a. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan ini menjadi bingkai awal dalam proses evaluasi dokumen perencanaan.
- b. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; serta
- d. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 11 tahun 2017, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 Kota Yogyakarta.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

UU No 25 Tahun 2004 mengamanatkan lima tujuan perencanaan nasional, yaitu:

- 1.) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
- 2.) Menjamin terjadinya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan, serta antar pusat dan daerah.
- 3.) Menjamin keterikatan dan konsistensi antara pelaksana penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- 4.) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

- 5.) Menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan dokumen Evaluasi Hasil RPJMD ialah:

a. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022 pada periode Tahun 2022 guna mendapatkan gambaran pencapaian sasaran dan program pembangunan Kota Yogyakarta, serta memastikan konsistensi antara kebijakan, pelaksanaan, serta hasil evaluasi dalam RPJMD Kota Yogyakarta.

b. Tujuan

- 1.1. Melakukan evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022 pada periode Tahun 2022 berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.
- 1.2. Menjadi bahan pengambilan kebijakan yang bersifat rekomendatif untuk pelaksanaan RPJMD Kota Yogyakarta pada tahun-tahun berikutnya.

1.4. Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup kegiatan Evaluasi Hasil Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) meliputi:

- a. Melakukan identifikasi terhadap Visi, Misi, Sasaran, serta Program pembangunan Kota Yogyakarta yang terdapat pada dokumen RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.
- b. Mengevaluasi capaian keuangan berdasarkan realisasi APBD yang diperbandingkan dengan target RPJMD
- c. Mengevaluasi capaian sasaran dan program pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017
- d. Menganalisis hasil statistik program-program pembangunan yang tercapai dan belum tercapai, nilai-nilai realisasi yang sangat ekstrim, serta faktor pendorong dan penghambat dalam RPJMD Kota Yogyakarta periode tahun 2022, guna memberikan gambaran dan rekomendasi terhadap pelaksanaan RPJMD di tahun mendatang.

1.5. Sistematika Pelaporan

Penyajian Laporan Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud & Tujuan, Lingkup Pekerjaan dan Sistematika Pelaporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas: 1) Review RPJPD Kota Yogyakarta; 2) RPJMD Kota Yogyakarta; dan 3) Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan.

BAB III GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

Bab ini membahas Gambaran Umum dan Fisik Kota Yogyakarta.

BAB IV ANALISIS REALISASI RPJMD TAHUN 2022

Bab ini membahas Analisis Realisasi Keuangan Daerah Tahun 2022, Analisis Realisasi Sasaran Daerah, Sasaran dan Program Perangkat Daerah dan Analisis Realisasi RPJMD Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan dan rekomendasi.

LAMPIRAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Review RPJPD Kota Yogyakarta

2.1.1. Visi Misi Kota Yogyakarta dalam RPJPD Tahun 2005-2025

Berdasarkan kondisi masyarakat Kota Yogyakarta saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah kota, maka Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 adalah:

“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan sebagai berikut:

1. **Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan** yaitu dengan mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan swasta agar penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta mempunyai standar kualitas yang tinggi dan terkemuka di Asia Tenggara, mempunyai keunggulan kompetitif yang berdaya saing tinggi, kompetensi tinggi, menekan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak citra pendidikan Kota Yogyakarta; menciptakan sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul; membantu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan; mengupayakan biaya pendidikan yang terjangkau dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
2. **Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan** yaitu dengan meningkatkan objek dan daya tarik wisata; menampilkan landmark (tetenger/ciri monumental) dan budaya khas Kota Yogyakarta serta nilai-nilai luhur budaya bangsa; mengembangkan jaringan kerjasama wisata dengan berbagai pihak; membangun sarana dan prasarana wisata yang memadai; menciptakan kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan dunia pariwisata kota; meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat kota dalam pengembangan pariwisata; melakukan promosi dan pemasaran wisata yang efektif, sehingga menjadi salah satu tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara.
3. **Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa** melalui peningkatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah dengan memperkuat perekonomian kota berbasis keunggulan masing-masing sektor andalan

menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan khususnya dalam pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada ekonomi rakyat, kelompok dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat kota terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, dan kesempatan yang sama dalam berusaha serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, sehingga dapat menjadi pusat pelayanan jasa di wilayah Jawa bagian Selatan.

4. **Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan** dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi; pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; dan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
5. **Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya** melalui peningkatan integritas setiap pribadi masyarakat kota, memperkuat jati diri dan karakter masyarakat kota yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; patuh dan taat aturan hukum; memelihara kerukunan serta toleransi masyarakat dan antar umat beragama; mengembangkan semangat kekeluargaan; menegakkan norma-norma sosial, kesopanan, kesusilaan dan norma-norma agama; melaksanakan interaksi antar budaya; mengembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan; menerapkan nilai-nilai luhur Kota Yogyakarta; dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Kota Yogyakarta dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan kota.
6. **Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum** dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk kepentingan masyarakat kota; melakukan pembenahan struktur

kelembagaan dan meningkatkan budaya tertib hukum; tidak diskriminatif, berkeadilan gender dan memihak pada rakyat kecil.

7. **Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai** melalui penciptaan kondisi yang kondusif, pemeliharaan dan penjaminan situasi yang aman, tertib, nyaman dan damai dengan memanfaatkan semua komponen masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun stabilitas keamanan dan penciptaan ketertiban kota;
8. **Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas** melalui pembangunan infrastruktur yang maju dengan meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; peningkatan daya dukung kapasitas kota dengan pengembangan dan pemanfaatan aset-aset daerah, sarana dan prasarana kota serta fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat;
9. **Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat** melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai; penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang baik; kebijakan dan sistem kesehatan masyarakat kota yang mantap; penyediaan SDM pelayanan kesehatan yang berkualitas; dan mempunyai kompetensi yang tinggi serta didukung oleh partisipasi masyarakat.

2.2. Review RPJMD Kota Yogyakarta

2.2.1. Visi Misi Kota Yogyakarta dalam RPJMD Tahun 2017-2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan perencanaan lima tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang telah terpilih. Visi yang telah disampaikan saat pemilihan sebelumnya. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun kedepan. Penjabaran akan visi ini akan diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama lima tahun kedepan. Analisis terhadap visi Kepala Daerah Kota Yogyakarta 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan”

Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan kota yang telah memiliki aspek mendasar sebagai kota nyaman huni dan kota pusat pelayanan jasa. Tidak lepas dari memperkuatnya nilai daya saing

daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai penekanan harapan menjadi suatu ideal kota di masa depan.

Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni adalah:

1. Kualitas hidup masyarakat Kota Yogyakarta yang tinggi di atas rata-rata nasional, yang tercermin dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.
2. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan perkotaan yang layak dan memadai bagi aktifitas warga.
3. Pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat melampaui standar pelayanan minimal.
4. Berkembangnya perekonomian yang mampu menggerakkan pembangunan kota dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Memberikan ruang yang kondusif bagi pengembangan nilai-nilai dan aktifitas sosial dan budaya sehingga mampu meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Kota Yogyakarta sebagai kota pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat adalah:

1. Maju dan berkembangnya Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan, pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang unggul baik secara komparatif maupun kompetitif.
2. Terbangunnya sistem pelayanan dan kelembagaan yang mudah, cepat, dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang memberikan manfaat bagi pembangunan kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatnya aktifitas sektor swasta pariwisata dan pendidikan sebagai penopang utama pelayanan jasa kota secara kompetitif dan sebagai gerbong utama pertumbuhan perekonomian kota dan mampu menarik picu pergerakan sektor andalan lain.
4. Meningkatkan perbaikan efisiensi dan efektifitas sistem produksi dan distribusi sebagai pelayanan skala lingkungan kota dan regional.
5. Menguatnya kualitas identitas kota yang mampu menjadikan diri sebagai basis kota dalam kerjasama dan pengembangan usaha serta menjadi bagian sistem pergerakan antar kota.

Kota Yogyakarta yang berorientasi pada keberdayaan masyarakat adalah:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan gaya hidup sehat dan bersih.

3. Meningkatnya etos kerja berkemajuan yaitu cerdas berteknologi, penuh prestasi, manusiawi, menciptakan rasa aman dan mencerahkan.
4. Meningkatnya peluang kerja yang bisa menampung tenaga kerja produktif.
5. Berkembangnya kemitraan sosial dalam semangat gotong royong yang akan memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi berbagai kerawanan sosial.

Kota Yogyakarta yang berpijak pada nilai keistimewaan adalah:

1. Berkembangnya pemerintah, pelayanan, dan aktifitas kemasyarakatan Kota Yogyakarta yang sesuai dan menjunjung tinggi nilai keistimewaan sesuai amanat Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Meningkatnya peran partisipasi dan kesejahteraan masyarakat atas pembangunan daerah berbasis keistimewaan.
3. Menguatnya identitas sebagai kota warisan budaya luhur, pendidikan, dan pariwisata yang menjadi bagian nilai keistimewaan.
4. Berkembangnya semangat “Jogja Berkemajuan” dalam penyelenggaraan pembangunan kota berupa kemauan kuat yang bersumber pada kekayaan budaya ngayogyakarta hadiningrat yang religius, memakmurkan dan berwawasan lingkungan serta pada daya kreatif masyarakat Jogja.

Upaya untuk mewujudkan visi “*Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan*” dirumuskan melalui tujuh misi pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

2.2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017 - 2022 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan

misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan, yakni dijabarkan pada Tabel 2.1. sebagai berikut.

Tabel 2. 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Yogyakarta
 Visi: “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan”

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	7,7	7,7	7,58	6,24*	13,97	7,29 - 7,18	7,68 – 6,32	6,62
			Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	55,41	55,41	55,93	56,53	63,86	64,5	65,00	65,29
			Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Pola pangan harapan	85	85	85,2	85,4	87,5	94,5	95,1	95,3
2	Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan daya saing kota Yogyakarta	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,42	0,42	0,41	0,40	0,592	0,392-0,426	0,382 - 0,464	0,519
			Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	5,13%	5,13%	5,16%	5,19%	-2,22%	4,04% - 4,21%	4,2 - 5,50%	4,52
3	Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Angka Kriminalitas	1.660	1.660	1.628	1.596	1.000	600	600	698
				Angka pelanggaran Perda	6.000	6.000	5.800	5.600	4.299	4.250	4200	3815
4	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	Kualitas pendidikan meningkat	Angka Rata-rata lama sekolah	11,42 th	11,42 th	11,43 th	11,43 th	11,45 th	11,46 th	11,72 th	11,89th
				Angka harapan lama sekolah	16,89 th	16,89 th	16,95 th	17,01 th	17,28 th	17,43 th	17,6th	17,61th

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,30 th	74,30 th	74,32 th	74,34 th	74,56 th	74,65 th	74,76 th	74,83th
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	44%	44%	50%	56%	61%	67%	72%	80,65%
5	Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	Mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib, dan berkelanjutan	Pemanfaatan Kesesuaian Ruang Meningkat	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	63,5%	63,55%	68,6%	73,4%	76,70%	79,60%	79,84-82,5%	82,53%
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50,64	50,64	50,84	51,04	51,24	55,64	55,65	60,89
6	Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	Meningkatkan sarana dan prasarana publik dan permukiman	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	39,32	39,32	40,29	41,29	42,34	43,8	45,28	46,49
7	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A
				Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

2.3. Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *top-down/bottom up*.

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan: Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencanapembangunan daerah; Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional; Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah; Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Berikut disajikan siklus pengendalian dokumen perencanaan dalam bentuk diagram.



Gambar 2. 1. Siklus Pengendalian Dokumen Perencanaan

Evaluasi terhadap Hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah. Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui:

- a. Realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD kota dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kota; dan
- b. Realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah provinsi

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah kota.

Evaluasi terhadap Hasil RPJMD menggunakan Formulir E.78 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berikut ditampilkan formulir yang dimaksud.

Tabel 2. 2. Formulir E.78 Evaluasi terhadap Hasil RPJMD
Kabupaten/Kota
Periode Pelaksanaan: tahun – tahun

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah:

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Target RPJMD Kabupaten/kota Pada RKP Kabupaten/kota Tahun Ke-										Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Melalui Pelaksanaan RKP Tahun Ke-										Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten/kota Hasil Pelaksanaan RKP Kabupaten/kota Tahun Ke- (%)										Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)												
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
																Rata-rata capaian kinerja (%)																																		
																Predikat kinerja																																		
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian:																																																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKP kabupaten/kota berikutnya:																																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kabupaten/kota berikutnya:																																																		

Disusun
....., tanggal

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN/KOTA

Disetujui
....., tanggal

GUBERNUR
PROVINSI

()

()

Petunjuk pengisian Formulir E.78:

- Kolom 1 Diisi dengan urutan program prioritas jangka menengah kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kota yang dievaluasi;
- Kolom 2 Diisi dengan sasaran pembangunan jangka menengah kota yang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah kota sesuai dengan tercantum dalam RPJMD kota yang dievaluasi;
- Kolom 3 Diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah kota sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD kota yang dievaluasi;
- Kolom 4 diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk mengukur realisasi kerjasasaran jangka menengah kota yang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih dari satu;
- Kolom 5 diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja periode perencanaan jangka menengah kota seperti tertulis dalam RPJMD kota yang dievaluasi. Isikan jumlah volume dan satuan data dasar yang digunakan pada Kolom tersebut;
- Kolom 6 diisi dengan target kinerja (K) program prioritas yang harus tercapai dan total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kota;
- Kolom 7 sampai dengan Kolom 11 diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas yang harus tercapai pada pelaksanaan RKPD tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD kabupaten/kota yang dievaluasi;
- Kolom 12 sampai dengan Kolom 16 diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program prioritas sebagaimana yang dihasilkan/dicapai melalui pelaksanaan RKPD kota tahun berkenaan;
- Kolom 17 sampai dengan Kolom 21 diisi dengan rasio antara realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator pada program tersebut;
- Kolom 22 diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp); dan

Kolom 23 diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanaan dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).

- Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
- Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah kota.
- Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kota berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD kota berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD kota yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode perencanaan jangka menengah kota.

Untuk mengukur capaian kinerja, digunakan skala nilai yang terdapat didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2. 3. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	90,01% ≤ 100,00%	Sangat Tinggi
2	75,01% ≤ 90,00%	Tinggi
3	65,01% ≤ 75,00%	Sedang
4	50,01% ≤ 65,00%	Rendah
5	≤ 50,00%	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

BAB III GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

Kota Yogyakarta memiliki *image* sebagai kota budaya, kota pendidikan, kota pariwisata, dan kota perjuangan. Hal tersebut berdasar pada sektor-sektor yang mendominasi maupun secara umum menggambarkan wilayah Kota Yogyakarta. Selain itu, nilai keistimewaan di Kota Yogyakarta utamanya didukung dengan adanya Kraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat maupun Pura Kadipaten Paku Alaman. Secara lebih lanjut, gambaran wilayah Kota Yogyakarta didasarkan pada kondisi geografis, demografis, ekonomi, sosial masyarakat, perencanaan pembangunan, serta kondisi sarana prasarana perkotaan ialah sebagai berikut.

3.1. Gambaran Geografis dan Fisik

Gambaran geografis dan fisik dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap kondisi eksisting geografis Kota Yogyakarta yang meliputi letak, luas, dan batas administrasi, serta aspek fisik yang meliputi topografi, curah hujan, tanah, dan penggunaan lahan eksisting. Adapun penjabaran aspek-aspek tersebut, yakni sebagai berikut.

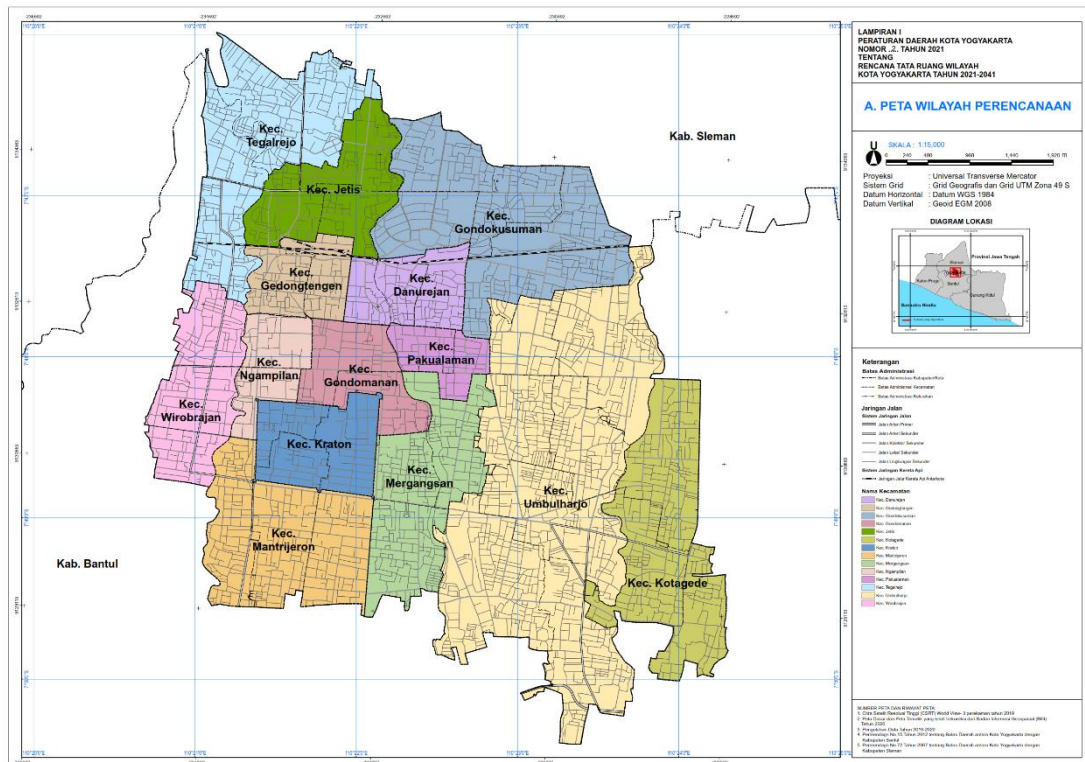
3.1.1. Aspek Geografis

Kota Yogyakarta merupakan Ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta, terletak diantara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Hal tersebut menjadikan lokasi Kota Yogyakarta sangat strategis. Fungsi wilayah Kota Yogyakarta tidak hanya sebagai pusat pelayanan politik dan administrasi, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi, jasa pelayanan, dan sosial budaya.

Letak wilayah Kota Yogyakarta secara absolut (posisi astronomis) adalah di antara $110^{\circ} 24' 19''$ Bujur Timur - $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur, dan $7^{\circ} 49' 26''$ Lintang Selatan - $7^{\circ} 15' 24''$ Lintang Selatan. Rentang jarak wilayahnya dari utara ke selatan adalah sejauh kurang lebih 7,5 kilometer, sedangkan rentang jarak dari barat ke timur adalah kurang lebih 5,6 kilometer. Batas wilayah Kota Yogyakarta secara lebih rinci adalah sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kabupaten Sleman (Kapanewon Depok dan Kapanewon Mlati)
- Sebelah Timur : Kabupaten Sleman (Kapanewon Depok dan Kapanewon Berbah) dan Kabupaten Bantul (Kapanewon Banguntapan)
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul (Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Sewon)
- Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (Kapanewon Gamping) dan Kabupaten Bantul (Kapanewon Kasihan)

Dengan kedudukan tersebut, secara umum Kota Yogyakarta memiliki posisi strategis antara lain sebagai ibukota Provinsi dan pusat kegiatan regional yang mencakup kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Bagian Selatan. Posisi ini membentuk pola aktifitas, potensi dan permasalahan yang khas sebagai wilayah yang bersifat terbuka dengan mobilitas yang tinggi. Posisi sebagai pusat dari semua aktifitas masyarakat yang berkaitan dengan keseluruhan dari aspek urusan dan kewenangan pemerintahan mendorong Kota Yogyakarta menuju kepada ciri-ciri masyarakat perkotaan (*urban society*) yang mengandalkan pada sektor-sektor pelayanan dan jasa ketimbang sektor-sektor manufaktur dan produksi berskala besar.



Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041

Gambar 3.1. Peta Administrasi Kota Yogyakarta

Secara administratif, Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kemantren, 45 kelurahan, 616 Rukun Warga (RW), dan 2.532 Rukun Tetangga (RT). Kota Yogyakarta memiliki luas 32,80 km² atau 3.280 ha. Berdasarkan unit kemantren, luas paling besar yaitu Kemantren Umbulharjo (834 ha atau 25,43 persen). Sementara itu, luas wilayah kemantren paling kecil yaitu Kemantren Pakualaman (64 ha atau 1,95 persen). Pembagian administrasi Kota Yogyakarta disajikan pada Tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1. Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta

Kemantren	Luas Wilayah (ha)	Persentase	Jumlah RW	Jumlah RT
Mantriheron	268	8,17	55	231
Kraton	138	4,21	43	175
Mergangsan	229	6,98	60	219
Umbulharjo	834	25,43	87	343
Kotagede	297	9,05	40	165
Gondokusuman	397	12,10	65	272

Kemantren	Luas Wilayah (ha)	Persentase	Jumlah RW	Jumlah RT
Danurejan	111	3,38	42	158
Pakualaman	64	1,95	19	83
Gondomanan	115	3,51	31	110
Ngampilan	85	2,59	21	120
Wirobrajan	175	5,34	34	165
Gedongtengen	99	3,02	36	138
Jetis	174	5,30	37	166
Tegalrejo	294	8,96	46	190
Jumlah	3.280	100	616	2.535

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022 (BPS)

3.1.2. Aspek Fisik

Wilayah Kota Yogyakarta sebagian besar berada pada kemiringan 0-2 persen yakni dengan luas 2.890,93 hektar atau mencapai 88,94 persen wilayah Kota Yogyakarta. Sementara itu, 313,32 hektar (9,64 persen) berada pada kemiringan 2-15%, dan 35,34 hektar (1,09 persen) berada pada kemiringan 15-40%, serta sisanya 10,94 hektar (0,34 persen) berada pada kemiringan diatas 40%. Wilayah dengan kemiringan diatas 40% terdapat di bantaran sungai. Kondisi topografi tersebut menunjukkan bahwa secara umum kondisi wilayah Kota Yogyakarta ada pada relief datar. Kondisi wilayah yang datar menjadi suatu potensi serta konsekuensi dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah, diantaranya dalam perkembangan perkotaan maupun permukiman. Kemantren Kraton dan Kemantren Pakualaman tercatat memiliki wilayah yang 100 persen berada pada kemiringan 0-2%. Secara rinci kondisi kemiringan lahan di Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Luas Wilayah Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemiringan Lahan

No	Kemantren	Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan (Ha)			
		0 – 2%	2 – 15%	15 – 40 %	>40 %
1.	Mantrijeron	244,43	12,18	4,3858	0
2.	Kraton	140	0	0	0
3.	Mergangsan	105,05	25,94	0	0
4.	Umbulharjo	764,54	45,04	1,66	0,73
5.	Kotagede	277,8	23,26	2,52	3,94
6.	Gondokusuman	328,58	67,76	2,66	0
7.	Danurejan	75,86	27,64	5,94	0,56
8.	Pakualaman	63	0	0	0
9.	Gondomanan	105,92	6,08	0	0
10.	Ngampilan	50,92	31,08	0	0
11.	Wirobrajan	147,35	21,26	6,06	1,33
12.	Gedongtengen	84,44	8,32	2,82	0,42
13.	Jetis	148,32	20,74	0,48	0,46
14.	Tegalrejo	254,66	24,02	8,82	3,5
Jumlah		2.890,39	313,32	35,34	10,94
Persentase		88,92	9,63	1,07	0,33

Sumber: Dokumen RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Kondisi wilayah Kota Yogyakarta secara fisik juga dapat dianalisis berdasarkan ketinggian wilayahnya. Wilayah Kota Yogyakarta berdasarkan ketinggian dapat diklasifikasi

menjadi dua, yakni kurang dari 100 meter dan antara 100 hingga 200 meter di atas permukaan air laut (dpal). Wilayah yang memiliki ketinggian kurang dari 100 meter dpal luasnya mencapai 1.657 hektar atau 50,98 persen. Sebagian lainnya seluas 1.593 hektar atau 49,02 persen berada pada ketinggian antara 100-200 meter dpal. Sebagian besar kemantren (8 kemantren) memiliki wilayah homogen dengan satu kategori wilayah ketinggian, tetapi terdapat pula beberapa kemantren (6 kemantren) yang memiliki dua kategori ketinggian wilayah.

Tabel 3.3. Luas Wilayah Kota Yogyakarta Menurut Ketinggian

No	Kemantren	Luas Wilayah berdasarkan Ketinggian (Ha)	
		< 100 m dpal	100 - 200 m dpal
1.	Mantrijeron	261	0
2.	Kraton	140	0
3.	Mergangsan	202	29
4.	Umbulharjo	607	206
5.	Kotagede	302	5
6.	Gondokusuman	0	399
7.	Danurejan	0	110
8.	Pakualaman	0	63
9.	Gondomanan	42	70
10.	Ngampilan	31	51
11.	Wirobrajan	72	103
12.	Gedongtengen	0	96
13.	Jetis	0	170
14.	Tegalrejo	0	291
Jumlah		1.657	1.593
Persentase		50,98	49,02

Sumber: Dokumen RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022

Dilihat dari kondisi geologi, Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng gunung berapi Merapi, mempunyai jenis tanah regosal atau vulkanis muda. Formasi geologi yang terdapat di Kota Yogyakarta adalah Batuan Sedimen Old Andesit. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. Kondisi hidrologi Kota Yogyakarta secara umum dipengaruhi oleh tiga aliran sungai. Sungai tersebut antara lain Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur, Sungai Code di bagian tengah, dan Sungai Winongo di bagian barat Kota Yogyakarta. Wilayah Kota Yogyakarta termasuk dalam Daerah Alirang Sungai (DAS) Opak Oyo, terutama Sub DAS Opak dan Sub DAS Winongo. Sungai-sungai di Kota Yogyakarta termasuk dalam sungai permanen yang mengalir sepanjang tahun dengan debit aliran yang bervariasi. Selain air permukaan, kondisi air tanah juga mempengaruhi kondisi hidrologi di Kota Yogyakarta. Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan muka freatik, dimana permukaan freatik merupakan batas zona jenuh air dengan zona tidak jenuh air. Akuifer lereng merapi dibagi menjadi empat zona, yakni (1) zona akuifer bagian utara, (2) zona akuifer bagian tengah, (3) zona akuifer bagian selatan, serta (4) zona akuifer wates dan gumuk pasir. Potensi air tanah tinggi karena terdapat pada daerah cekungan Yogyakarta.

Berdasarkan aspek klimatologi rata-rata curah hujan tertinggi di Kota Yogyakarta selama tahun 2021 terjadi pada bulan November, yaitu sebanyak 495,5 mm³ dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Mei sebesar 2,3 mm³. Adapun hari hujan terbanyak juga terjadi pada bulan Desember, yakni sebanyak 24 hari. Pada tahun 2021, kelembaban udara tertinggi di Kota Yogyakarta terjadi pada bulan November sebesar 85,2%. Sedangkan rata-rata tekanan udara pada tahun 2021 sebesar 992,64 mb dan suhu udara rata-rata 28,15°C.

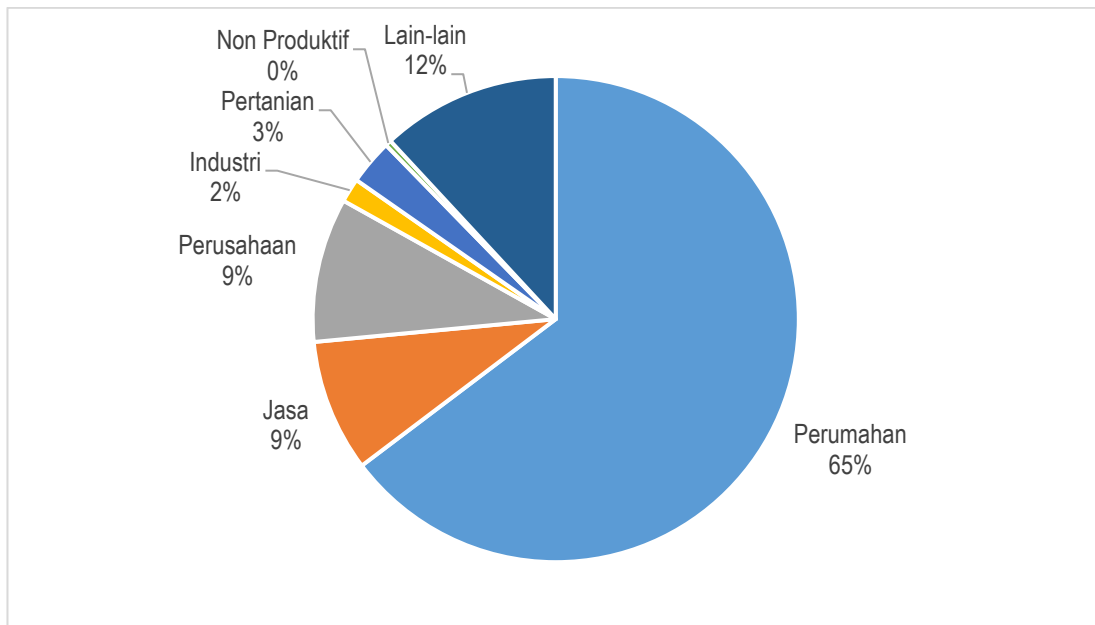
Dilihat dari penggunaan lahannya, Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah perkotaan yang mempunyai kegiatan utama bukan pada sektor pertanian (sektor primer), namun dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (sektor tersier). Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan lahan di Kota Yogyakarta didominasi oleh peruntukkan perumahan dengan luasan yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2021. Jenis peruntukan jasa dan perusahaan mengalami penurunan sedangkan industri mengalami peningkatan luasan meskipun peningkatannya tidak signifikan. Berikut merupakan tabel luasan penggunaan lahan berdasarkan status peruntukan lahan di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

Tabel 3.4. Luas Penggunaan Lahan Kota Yogyakarta Berdasarkan Status Peruntukan Lahan Tahun 2017 – 2021

Jenis Penggunaan Lahan	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Perumahan	Ha	2.101,19	2.101,24	2.101,57	2.102,75	2.102,05
Jasa	Ha	281,59	281,84	284,58	286,00	284,67
Perusahaan	Ha	311,06	311,54	311,69	312,00	311,87
Industri	Ha	52,23	52,23	52,23	52,00	52,23
Pertanian	Ha	101,10	100,45	97,48	97,50	97,32
Non Produktif	Ha	14,67	14,53	14,29	13,00	13,66
Lain-lain	Ha	388,16	388,16	388,16	386,75	388,19
Jumlah	Ha	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2022

Selanjutnya, karena fungsi yang dimiliki Kota Yogyakarta bukan sebagai sektor primer yang mewadahi sektor produksi seperti pertanian, maka peruntukan lahan pertanian dan non produktif di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 memiliki luasan yang cenderung menurun meskipun di tahun 2020 terdapat peningkatan namun tidak signifikan.



Gambar 3.2. Persentase Penggunaan Lahan di Kota Yogyakarta Tahun 2021

3.2. Gambaran Demografi

Gambaran demografi atau kondisi kependudukan dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap kondisi eksisting kependudukan di Kota Yogyakarta. Secara umum jumlah penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 menurut data BPS mencapai 376.324 jiwa. Menurut kemantren, jumlah penduduk paling tinggi berada di Kemantren Umbulharjo (68.576 jiwa atau 18,22%). Sementara itu, jumlah penduduk paling rendah yaitu di Kemantren Pakualaman (9.203 jiwa atau 2,45%). Tinggi atau rendah jumlah penduduk di Kota Yogyakarta lebih dipengaruhi oleh luas wilayah, dimana Kemantren Umbulharjo dengan jumlah penduduk yang tinggi, memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan kemantren lain. Bertambahnya penduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2020 ke tahun 2021 diduga karena banyaknya urbanisasi yang terjadi ke Kota Yogyakarta dengan alasan mencari pekerjaan dan sekolah. Mengingat Kota Yogyakarta disamping sebagai pusat pemerintahan juga merupakan pusat perekonomian (perdagangan dan jasa) serta pusat pariwisata.

Tabel 3.5. Jumlah Penduduk, kepadatan, dan Rasio Jenis Kelamin Kota Yogyakarta

No	Kemantren	Jenis Kelamin (Ribuan)			Kepadatan Penduduk (km ²)	Rasio Jenis Kelamin*
		Laki-Laki	Perempuan	Total		
1	Mantrijeron	16.356	17.392	33.748	12.930	94,04
2	Kraton	8.766	9.331	18.097	12.926	93,94
3	Mergangsan	14.072	14.839	28.911	12.516	94,83
4	Umbulharjo	33.531	35.045	68.576	8.445	95,68
5	Kotagede	16.578	17.116	33.694	10.975	96,86
6	Gondokusuman	17.935	19.207	37.142	9.309	93,38
7	Danurejan	9.186	9.628	18.814	17.104	95,41
8	Pakualaman	4.388	4.815	9.203	14.608	91,13
9	Gondomanan	6.251	6.618	12.869	11.490	94,45
10	Ngampilan	7.580	7.870	15.450	18.841	96,32
11	Wirobrajan	12.128	12.759	24.887	14.140	95,05
12	Gedongtengen	8.027	8.555	16.582	17.273	93,83
13	Jetis	11.410	12.115	23.525	13.756	94,18
14	Tegalrejo	17.043	17.783	34.826	11.968	95,84
Jumlah / Rata-Rata		183.251	193.073	376.324	11.579	94,91

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022

Tabel 3.5. menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2021 yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah menunjukkan angka 11.579 jiwa/km² dengan tingkat kepadatan tertinggi berada di Kemantren Ngampilan (18.841 jiwa/km²), sedangkan kepadatan terendah berada di Kemantren Umbulharjo (8.445 jiwa/km²). Tabel diatas juga menunjukkan tingkat *sex ratio* Kota Yogyakarta sebesar 94,91%, artinya jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Begitu pula *sex ratio* menurut kemantren, sebagian besar memiliki nilai kurang dari 100 persen. Sementara itu, *sex ratio* paling rendah dimiliki oleh Kemantren Pakualaman (91,13%).

Selain jumlah kepadatan penduduk dan *sex ratio*, komposisi dan struktur penduduk berdasarkan umur juga menjadi salah satu bagian yang menentukan perkembangan suatu daerah. Secara umum, penduduk dapat dikelompokkan menurut umur, yang dapat dimanfaatkan dalam menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk seperti kebutuhan pangan, papan, sandang, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Hal tersebut disebabkan masing-masing kelompok umur akan memiliki kebutuhan yang berbeda, contohnya tingkat pendidikan. Pada umumnya kelompok umur dibedakan menjadi tiga (3), yaitu: (1) umur 0 – 14 tahun yaitu usia muda/ belum produktif; (2) umur 15 – 64 tahun yaitu usia dewasa/ usia produktif/ usia kerja; dan (3) umur 65 tahun ke atas yaitu usia tua/ tidak produktif. Suatu daerah yang memiliki komposisi penduduk produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia muda dan usia lanjut memiliki tanggungan daerah yang lebih ringan dan tingkat ketergantungan (*Dependency Ratio*) yang rendah, karena kelompok usia produktif diharapkan mampu untuk mengupayakan kebutuhan dasar masing-masing. Hal ini berbeda dengan suatu daerah dengan proporsi penduduk muda dan penduduk tua yang lebih tinggi, maka tingkat ketergantungan (*Dependency Ratio*) akan semakin besar dan daerah memiliki tanggungan yang lebih banyak.

Tabel 3.6. Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur di Kota Yogyakarta Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	0-4	11.658	11.208	22.866
2	5-9	12.215	11.883	24.098
3	10-14	12.937	12.547	25.484
4	15-19	15.035	14.710	29.745
5	20-24	16.272	16.576	32.848
6	25-29	14.992	14.412	29.404
7	30-34	14.095	13.972	28.067
8	35-39	13.361	13.552	26.913
9	40-44	13.042	13.960	27.002
10	45-49	12.625	13.521	26.146
11	50-54	11.600	13.087	24.687
12	55-59	11.185	12.531	23.716
13	60-64	9.096	10.503	19.599
14	65-69	6.985	8.814	15.799
15	70-74	4.302	5.209	9.511
16	75+	3.851	6.588	10.439
Jumlah		183.251	193.073	376.324

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022

Berdasarkan Tabel 3.6., komposisi penduduk Kota Yogyakarta menunjukkan dominasi pada penduduk kelompok umur 20-24 tahun memiliki jumlah terbanyak yakni mencapai 32.848

jiwa, sedangkan penduduk kelompok umur 70-74 tahun merupakan yang paling sedikit, yakni 9.511 jiwa.

BAB IV ANALISIS REALISASI RPJMD TAHUN 2022

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 secara umum terdapat 7 Misi Pembangunan, 13 Sasaran Daerah, 78 Sasaran Perangkat Daerah, dan 162 Program Perangkat Daerah yang menunjang ketercapaian visi pembangunan 2017-2022.



Gambar 4. 1. Komposisi Sasaran dan Program Kota Yogyakarta dalam RPJMD

Sasaran daerah, sasaran perangkat daerah, dan program perangkat daerah merupakan satu kesatuan yang saling mendukung satu sama lain. Adapun visi pembangunan Kota Yogyakarta ialah sebagai berikut.

“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan”

Berdasarkan visi tersebut diketahui bahwa fokus pembangunan Kota Yogyakarta ialah menciptakan kota yang layak baik segi fisik kota maupun kehidupan ekonomi sosial bagi masyarakat Kota Yogyakarta guna menunjang daya saing dan keberdayaan masyarakat. Beberapa kata kunci yang ingin diwujudkan ialah layak huni; pusat pelayanan jasa; daya saing dan keberdayaan masyarakat. Adapun misi, sasaran, dan jumlah program yang menunjang visi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 1. Tabel Misi, Sasaran, dan Jumlah Program RPJMD Kota Yogyakarta

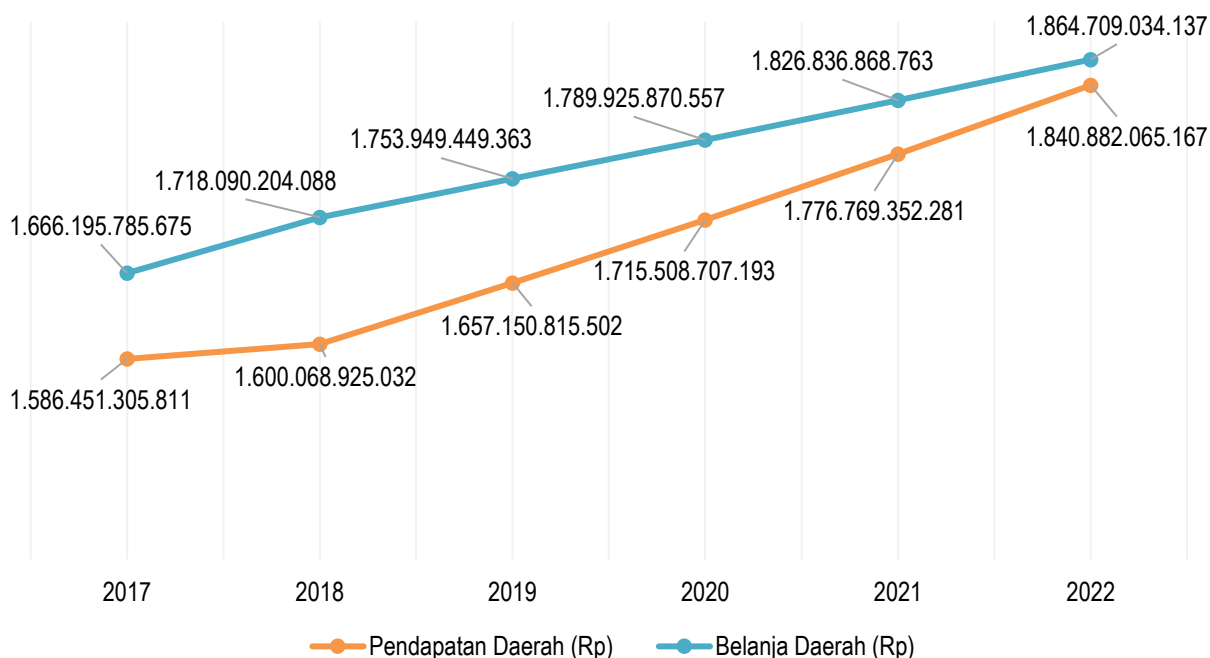
No	Misi	Sasaran	Jumlah Program
1	Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat	Kemiskinan masyarakat menurun	51
		Keberdayaan masyarakat meningkat	
		Ketahanan pangan masyarakat meningkat	
2	Misi 2: Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	26
		Pertumbuhan ekonomi meningkat	
3	Misi 3: Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	23
4	Misi 4: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya	Kualitas pendidikan meningkat	14
		Harapan hidup masyarakat meningkat	
		Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	
5	Misi 5: Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	10
		Kualitas lingkungan hidup meningkat	
6	Misi 6: Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	Infrastruktur wilayah meningkat	13
7	Misi 7: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	25

4.1. Analisis Realisasi Keuangan APBD Tahun 2022

Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan keuangan daerah dalam APBD adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Dalam perencanaan APBD terdapat target pendapatan daerah yang merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan pada akhir tahun anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah.

Berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, diketahui perencanaan keuangan daerah selama 6 tahun yang dapat diusahakan selama masa perencanaan dengan

harapan anggaran APBD tersebut dapat tercapai 100% dan terserap secara maksimal. Dalam sistem keuangan daerah, terdapat dua hal yang penting untuk melihat apakah suatu daerah terjadi surplus atau defisit keuangan, yakni dengan melihat selisih pendapatan daerah dengan belanja daerah. Dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, telah ditentukan target pendapatan daerah dan belanja daerah yang tiap tahunnya mengalami peningkatan target seperti berikut:



Gambar 4. 2. Proyeksi APBD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa perkiraan APBD Kota Yogyakarta dari tahun 2017-2022 selalu meningkat. Perkiraan APBD yang tercantum dalam RPJMD, dapat menjadi dasar untuk mengetahui capaian pendapatan daerah dan serapan untuk belanja daerah hingga akhir periode RPJMD Tahun 2022. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta pada tahun akhir RPJMD ditargetkan sebesar Rp 1.840.882.065.167,- yang berasal dari tiga sumber, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan realisasi RPJMD pelaksanaan Tahun 2022 diketahui bahwa capaian pendapatan daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 telah melebihi target akhir tahun pelaksanaan RPJMD, yakni mencapai Rp 1.889.922.124.719,58 atau dengan capaian sebesar 102,66% dari target yang diperkirakan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan performa keuangan daerah dari tahun sebelumnya untuk mencapai target akhir tahun RPJMD.

Belanja daerah Kota Yogyakarta pada RPJMD pelaksanaan Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 1.864.709.034.137,- untuk mengakomodasi biaya belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Berdasarkan realisasi RPJMD pelaksanaan Tahun 2022, diketahui bahwa jumlah belanja daerah Kota Yogyakarta sebesar Rp 1.826.804.253.746,60 atau 97,97% dari target. Hal ini mengindikasikan telah terpenuhinya

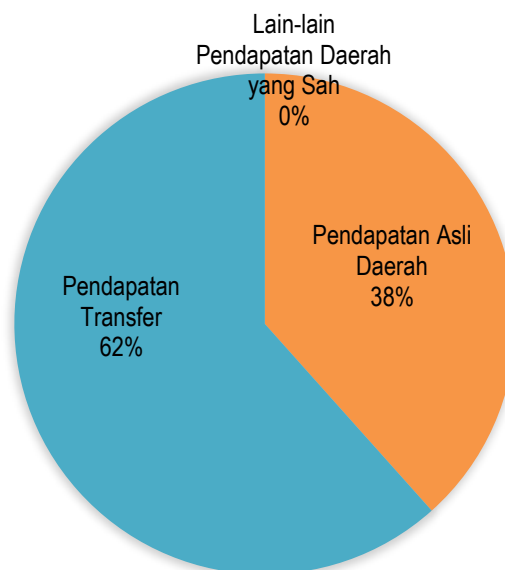
kebutuhan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Berdasarkan total realisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut, dapat diketahui bahwa pada RPJMD pelaksanaan Tahun 2022 terjadi surplus sebesar Rp 63.117.870.972,98. Realisasi ini berbeda dengan proyeksi keuangan daerah Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 yang diperkirakan defisit sebesar (-) Rp 23.826.968.970,- pada akhir tahun RPJMD. Capaian surplus anggaran Kota Yogyakarta dalam realisasi RPJMD pelaksanaan Tahun 2022 disebabkan karena meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 4. 2. Anggaran dan Realisasi APBD Kota Yogyakarta Tahun 2022

Uraian	Jumlah Anggaran dalam RPJMD (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	% Realisasi	Selisih Antara Realisasi dengan Anggaran
Pendapatan Daerah	1.840.882.065.167	1.889.922.124.719	102%	49.040.059.552
Belanja Daerah	1.864.709.034.137	1.826.804.253.746	97%	- 37.904.780.391
Surplus/ Defisit	- 23.826.968.970	63.117.870.972		

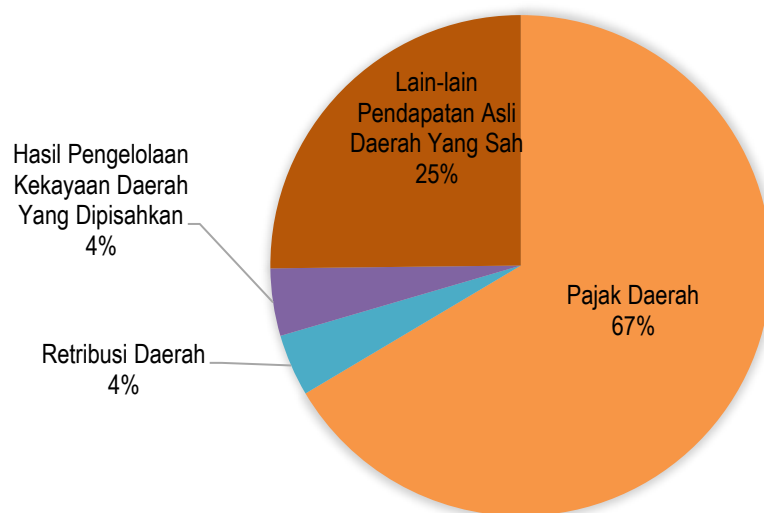
Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan Realisasi APBD Tahun 2022

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) Pendapatan Asli Daerah meliputi (i) pajak daerah; (ii) retribusi daerah; (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (iv) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



Gambar 4. 3. Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta pada Pelaksanaan RPJMD Tahun 2022

Proporsi realisasi PAD Kota Yogyakarta hanya sebesar 38% dari total seluruh pendapatan daerah Kota Yogyakarta. Angka ini memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta. Realisasi PAD pada RPJMD pelaksanaan Tahun 2022 mencapai nilai sebesar Rp 725.577.542.997,58 atau 121% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu Rp 595.683.443.000,-.

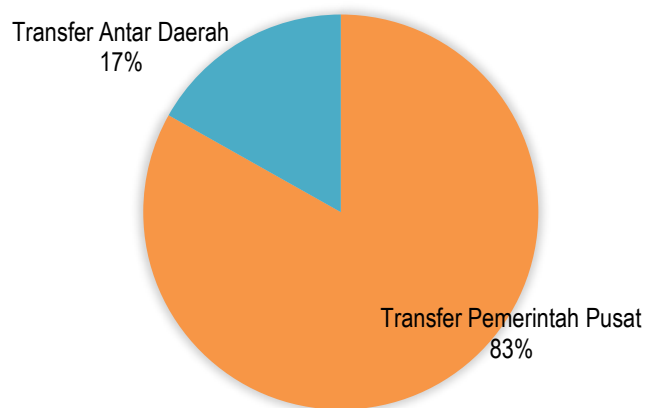


Gambar 4. 4. Proporsi Realisasi PAD Kota Yogyakarta pada Pelaksanaan RPJMD Tahun 2022

Proporsi yang mendominasi PAD Kota Yogyakarta didapatkan dari pajak daerah yang mencapai 67% atau Rp 482.269.519.901,00 dari total PAD Kota Yogyakarta sedangkan Retribusi Daerah memiliki proporsi terkecil sebesar 4%. Komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menyumbang 25% dari total PAD Kota Yogyakarta dengan nilai sebesar Rp 174.812.395.310,-. Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah adalah dua komponen yang telah memenuhi target yang tertuang dalam RPJMD yang secara berturut-turut adalah sebesar 125% dari target RPJMD dengan nilai Rp 386.956.500.000,- dan 132% dari target RPJMD dengan nilai Rp 138.600.000.000,-.

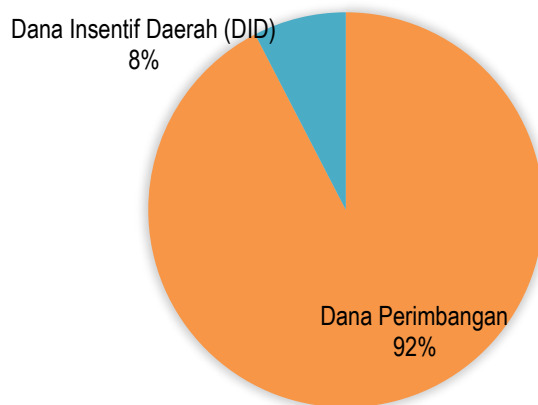
Dalam penjelasan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 34:

- Ayat 1: Pendapatan Transfer meliputi: (a) transfer pemerintah pusat; dan (b) transfer antar-daerah.
- Ayat 2: Transfer pemerintah pusat terdiri atas: (a) dana perimbangan; (b) dana insentif daerah; (c) dana otonomi khusus; (d) dana keistimewaan; dan (e) dana desa.
- Ayat 3: Transfer antar-daerah terdiri atas: (a) pendapatan bagi hasil; dan (b) bantuan keuangan.



Gambar 4. 5. Proporsi Realisasi Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta pada Pelaksanaan RPJMD Tahun 2022

Berdasarkan proporsinya terhadap pendapatan daerah, pendapatan transfer memiliki proporsi yang paling besar. Berdasarkan realisasi pada tahun 2022, proporsinya mencapai 62% dari total pendapatan daerah Kota Yogyakarta. Adapun proporsi yang mendominasi pendapatan transfer didapatkan dari Transfer pemerintah pusat yang mencapai 83% atau Rp 968.204.676.723,00,- dari total pendapatan transfer. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta dalam pendanaan daerah masih relatif bergantung pada pemerintah pusat.



Gambar 4. 6. Proporsi Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Kota Yogyakarta pada Pelaksanaan RPJMD Tahun 2022

Berdasarkan proporsi terhadap total transfer pemerintah pusat, dana perimbangan memiliki proporsi yang paling besar. Berdasarkan realisasi pada tahun 2022, proporsinya mencapai 92% dari total transfer pemerintah pusat. Realisasi dana perimbangan pada RPJMD pelaksanaan Tahun 2022 mencapai nilai sebesar Rp 894.708.151.723,00 atau 80% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu Rp 1.108.227.674.250,-.

Pada 2022, tidak terdapat Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam pelaksanaan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

Adapun anggaran dan realisasi pendapatan daerah Kota Yogyakarta pada RPJMD pelaksanaan Tahun 2022 ialah sebagai berikut:

Tabel 4. 3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Yogyakarta pada Pelaksanaan RPJMD Tahun 2022

NO.	URAIAN	ANGGARAN RPJMD	NO.	URAIAN	REALISASI	SELISIH
1	PENDAPATAN DAERAH	1.840.882.065.167	1	PENDAPATAN DAERAH	1.889.922.124.719	- 69.496.064.939
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	595.683.443.000	1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	725.577.542.997	14.572.442.338
1.1.1.	Pajak Daerah	386.956.500.000	1.1.1.	Pajak Daerah	482.269.519.901	- 6.343.615.643
1.1.2.	Retribusi Daerah	34.000.000.000	1.1.2.	Retribusi Daerah	29.050.473.794	- 7.044.633.471
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.126.943.000	1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.556.606.183	- 9.151.703.858
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	138.600.000.000	1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	182.700.943.119	37.112.395.310
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1.108.227.674.250	1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.164.344.581.722	
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	70.292.741.066	1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	968.204.676.723	
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	741.152.262.765	1.2.1.1	Dana Perimbangan	894.708.151.723	- 267.929.147.678 (selisih antar dana perimbangan)
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	296.782.670.419	1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	73.496.525.000	
			1.2.2.	Transfer Antar Daerah	196.139.904.999	
			1.2.2.1	Bantuan Keuangan	145.324.342.606	
					50.815.562.393	
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	136.970.947.917	1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	- 102.639.404.750
1.3.1.	Hibah	-	1.3.1.	Hibah	-	
1.3.2.	Dana Darurat	-	1.3.2.	Dana Darurat	-	
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	127.784.293.023	1.3.3.	Lain-lain Pendapatan sesuai PUU	-	
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.804.530.075				
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.382.124.819				

Sumber: RPJMD 2017-2022 & Realisasi APBD 2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis: (a) belanja pegawai; (b) belanja barang dan jasa; (c) belanja bunga; (d) belanja subsidi; (e) belanja hibah; dan (f) belanja bantuan sosial.

2. Belanja Modal

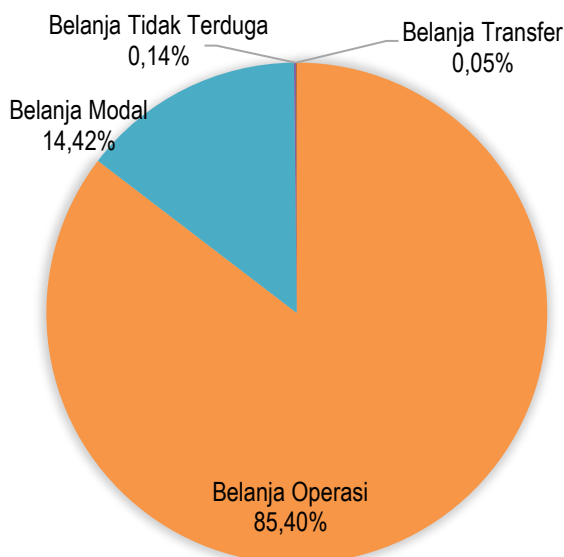
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga dirinci atas belanja tidak terduga.

4. Belanja Transfer

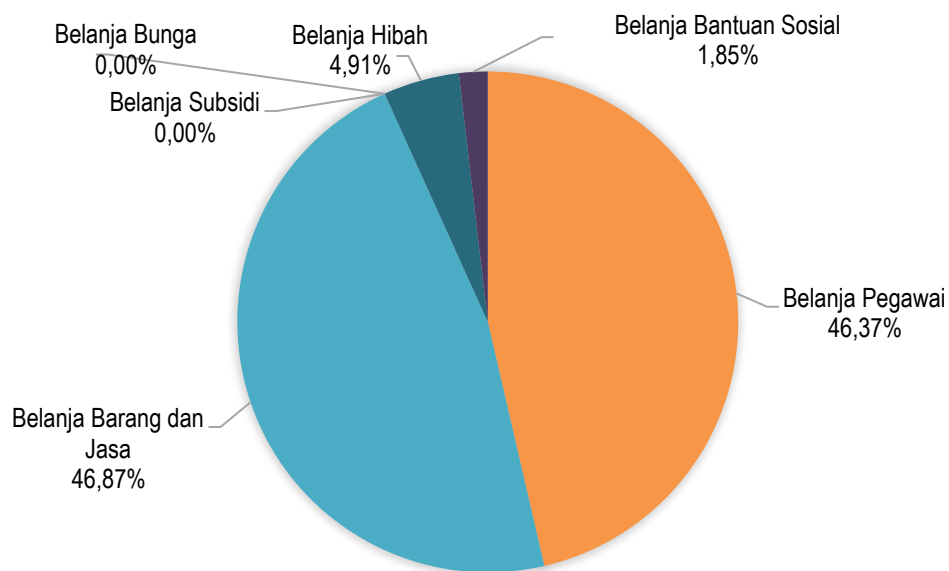
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis: (a) belanja bagi hasil; dan (b) belanja bantuan keuangan.



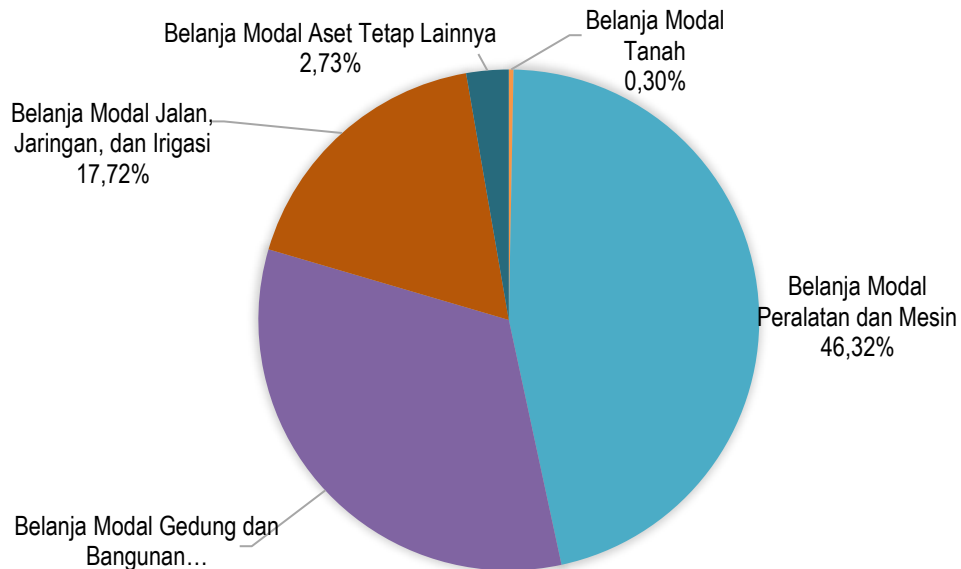
Gambar 4. 7. Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Pelaksanaan RPJMD Tahun 2022

Realisasi Belanja daerah pada RPJMD pelaksanaan Tahun 2022 mencapai nilai sebesar Rp 1.826.804.253.746,60 atau 97% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu Rp 1.864.709.034.137,-. Berdasarkan proporsinya terhadap belanja daerah, belanja operasi memiliki proporsi yang paling besar. Berdasarkan realisasi pada tahun 2022, proporsinya

mencapai 85,40% dari total belanja daerah Kota Yogyakarta. Adapun proporsi yang mendominasi belanja operasi didapatkan dari belanja barang dan jasa yang mencapai 46,87% atau Rp 731.190.485.909,54 dari total belanja operasi. Proporsi terbesar berikutnya didapatkan dari belanja pegawai yang mencapai 46,37% atau Rp 723.429.936.615,00 dari total belanja operasi.



Gambar 4. 8. Proporsi Realisasi Belanja Operasi Kota Yogyakarta pelaksanaan RPJMD Tahun 2022



Gambar 4. 9. Proporsi Realisasi Belanja Modal Kota Yogyakarta pelaksanaan RPJMD Tahun 2022

Berdasarkan proporsinya terhadap belanja daerah, belanja modal memiliki proporsi kedua terbesar setelah belanja operasi. Berdasarkan realisasi pada tahun 2022, proporsinya mencapai 14,42% dari total belanja daerah Kota Yogyakarta. Adapun proporsi yang mendominasi belanja modal didapatkan dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang mencapai 46,32% atau Rp 121.999.668.034,00 dari total belanja modal. Proporsi terbesar berikutnya

didapatkan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang mencapai 32,93% atau Rp 86.723.158.187,00 dari total belanja operasi.

Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer tidak memiliki porsi yang cukup besar dalam komponen belanja daerah. Belanja Tidak Terduga proporsinya mencapai 0,14% atau senilai Rp 2.518.441.916,00 dari total belanja daerah. Adapun proporsi Belanja Transfer tahun 2022 senilai Rp 870.844.890,00 atau 0,05% dari total belanja daerah yang didapat dari belanja bantuan keuangan.

Adapun anggaran dan realisasi belanja Kota Yogyakarta pada RPJMD pelaksanaan Tahun 2022 ialah sebagai berikut.

Tabel 4. 4. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta pada Pelaksanaan RPJMD Tahun 2022

NO.	URAIAN	ANGGARAN RPJMD	NO.	URAIAN	REALISASI	SELISIH
2	BELANJA DAERAH	1.864.709.034.137	2	BELANJA DAERAH	1.826.804.253.746	- 134.867.983.674
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	817.853.254.815	2.1.	BELANJA OPERASI	1.560.028.542.836	
2.1.1.	Belanja Pegawai	741.163.259.524	2.1.1.	Belanja Pegawai	723.429.936.615	
2.1.2.	Belanja Bunga	-	2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	731.190.485.909	
2.1.3.	Belanja Subsidi	-	2.1.3.	Belanja Bunga	-	
2.1.4.	Belanja Hibah	68.000.000.000	2.1.4.	Belanja Subsidi	-	
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1.850.000.000	2.1.5.	Belanja Hibah	76.596.866.312	
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	28.811.254.000	
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	4.339.995.291				
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	2.2.	BELANJA MODAL	263.386.424.104	
			2.2.1	Belanja Modal Tanah	801.666.600	
2.2.	BELANJA LANGSUNG	1.046.855.779.322	2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.999.668.034	
2.2.1.	Belanja Pegawai		2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	86.723.158.187	
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa		2.2.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.670.655.758	
2.2.3.	Belanja Modal		2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.191.275.525	
			2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.518.441.916	
			2.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.518.441.916	

NO.	URAIAN	ANGGARAN RPJMD	NO.	URAIAN	REALISASI	SELISIH
			2.4.	BELANJA TRANSFER	870.844.890	
			2.4.1.	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	232.293.000	
			2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	638.551.890	

Sumber: RPJMD 2017-2022 dan Realisasi APBD 2022

4.2. Analisis Realisasi Sasaran Daerah, Sasaran dan Program Perangkat Daerah Berdasarkan Misi RPJMD Tahun 2017-2022

Evaluasi Hasil RPJMD pelaksanaan tahun 2022 dapat dilihat berdasarkan kriteria status ketercapaiannya. Adapun batasan status ketercapaian tersebut mencakup dua hal, yaitu tercapai dan tidak tercapai seperti berikut:

Tabel 4. 5. Predikat Perangkat Kerja Berdasarkan Status Ketercapaian

No	Interval Nilai Realisasi	Status Ketercapaian
1	≥100%	Tercapai
2	<100%	Tidak Tercapai

Suatu indikator dikatakan dapat tercapai apabila capaian realisasinya melebihi atau sama dengan 100%, sedangkan indikator dikatakan tidak tercapai apabila memiliki capaian realisasi kurang dari 100%. Berbeda dengan status capaian pada Permendagri yang mensyaratkan capaian 91%-100% memiliki predikat sangat tinggi, namun dalam status ketercapaian ini, meskipun suatu indikator memiliki capaian sangat tinggi, belum tentu status nya tercapai. Hal ini dapat menjadi pedoman bagi pada Kota Yogyakarta dan perangkat daerah terkait untuk dapat mengukur status ketercapaian sasaran dan program, sehingga mampu untuk meningkatkan kinerja realisasi pada tahun-tahun berikutnya. Walaupun demikian, status ini hendaknya disikapi secara bijak oleh setiap perangkat daerah agar jangan sampai untuk memenuhi status tercapai dilakukan perubahan target pada tahun berikutnya.

Evaluasi hasil RPJMD Kota Yogyakarta dilakukan secara menyeluruh dari sasaran daerah, sasaran perangkat daerah, hingga program perangkat daerah sehingga penting untuk mengetahui capaian ketiga komponen tersebut secara keseluruhan. Adapun rekapitulasi capaian sasaran daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4. 6. Rekapitulasi Capaian Sasaran Daerah Berdasarkan Status Ketercapaian Tahun 2021 & 2022

Status Ketercapaian	2021		2022	
	Jumlah Indikator	Capaian 2021	Jumlah Indikator	Capaian 2022
Tercapai	14	88%	15	94%
Tidak Tercapai	2	12%	1	6%

Berdasarkan kriteria ketercapaian pada tabel di atas, tahun 2022 diketahui terdapat 6% atau 1 indikator dari total 16 indikator yang belum memenuhi target yang telah ditentukan (tidak tercapai), yaitu Ketimpangan Pendapatan antar Penduduk Menurun. Capaian ini mengalami peningkatan dari capaian tahun 2021 dengan proporsi 12% atau 2 indikator tidak tercapai, yaitu angka kemiskinan dan Indeks Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*). Meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal tersebut tentunya menjadi bahan evaluasi untuk perumusan Indikator Sasaran Daerah Kota Yogyakarta ditahun mendatang.

Adapun capaian realisasi 13 sasaran daerah Kota Yogyakarta berdasarkan kriteria status ketercapaian secara lebih rinci ialah sebagai berikut:

Tabel 4. 7. Realisasi dan Capaian Sasaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 - 2022

Misi	Sasaran Daerah	Indikator	2021					2022				
			Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian
Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	7,29	7,29 - 7,18	7,69	94,51%	Tidak Tercapai	7,1	7,68 - 6,32	6,62	113,80%	Tercapai
	Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	57,74	64,5	64,82	100,50%	Tercapai	58,34	65	65,29	100,45%	Tercapai
	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Pola pangan harapan	85,8	94,5	95,1	100,63%	Tercapai	86	95,1	95,3	100,21%	Tercapai
Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,397	0,393 - 0,426	0,464	91,08%	Tidak Tercapai	0,395	0,382 - 0,464	0,519	88,15%	Tidak Tercapai
	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	5,21%	4,04% - 4,21%	5,09	120,19%	Tercapai	5,23%	4,2% - 5,50%	5,12%	100,00%	Tercapai
Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Angka Kriminalitas	1532	600	534	111,00%	Tercapai	1500	600	574	104,33%	Tercapai
		Jumlah pelanggaran Perda	5200	4250	4187	101,48%	Tercapai	5000	4200	3815	109,17%	Tercapai
Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya	Kualitas pendidikan meningkat	Angka Rata-rata lama sekolah	11,44 th	11,46 th	11,72th	102,27%	Tercapai	11,45 th	11,72 th	11,89th	101,45%	Tercapai
		Angka harapan lama sekolah	17,28 th	17,43 th	17,60th	100,98%	Tercapai	17,33 th	17,6th	17,61th	100,06%	Tercapai
	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,38 th	74,65 th	74,76th	100,15%	Tercapai	74,4th	74,76 th	74,83th	100,09%	Tercapai

Misi	Sasaran Daerah	Indikator	2021					2022				
			Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian
	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	67%	67%	70,83%	105,72%	Tercapai	72%	72%	80,65%	112,01%	Tercapai
Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	79,60%	79,60%	79,84%	100,30%	Tercapai	82,50%	79,84-82,5%	82,53%	100,04%	Tercapai
	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,44	55,64	56,36	101,29%	Tercapai	51,64	55,65	60,89	109,42%	Tercapai
Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	43,36	43,8	45,28	103,38%	Tercapai	44,41	45,28	46,49	102,67%	Tercapai
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	BB	A	A	100,00%	Tercapai	A	A	A	100,00%	Tercapai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100,00%	Tercapai	WTP	WTP	WTP	100,00%	Tercapai

Adapun rekapitulasi capaian sasaran perangkat daerah dan program perangkat daerah berdasarkan kriteria status ketercapaiannya ialah sebagai berikut.

Tabel 4. 8. Rekapitulasi Sasaran Perangkat Daerah Berdasarkan Status Ketercapaian Tahun 2021 dan Tahun 2022

Status Ketercapaian	2021		2022	
	Jumlah Indikator	Capaian 2021	Jumlah Indikator	Capaian 2022
Tercapai	75	84%	76	85%
Tidak Tercapai	14	16%	13	15%

Berdasarkan hasil capaian di atas, pada tahun 2022 menurut kriteria ketercapaian menunjukkan bahwa 85% atau 76 indikator sasaran perangkat daerah telah tercapai. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, terdapat 84% atau 75 indikator sasaran perangkat daerah telah tercapai. Terdapat peningkatan capaian dari tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.

Tabel 4. 9. Rekapitulasi Capaian Program Perangkat Daerah Berdasarkan Status Ketercapaian Tahun 2021

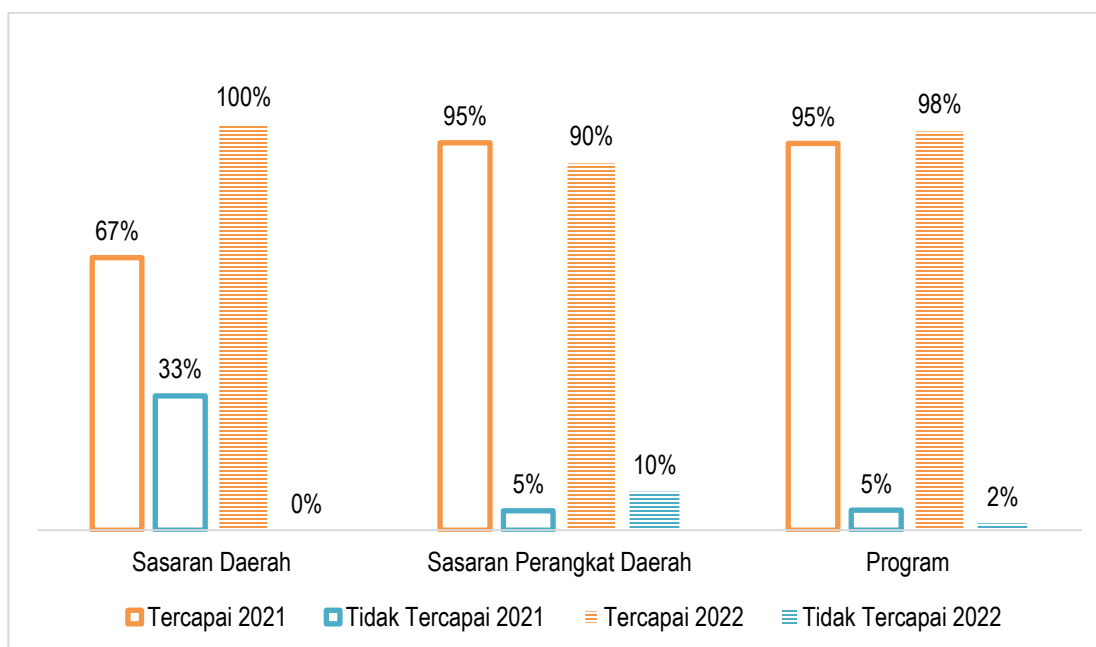
Status Ketercapaian	2021		2022	
	Jumlah Indikator	Capaian 2021	Jumlah Indikator	Capaian 2022
Tercapai	261	92%	254	90%
Tidak Tercapai	22	8%	27	10%

Jika dilihat berdasarkan kriteria status ketercapaian program perangkat daerah, tahun 2022 diketahui sebesar 90% atau 254 indikator program telah tercapai, namun masih terdapat 10% indikator program lainnya yang belum tercapai. Jika dibandingkan capaian tahun 2021, 92% atau 254 indikator program telah tercapai sementara 8% lainnya belum tercapai. Capaian indikator program tahun 2021 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan selisih 2% atau 7 indikator program.

Adapun capaian sasaran daerah, sasaran perangkat daerah serta program perangkat daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 lebih rinci akan dijabarkan per misi pembangunan pada subbab berikut.

4.2.1. Misi 1: Meningkatkan Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat

Berdasarkan status ketercapaiannya, diketahui bahwa 100% sasaran daerah dan 90% sasaran perangkat daerah telah tercapai. Untuk capaian program, 98% telah tercapai dan 2% tidak tercapai. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sasaran daerah menunjukkan peningkatan ketercapaian yang cukup signifikan pada tahun 2022. Adapun sasaran perangkat daerah menunjukkan penurunan sebesar 5% dari tahun 2021. Untuk program perangkat daerah, proporsi ketercapaian mengalami peningkatan sebesar 3% dari tahun 2022 menjadi 98%.



Gambar 4. 10. Status Ketercapaian Sasaran Daerah, Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 1 Kota Yogyakarta Tahun 2022

4.2.1.1. Sasaran Daerah

Adapun untuk mewujudkan misi meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat Kota Yogyakarta secara umum didukung oleh tiga (3) sasaran daerah yang mencakup kemiskinan, keberdayaan masyarakat dan pola pangan harapan. Diketahui bahwa 100% atau 3 sasaran daerah untuk misi pertama dapat dicapai bahkan tercapai $\geq 100\%$. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, 33% atau 1 sasaran daerah tidak tercapai. Realisasi sasaran daerah pada misi pertama secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4. 10. Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 1 Kota Yogyakarta

Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	2021		2022				Status Ketercapaian
		Capaian	Status Ketercapaian	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Capaian	
Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	94,51%	Tidak Tercapai	7,1	7,68 - 6,32	6,62	113,80%	Tercapai
Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	100,50%	Tercapai	58,34	65	65,29	100,45%	Tercapai
Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Pola pangan harapan	100,63%	Tercapai	86	95,1	95,3	100,21%	Tercapai

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh capaian sasaran daerah pada tahun 2022 berhasil tercapai $\geq 100\%$. Angka kemiskinan mengalami peningkatan capaian pada tahun 2022 menjadi 113,80%. Realisasi angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 6,62 telah melampaui target RPJMD sebesar 7,1 dan target Renstra sebesar 7,68-6,32. Tahun 2021 capaian angka kemiskinan berada diangka 94,51% dengan status tidak tercapai. Seiring dengan turunnya kasus covid19, roda perekonomian masyarakat Kota Yogyakarta mulai berangsur membaik.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya memberikan program kegiatan yang mampu mendorong penurunan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta. Disisi lain, keberdayaan masyarakat dan pola pangan harapan berhasil dipertahankan diangka $\geq 100\%$. Realisasi indeks keberdayaan berhasil tercapai sebesar 65,29. Angka ini telah melebihi target RPJMD sebesar 58,34. Adapun pola pangan harapan berhasil terealisasi sebesar 95,3 pada tahun 2022. Angka tersebut telah melampaui target RPJMD sebesar 86. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sasaran daerah pada misi pertama dapat dicapai dengan baik pada tahun 2022. Berikut faktor pendorong dan penghambat serta strategi untuk mengatasi hambatan dalam periode RPJMD Tahun 2022.

Tabel 4. 11. Faktor Pendorong Keberhasilan Sasaran Daerah Misi 1 Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sasaran Daerah	Faktor Pendorong
Kemiskinan masyarakat menurun	<p>Perlindungan Sosial</p> <p>Melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, intervensi yang dilakukan diantaranya adalah penyaluran bantuan sosial PKH, pangan, asistensi sosial lanjut usia miskin, bantuan bagi keluarga miskin yang belum mendapat program, dan bantuan langsung tunai bagi masyarakat terdampak kenaikan BBM, bantuan modal usaha untuk UEP PKH Graduasi.</p> <p>Program lainya yang terkait adalah Rehabilitasi Sosial. Intervensi yang dilakukan diantaranya adalah pelayanan orang terlantar kehabisan bekal, santunan kematian, dukungan shelter Covid-19 dan shelter mandiri di wilayah, penanganan jenazah terlantar, layanan anak terlantar di Wiloso Projo dan Lansia terlantar di Budhidharma, pemberian motivasi dan pelatihan singkat bagi keluarga penyandang disabilitas, bantuan modal usaha KUBE pengembangan, pemberian bimbingan sosial, motivasi, pelatihan singkat bagi korban tindak kekerasan, perempuan rawan sosial ekonomi, penyandang disabilitas, dan asistensi sosial bagi penyandang disabilitas.</p>
	<p>Jaminan Pendidikan</p> <p>Intervensi yang dilakukan Dinas Pendidikan melalui Program Pengelolaan Pendidikan adalah Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Jaminan Pendidikan Daerah (JPD), dan Beasiswa Prestasi.</p>
	<p>Jaminan Kesehatan</p> <p>Dinas Kesehatan mengadopsi skema intervensi Cakupan Kesehatan Universal atau Universal Health Coverage (UHC). Skema ini menjamin premi asuransi kesehatan bagi siapapun masyarakat Kota Yogyakarta. Skema tersebut diwujudkan dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan output Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat.</p>
	<p>Peningkatan Pendapatan</p> <p>Skema peningkatan pendapatan dijalankan oleh beberapa OPD, diantaranya dengan pelatihan, bantuan permodalan serta pembinaan dan atau pendampingan. Pelatihan diantaranya diselenggarakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui 13 jenis pelatihan</p>
Keberdayaan masyarakat meningkat	<p>Upaya yang dilakukan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya adalah Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak. PUG dan Pemberdayaan Perempuan diantaranya dilakukan melalui pembinaan organisasi/ lembaga PUG di Kota Yogyakarta, dengan berbagai jenis intervensi sesuai kebutuhan. Perlindungan Perempuan dilakukan melalui penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga, baik dengan upaya preventif maupun penanganan kasus</p>
	<p>Adanya peningkatan keberdayaan masyarakat pada aspek pemberdayaan masyarakat berbasis kampung ditandai dengan peningkatan jumlah deklarasi tematik pembangunan masing-masing kampung. Asumsi yang dibangun adalah deklarasi suatu tema dilakukan karena kampung tersebut sudah melakukan persiapan pada tema-tema pembangunan</p>

Sasaran Daerah	Faktor Pendorong
	terkait, diantaranya Kampung Ramah Anak, Kampung Tangguh Bencana, Kampung Panca Tertib, dan Kampung KB
Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Peningkatan ketersediaan pangan Masyarakat Kota Yogyakarta melalui program pengembangan kampung sayur dan rintisan kampung pangan di 4 lokasi, rintisan kampung pangan lestari di 4 lokasi serta pengembangan kegiatan pekarangan pangan lestari di 7 lokasi
	Pengembangan sistem ketersediaan dan cadangan pangan melalui pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah dan monitoring secara berkala melalui kerja sama dengan Perusahaan Daerah Taru Martani.
	Pengembangan sistem informasi mutu, stok, pasokan dan harga pangan melalui monitoring pengawasan mutu kualitas, stok, pasokan dan harga pangan secara berkala serta pengembangan peta mutu, stok dan harga pangan. Inovasi yang dilakukan yaitu peta pemantauan pemotongan luar RPH, peta stok pasokan pangan, link data sektor terkait pangan.

Adapun faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah sasaran daerah pada misi 1 adalah:

Tabel 4. 12. Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran Daerah Misi 1 Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sasaran Daerah	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Kemiskinan masyarakat menurun	DTKS sebagai database intervensi kesejahteraan sosial belum jelas parameternya sangat dinamis dan sulit diakses realtime	Penyusunan Peningkatan DTKS melalui Optimalisasi verval DTKS dengan menggunakan parameter lokal
	Penyaluran bansos tidak sesuai jadwal waktu yang reguler dan sering terlambatnya pemberian data bansos dari Pusat	Optimalisasi koordinasi dengan pusat untuk akses DTKS secara cepat
	Metode Penyaluran yang berganti antara tunai dan non tunai mempersulit kontrol terhadap penggunaan bansos (BLT)	Optimalisasi edukasi kepada KPM penerima bansos terkait penggunaan bantuan tunai agar sesuai dengan tujuan bansosnya
Keberdayaan masyarakat meningkat	kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat dalam mengikuti kegiatan gender corner	Memperbanyak lokus wilayah dan kegiatan yang diikuti Gender Corner
	Tidak semua korban kekerasan perempuan kooperatif ketika dilakukan pendampingan	Pada awal pengaduan disampaikan tahapan-tahapan pendampingan
Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Sumber cadangan pangan belum bisa dipenuhi oleh produksi beras dalam wilayah Kota Yogyakarta, pengelolaan cadangan beras belum dikelola oleh BUMD Kot	Peningkatan Gerakan Konsumsi Pangan Lokal selain nasi tetapi juga umbi-umbian
	Perlunya satu sistem terpadu guna melakukan monitoring pengawasan mutu kualitas stok pasokan dan harga pangan	Meningkatkan pola kerjasama untuk keberlanjutan dan produktivitas pertanian perkotaan melalui intervensi teknologi serta menyusun link data lintas sektor terkait stock pangan sehingga masing-masing perangkat daerah dapat mendukung penguatan ketahanan pangan sesuai tugas pokok dan fungsinya

4.2.1.2. Sasaran dan Program Perangkat Daerah

Pada tahun 2022 diketahui bahwa 19 indikator sasaran perangkat daerah telah berhasil tercapai dengan proporsi 90% sementara 10% atau 2 indikator lainnya tidak tercapai. Proporsi Program Perangkat daerah menunjukkan dari 60 indikator, 59 indikator atau 98% telah tercapai $\geq 100\%$ akan tetapi masih terdapat 2% atau 1 indikator lainnya yang tidak tercapai.

Tabel 4. 13. Rekapitulasi Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 1 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022

Status Ketercapaian	2021		2022	
	Jumlah Indikator	Capaian 2021	Jumlah Indikator	Capaian 2022
Sasaran Perangkat Daerah				
Tercapai	20	95%	19	90%
Tidak Tercapai	1	5%	2	10%
Program Perangkat Daerah				
Tercapai	58	95%	59	98%
Tidak Tercapai	3	5%	1	2%

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, capaian sasaran perangkat daerah pada tahun 2022 mengalami penurunan dengan selisih proporsi 5%. Adapun pada level program, capaian pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan dengan selisih 3%.

Berikut rekapitulasi indikator sasaran dan program perangkat daerah yang tidak tercapai pada tahun 2022:

Tabel 4. 14. Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 1 yang Tidak Tercapai (<100%) Tahun 2022

Sasaran / Program PD	Indikator	2022			Status Ketercapaian
		Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Perangkat Daerah					
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	405	398,80	98,47%	Tidak Tercapai
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	398	388	97,49%	Tidak Tercapai
Program Perangkat Daerah					
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (Kemantren Tegalrejo)	Angka Swadaya Murni	1.918.155.806	1.774.711.000	92,52%	Tidak Tercapai

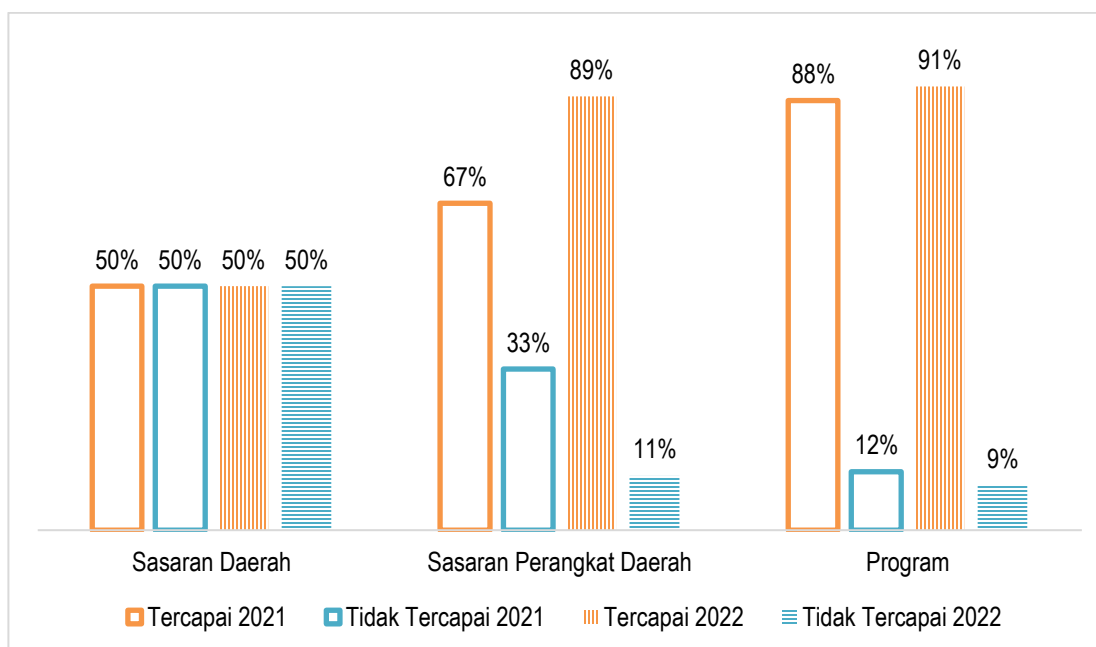
Adapun faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya sasaran dan program perangkat daerah pada Misi 1 adalah:

Tabel 4. 15. Faktor Penghambat Realisasi Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 1 pada Hasil RPJMD Tahun 2022

Sasaran / Program PD	Indikator	Faktor Penghambat
Sasaran PD		
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	menurunnya nilai pada aspek kewilayahan yang disebabkan terhentinya beberapa implementasi inovasi akibat pandemic sudah melandai / normal di kelurahan Terban
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	Ada kekeliruan mencatat target sasaran
Program		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (Kemantren Tegalrejo)	Angka Swadaya Murni	1. Belum semua masyarakat melaporkan nilai swadaya murni; 2. Untuk swadaya murni tidak semua kegiatan dapat dinilai dengan rupiah.

4.2.2. Misi 2: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Kota Yogyakarta

Ekonomi kerakyatan yang kuat dan dan saya saing kota menjadi salah satu misi pembangunan Kota Yogyakarta. Ekonomi kerakyatan efektif menunjang peningkatan ekonomi secara mikro maupun makro, dan diharapkan mampu meningkatkan daya saing kota maupun masyarakat perkotaan. Berdasarkan status ketercapaian, diketahui bahwa sasaran daerah memiliki proporsi 50% tercapai dan sasaran perangkat daerah memiliki proporsi 89% tercapai. Status ketercapaian program perangkat daerah menunjukkan bahwa 91% program telah tercapai meskipun masih terdapat 9% program yang belum tercapai. Secara umum, sasaran daerah, sasaran perangkat daerah dan program perangkat daerah pada misi 2 telah tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dominasi ketercapain pada masing-msing level.



Gambar 4. 11. Status Ketercapaian Sasaran Daerah, Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 2 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022

4.2.2.1. Sasaran Daerah

Untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat, ditunjang dengan dua (2) sasaran daerah yang mencakup ketimpangan pendapatan antar penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat dari status ketercapaian angka pertumbuhan ekonomi berhasil tercapai $\geq 100\%$. Realisasi sasaran daerah pada misi kedua secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 16. Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 2 Kota Yogyakarta

Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	2021		2022				
		Capaian	Status Ketercapaian	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Capaian	Status Ketercapaian
Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	91,08%	Tidak Tercapai	0,395	0,382 - 0,464	0,519	88,15%	Tidak Tercapai
Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	120,19%	Tercapai	5,23%	4,2% - 5,50%	5,12%	100,00%	Tercapai

Tabel di atas menunjukkan bahwa Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Kota Yogyakarta sebesar 0,519 pada tahun 2022, angka ini belum memenuhi target yang ditentukan dalam Renstra yakni 0,382 - 0,464. Adapun target indeks ketimpangan pendapatan dalam RPJMD sebesar 0,395 sehingga realisasi indeks ini belum memenuhi dari target RPJMD. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, indeks ketimpangan pendapatan (gini ratio) kota Yogyakarta mengalami penurunan pada tahun 2022. Capaian tahun 2021 berhasil tercapai sebesar 91,08% sementara capaian tahun 2022 menurun menjadi 88,15%. Adapun angka pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta berhasil terealisasi sebesar 5,12% pada tahun 2022. Angka ini berada dalam range target Renstra yang ditentukan sebesar 4,2% - 5,50%. Namun realisasi ini belum bisa

mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD yakni sebesar 5,23%. Meskipun angka covid19 telah menurun pada tahun 2022, dampak yang ditimbulkan dari pandemi covid19 sejak 2020-2021 sangat dirasakan oleh masyarakat Kota Yogyakarta sehingga angka pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang cukup signifikan. Seiring menurunnya angka pandemi covid19, Kota Yogyakarta telah berupaya meningkatkan roda perekonomian dengan program-program strategis yang telah disiapkan sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta telah berangsur pulih. Berikut faktor pendorong dan penghambat serta strategi untuk mengatasi hambatan yang ada.

Tabel 4. 17. Faktor Pendorong Keberhasilan Sasaran Daerah Misi 2 Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sasaran Daerah	Faktor Pendorong
Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja mulai dari fasilitas dan peningkatan kapasitas para pencari kerja, channeling calon pekerja dengan perusahaan, advokasi perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui pengesahan peraturan perusahaan, deteksi dini ketenagakerjaan untuk upaya pengawasan, konsultasi masalah ketenagakerjaan, hingga mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing perusahaan agar berkelanjutan
	Peningkatan kesejahteraan lapisan masyarakat yang bekerja pada lingkup UMKM dan koperasi mulai dari penumbuhan wirausaha dan koperasi baru/rintis, peningkatan kapasitas koperasi dan UKM, fasilitasi pameran dan pemasaran digital, peningkatan inklusi sosial ekonomi bagi penduduk rentan, Kolaborasi lintas sektor
Pertumbuhan ekonomi meningkat	<p>Sektor Pariwisata</p> <p>Monitoring evaluasi dilakukan terhadap 41 ODTW baik yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta maupun swasta serta kampung wisata. Penambahan variasi daya tarik pariwisata dilaksanakan melalui berbagai festival diantaranya festival Prawirotaman untuk memperkuat citra Kota Yogyakarta di pasar internasional, Festival Pasar Kembang dan Pagelaran seni Kewilayahan yang dikonsepsikan untuk memperkenalkan budaya Kota Yogyakarta serta event Jogja Creative yang diselenggarakan dengan car free day untuk memperkuat daya tarik Kota Yogyakarta. Pengembangan titik pariwisata di Kotabaru dengan fokus wisata belanja, kuliner dan sejarah menjadi bagian untuk menyajikan daya tarik baru selain di kawasan Malioboro.</p> <p>Promosi Pariwisata pada tahun 2022 dilakukan melalui berbagai media yaitu pelaksanaan Direct Promotion Table Top untuk mendorong kerjasama Business to Business, memperkuat jaringan kerjasama pariwisata melalui Java Promo, penguatan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta dan provider transportasi online, serta promosi melalui media baik digital maupun konvensional. Dari sisi kepastian daya tarik yang lebih terintegrasi dilakukan launching Calender of Event (CoE) yang mengintegrasikan rencana penyelenggaraan event yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, komunitas maupun masyarakat.</p>
	<p>Sektor Industri Pengolahan</p> <p>Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui sentra industri yang didukung dengan peningkatan kapasitas pelaku pada tahapan produksi, manajemen dan pemasaran menjadi fokus Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM (Dinas PKU). Disisi lain perluasan akses pendanaan bagi UMKM juga dilakukan Dinas PKU dengan bekerjasama dengan Bank BPD DIY dan Bank Jogja. Inovasi kerjasama dengan provider transportasi dan marketplace dalam pemasaran produk dan peningkatan literasi digital dilakukan untuk menjawab tantangan pergeseran pasar UMKM.</p>
	<p>Sektor Perdagangan</p> <p>Sektor perdagangan berfokus pada pengembangan pasar tradisional dan kemudahan distribusi barang kebutuhan. Standarisasi Pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat dilakukan untuk Pasar Prawirotaman yang mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152. Standarisasi tersebut menjadikan Pasar Prawirotaman dapat bersaing dengan Pusat perbelanjaan modern lain.</p>

Adapun faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah sasaran daerah pada misi 2 adalah:

Tabel 4. 18. Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran Daerah Misi 2 Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sasaran Daerah	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Sebagian pelaku UKM belum melek digital, manajemen usaha dan produksi juga masih menjadi kendala	Bekerjasama dengan marketplace untuk digital marketing
	Masih ada beberapa UKM yang dalam pengelolaan usahanya belum menerapkan standar yang ada	Berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai legalitas lembaga dan melakukan bimbingan terkait legalitas
	Pengelolaan usaha masih secara konvensional	Melaksanakan Bimtek Produktivitas 5S (Seiri/Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/ Resik, Seiketsu/Rawat, Shitsuke/Rajin)
Pertumbuhan ekonomi meningkat	Adanya kesenjangan kualitas layanan masing-masing ODTW, terdapat ODTW yang telah memiliki kualitas layanan yang baik, sementara ODTW lain memiliki kualitas layanan yang masih harus ditingkatkan	Melakukan peningkatan kualitas pengelolaan ODTW melalui workshop pengembangan ekosistem pariwisata dan peningkatan komunikasi dengan industri dan pelaku pariwisata serta pemangku kebijakan
	Permasalahan pengembangan sarana prasarana pendukung kampung wisata	Dalam pengembangan suatu ODTW, pembangunan signage (papan penanda dan penunjuk arah) dapat mengoptimalkan penggunaan tiang rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada. Merancang desain pitsop secara modular sehingga dapat menyesuaikan dengan keluasan lahan yang tersedia dengan terlebih dahulu melakukan kajian untuk FS (Feasibility Study) dan DED (Detail Engineering Detail)
	Belum kuatnya branding Kota Yogyakarta secara internasional	Memperkuat citra budaya Kota Yogyakarta sebagai daya tarik utama pariwisata melalui pelestarian pranata seni, budaya, dan sosial Daerah, menjaga fisik, visualisasi arsitektur dan non arsitektur pada kawasan cagar budaya yang bertujuan menjaga keseimbangan keestetarian budaya dan kemanfaatan sosial ekonomi masyarakat
	Masih kurangnya daya tarik pariwisata pada malam hari	Mengkonsepkan penambahan event-event pada malam hari yang ditindaklanjuti dengan pembuatan paket wisata full day yang akan berdampak pada peningkatan LoS (Length of Stay)

4.2.2.2. Sasaran dan Program Perangkat Daerah

Apabila dilihat berdasarkan status ketercapaiannya diketahui bahwa indikator sasaran perangkat daerah berhasil tercapai sebesar 89% atau 8 indikator dari total 9 indikator. Adapun program perangkat daerah, dari 33 indikator berhasil tercapai 91% atau 30 indikator program.

Tabel 4. 19. Rekapitulasi Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 2 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022

Status Ketercapaian	2021		2022	
	Jumlah Indikator	Capaian 2021	Jumlah Indikator	Capaian 2022
Sasaran Perangkat Daerah				
Tercapai	6	67%	8	89%
Tidak Tercapai	3	33%	1	11%
Program Perangkat Daerah				
Tercapai	30	88%	30	91%
Tidak Tercapai	4	12%	3	9%

Proporsi capaian tahun 2022 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021 dengan capaian 67% indikator sasaran perangkat daerah dan 88% indikator program perangkat daerah. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan capaian sasaran dan program perangkat daerah dari tahun sebelumnya. Adapun indikator sasaran dan program perangkat daerah yang tidak tercapai pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4. 20. Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 2 yang Tidak Tercapai (<100%) pada Hasil RPJMD Tahun 2022

Sasaran / Program PD	Indikator	2021			Status Ketercapaian
		Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Perangkat Daerah					
Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Nilai omset koperasi tahun n	406.366.988.994	336.557.181.503	82,82%	Tidak Tercapai
Program Perangkat Daerah					
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda terasah	92,76%	75,86%	81,78%	Tidak Tercapai
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	565	490	86,73%	Tidak Tercapai
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah sistem informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	100,00%	94,12%	94,12%	Tidak Tercapai

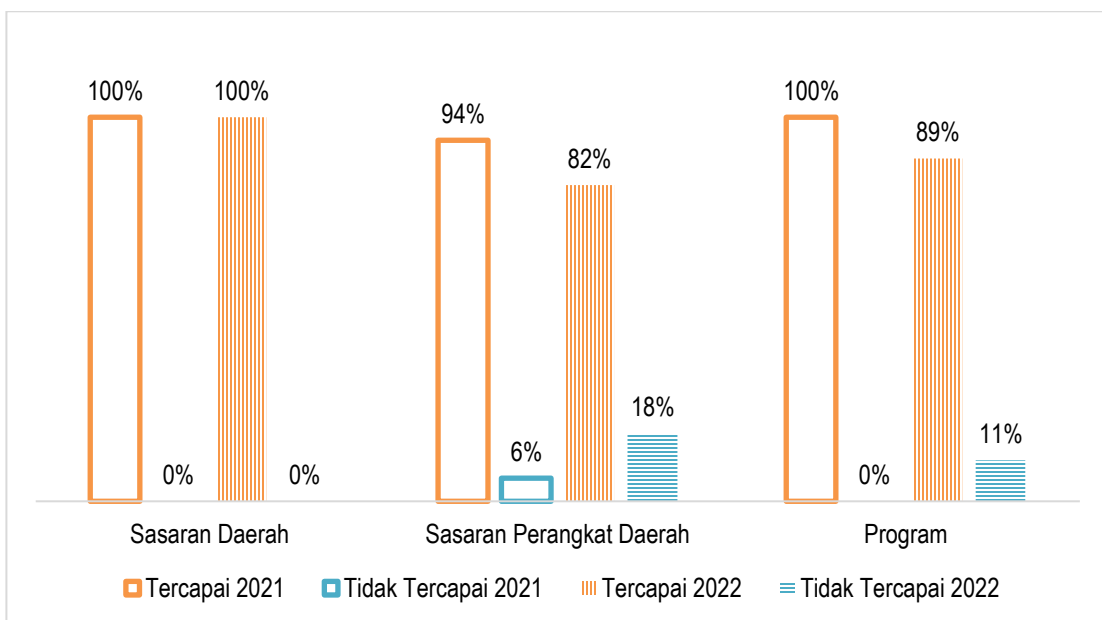
Adapun faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya sasaran dan program perangkat daerah pada Misi 2 adalah:

Tabel 4. 21. Faktor Penghambat Realisasi Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 2 pada Hasil RPJMD Tahun 2022

Sasaran / Program PD	Indikator	Faktor Penghambat
Sasaran PD		
Kesejahteraan Anggota Koperasi Meningkat	Nilai omset koperasi tahun n	Jumlah koperasi (364) berkurang sehingga jumlah omset menjadi berkurang (pergeseran Badan Hukum ke Provinsi dan Nasional 27 koperasi)
Program		
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	Penurunan pelayanan tera karena adanya penurunan jumlah produksi timbangan yang wajib ditera awal sebelum dipasarkan secara luas oleh perusahaan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	Peserta dalam mengikuti pelatihan belum maksimal (pengurus koperasi hanya sebagai sampingan bukan prioritas utama)
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah sistem informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	-Menunggu proses koordinasi dengan instansi terkait dikarenakan sistem yang belum terintegrasi menunggu tindak lanjut dari pembagian kewenangan antara provinsi dan Pemkot -Mulai tahun 2023 sesuai rekomendasi KPK untuk pengembangan sistem informasi anggaran dipindahkan ke Kominfo tetapi pelaksanaannya tetap DPMPSTSP, menunggu koordinasi lebih lanjut terkait tugas dan kewenangan

4.2.3. Misi 3: Memperkuat Moral, Etika, dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta

Moral, etika, dan budaya masyarakat menjadi salah satu hal yang penting bagi Kota Yogyakarta sebagai kota budaya dan pendidikan. Oleh karenanya, hal tersebut menjadi salah satu misi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2017-2022. Secara umum dapat diketahui bahwa capaian sasaran daerah dan program perangkat daerah Kota Yogyakarta pada misi ketiga telah dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Tahun 2022, sasaran daerah berhasil tercapai dengan proporsi 100%, sasaran perangkat daerah berhasil tercapai dengan proporsi 82%. Adapun capaian program perangkat daerah dapat tercapai dengan proporsi 89%.



Gambar 4. 12. Status Ketercapaian Sasaran Daerah, Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 3 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, kinerja misi ketiga mengalami penurunan baik pada level sasaran perangkat daerah dan program perangkat daerah. Capaian sasaran daerah tahun 2022 berhasil dipertahankan dengan capaian sasaran daerah tahun 2021. Pada level sasaran perangkat daerah, proporsi capaian perangkat daerah dapat tercapai sebesar 94% sedangkan tahun 2022 menurun menjadi 82%. Adapun pada level program perangkat daerah, tahun 2021 proporsi capaian berhasil tercapai 100% sedangkan tahun 2022 berhasil tercapai dengan proporsi 89%.

4.2.3.1. Sasaran Daerah

Untuk merealisasikan misi memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta, ditunjang oleh sasaran daerah dengan indikator angka kriminalitas dan jumlah pelanggaran perda. Diketahui indikator angka kriminalitas pada tahun 2022 terealisasi sebesar 574. Realisasi ini telah memenuhi target renstra yang telah ditetapkan sebesar 600. Dengan demikian, angka kriminalitas tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 1.500. Dibandingkan dengan tahun 2021, capaian angka kriminalitas mengalami penurunan kinerja. Tahun 2022 proporsi angka kriminalitas sebesar 104,33% lebih kecil dibandingkan tahun 2021 sebesar 111%.

Adapun angka pelanggaran perda tahun 2022 berhasil terealisasi sebesar 3.815. Angka ini berhasil tercapai diatas target renstra sebesar 4.200 dan target RPJMD sebesar 5.000.

Adanya partisipasi dari warga sebagai fungsi kontrol kriminalitas, pelanggaran perda dan kesiapsiagaan pihak terkait membuat tingkat pelaksanaan menjadi optimal. Realisasi capaian sasaran daerah misi ketiga Kota Yogyakarta Tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 secara lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 22. Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 3 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022

Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	2021		2022				
		Capaian	Status Ketercapaian	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Capaian	Status Ketercapaian
Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Angka Kriminalitas	111,00%	Tercapai	1500	600	574	104,33%	Tercapai
	Angka pelanggaran Perda	101,48%	Tercapai	5000	4200	3815	109,17%	Tercapai

Apabila melihat pencapaian sasaran pada misi 3, indikator angka kriminalitas dan angka pelanggaran perda telah memenuhi target renstra yang ditetapkan pada tahun 2022. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh tren dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Berikut faktor pendorong dan penghambat serta strategi untuk mengatasi hambatan yang ada.

Tabel 4. 23. Faktor Pendorong Keberhasilan Sasaran Daerah Misi 3 Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sasaran Daerah	Faktor Pendorong
Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	<p>Strategi Penegakan Perda secara Represif Yustisi</p> <p>Represif salah satu sifat dalam sistem pengendalian sosial. Tindakan represif biasanya berbentuk tekanan, kekangan, atau penindasan. Sedangkan pengendalian sosial sendiri adalah suatu proses atau kontrol terhadap kemungkinan penyimpangan sosial.</p> <p>Represif ini adalah tindakan yang kerap diambil untuk menindak pelanggaran. Dengan tindakan represif, penyimpangan akan terkontrol dan berkurang. Upaya represif ini dilakukan dengan cara Penegakan Perda dan Perwal Kota Yogyakarta secara yustisi dan non yustisi</p>
	<p>Strategi Penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya secara Represif Non yustisi</p> <p>Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan suatu hal negatif agar hal buruk tersebut tidak terjadi. Dalam perspektif pengendalian sosial, preventif adalah tindakan untuk mencegah pelanggaran sosial. Tindakan preventif sangat penting karena bisa menghindarkan kita dari akibat buruk yang fatal. Upaya ini dilakukan dengan cara deteksi dan cegah dini, pengamanan, dan monitoring tertutup kegiatan masyarakat yang berpotensi konflik horizontal maupun vertikal serta indikasi terjadinya pelanggaran peraturan.</p>
	<p>Strategi penegakan perda secara preemtif melalui Gerakan Panca Tertib</p> <p>Upaya preemtif yaitu berupa ajakan kepada masyarakat untuk berperan serta aktif dalam penegakkan Perda. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.</p>

Adapun faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah sasaran daerah pada misi 3 adalah:

Tabel 4. 24. Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran Daerah Misi 3 Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sasaran Daerah	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Adanya pemasangan reklame yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) No.2/2015 yaitu non yustisi sebanyak 2.168 dan yustisi sebanyak 123	secara non-yustisi petugas melakukan penindakan dengan peringatan, pembongkaran atau henti fungsi; Untuk yustisi melalui persidangan karena tidak berizin

4.2.3.2. Sasaran dan Program Perangkat Daerah

Apabila dilihat berdasarkan status ketercapaiannya diketahui bahwa 82% atau 14 indikator sasaran perangkat daerah telah berhasil tercapai $\geq 100\%$. Adapun 18% indikator lainnya berada pada status tidak tercapai. Pada level program perangkat daerah, 89% atau 25 indikator berhasil tercapai $\geq 100\%$.

Tabel 4. 25. Rekapitulasi Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 3 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022

Status Ketercapaian	2021		2022	
	Jumlah Indikator	Capaian 2021	Jumlah Indikator	Capaian 2022
Sasaran Perangkat Daerah				
Tercapai	16	94%	14	82%
Tidak Tercapai	1	6%	3	18%

Status Ketercapaian	2021		2022	
	Jumlah Indikator	Capaian 2021	Jumlah Indikator	Capaian 2022
Program Perangkat Daerah				
Tercapai	28	100%	25	89%
Tidak Tercapai	0	0%	3	11%

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, capaian sasaran perangkat daerah dan program perangkat daerah mengalami penurunan tahun 2022. Tahun 2021 capaian sasaran perangkat daerah berhasil tercapai dengan proporsi 94% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 82%. Adapun program perangkat daerah, tahun 2021 berhasil tercapai 100% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 89%.

Berikut rekapitulasi indikator sasaran dan program perangkat daerah yang tidak tercapai pada tahun 2022:

Tabel 4. 26. Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 3 yang Tidak Tercapai (<100%) pada Hasil RPJMD Tahun 2022

Sasaran / Program PD	Indikator	2022			Status Ketercapaian
		Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran PD					
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	405	398,80	98,47%	Tidak Tercapai
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	398	388	97,49%	Tidak Tercapai
Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	99,00	91,96	92,89%	Tidak Tercapai
Program					
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Kemantren Kotagede)	Jumlah Pelanggaran Perda	24	25	95,83%	Tidak Tercapai
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	100%	97%	97,09%	Tidak Tercapai
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	95,00%	78,05%	82,16%	Tidak Tercapai

Adapun faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya sasaran dan program perangkat daerah pada Misi 3 adalah:

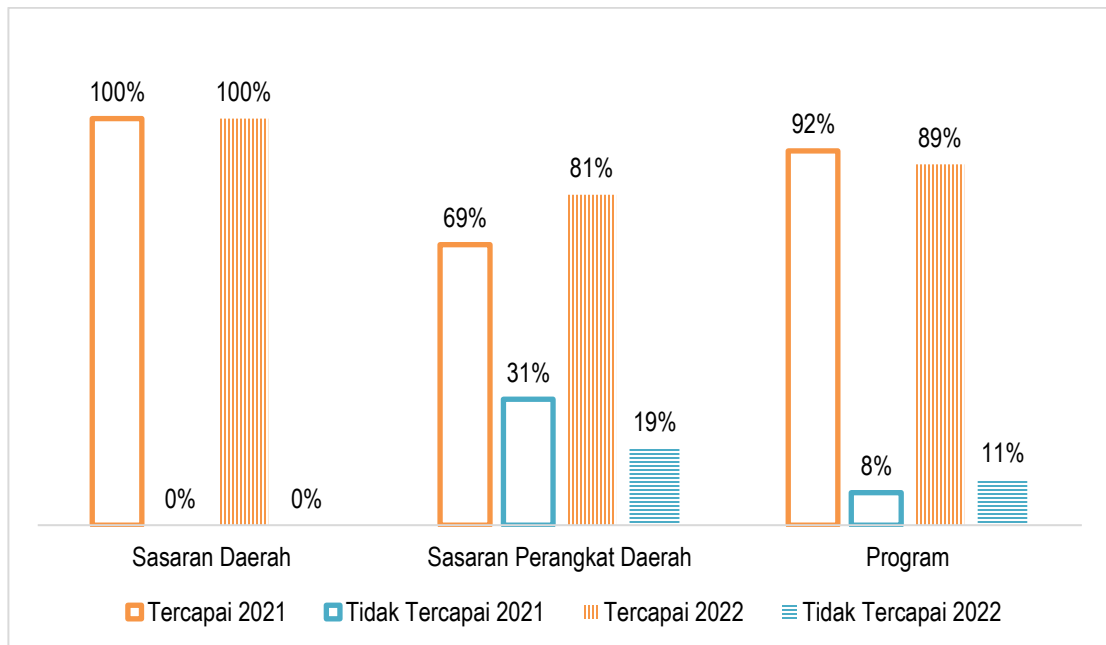
Tabel 4. 27. Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 3 yang Tidak Tercapai (<100%) pada Hasil RPJMD Tahun 2022

Sasaran / Program PD	Indikator	Faktor Penghambat
Sasaran PD		
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman	menurunnya nilai pada aspek kewilayahan yang disebabkan terhentinya beberapa implementasi inovasi akibat pandemic sudah melandai / normal di kelurahan Terban
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo meningkat	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo	Ada kekeliruan mencatat target sasaran
Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat	Indeks kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga	peningkatan efektifitas kepramukaan, kwarcab, lembaga organisasi kepemudaan masih ada beberapa yang sudah mulai berkurang
Program		
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Kemantren Kotagede)	Jumlah Pelanggaran Perda	1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan. 2) Keterbatasan personil untuk operasi ketertiban yang di jawatan keamanan.
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas SDM terkadang terhambat jadwal pelaksanaan kegiatan reguler pegawai
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	-

4.2.4. Misi 4: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya

Pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Suatu kota idealnya dapat menyediakan fasilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik untuk warganya, sesuai dengan jumlah dan kebutuhan masyarakat. Tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, sedangkan sosial dan budaya merupakan salah satu peradaban masyarakat yang sangat unik dan penting untuk dijaga kelestariannya, terlebih untuk Kota Yogyakarta sebagai kota budaya di Indonesia.

Apabila dilihat berdasarkan status ketercapaiannya, diketahui bahwa semua indikator sasaran daerah telah tercapai $\geq 100\%$. Sasaran Perangkat Daerah berhasil tercapai dengan proporsi 81%. Adapun program perangkat daerah berhasil tercapai dengan proporsi 89% tercapai.



Gambar 4. 13. Status Ketercapaian Sasaran Daerah, Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 4 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, capaian sasaran daerah konsisten tercapai dengan proporsi 100%. Adapun sasaran perangkat daerah mengalami peningkatan tahun 2022 menjadi 81%. Sementara pada level program, proporsi ketercapaian indikator program mengalami penurunan dari tahun 2021 menjadi 89%.

4.2.4.1. Sasaran Daerah

Untuk memperkuat kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya Kota Yogyakarta, ditunjang dengan tiga (3) sasaran daerah yang mencakup kualitas pendidikan, angka harapan hidup masyarakat, serta peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya.

Tabel 4.28. menunjukkan bahwa pada tahun 2022, angka rata-rata lama sekolah Kota Yogyakarta sebesar 11,89 tahun melebihi target renstra yang ditentukan sebesar 11,72 tahun. Angka ini juga telah melebihi target RPJMD sebesar 11,45 tahun. Adapun angka harapan lama sekolah berhasil terealisasi 17,61 tahun.

Realisasi ini telah memenuhi target renstra sebesar 17,61 tahun dan target RPJMD 17,33 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata setiap masyarakat Kota Yogyakarta bersekolah selama 17,61 tahun. Adapun angka harapan hidup telah terealisasi sebesar 74,83 tahun melebihi target renstra yang ditentukan sebesar 74,76 tahun dan target RPJMD sebesar 74,4 tahun. Adapun Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif telah terealisasi melebihi target renstra dan RPJMD yaitu 80,65% dari target renstra dan RPJMD sebesar 72%.

Tabel 4. 28. Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 4 Kota Yogyakarta

Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	2021		2022				
		Capaian	Status Ketercapaian	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Capaian	Status Ketercapaian
Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata lama sekolah	102,27%	Tercapai	11,45 th	11,72 th	11,89th	101,45%	Tercapai

Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	2021		2022				
		Capaian	Status Ketercapaian	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Capaian	Status Ketercapaian
meningkat	Angka harapan lama sekolah	100,98%	Tercapai	17,33 th	17,6th	17,61th	100,06%	Tercapai
Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	100,15%	Tercapai	74,4th	74,76 th	74,83th	100,09%	Tercapai
Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	105,72%	Tercapai	72%	72%	80,65%	112,01%	Tercapai

Apabila melihat pencapaian sasaran pada misi 4, seluruh indikator sasaran telah tercapai bahkan tercapai $\geq 100\%$. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, indikator persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif merupakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2021 capaian indikator ini berhasil tercapai sebesar 105,72% sementara tahun 2022 berhasil tercapai sebesar 112,01%. Berikut faktor pendorong dan penghambat serta strategi untuk mengatasi hambatan yang ada.

Tabel 4. 29. Faktor Pendorong Keberhasilan Sasaran Daerah Misi 4 Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sasaran Daerah	Faktor Pendorong
Kualitas Pendidikan meningkat	Terpeliharanya dan terpenuhinya kebutuhan bangunan, gedung, dan sarana prasarana pendidikan, baik dengan optimalisasi Dana Alokasi Khusus/DAK yang berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik) maupun yang bersumber dari APBD untuk semua jenjang PAUD, SD, dan SMP
	Kelembagaan dan sarpras pendidikan masyarakat dan PAUD Penjaminan kualitas mutu layanan pendidikan di lakukan melalui pendampingan akreditasi Lembaga PAUD
	Adanya bimtek perencanaan berbasis data dengan pemanfaatan platform rapat pendidikan untuk guru dan kepala sekolah, pelatihan tingkat dasar penanganan pencegahan stunting dilakukan untuk guru dan uji kompetensi pendidik PAUD
	Pembinaan PKBM secara rutin melalui pendamping Jam Belajar Masyarakat/ JBM, petugas JBM diberikan ketugasan lain untuk mendata anak putus sekolah/anak usia sekolah yang tidak bersekolah
Harapan hidup masyarakat meningkat	Jumlah fasilitas kesehatan untuk pertolongan persalinan yang memadai, PSC Yes 119 yang dapat diakses masyarakat untuk penanganan kegawatan maternal neonatal
	Pendampingan pemantauan pertumbuhan oleh petugas daerah binaan. Sarana dan prasarana yang memadai (alat antropometri yang sesuai standar). Pelaksanaan mobile posyandu dan posyandu konvensional dengan kedatangan balita terjadwal (sesuai dgn kondisi kasus covid di wilayah). Validasi data dan tindak lanjut oleh petugas, edukasi online, peran dari tokoh masyarakat, PKK, pejabat wilayah setempat
	Dukungan kegiatan mobile xray dari ZeroTB Yogyakarta dalam penemuan aktif/ active case finding (ACF) dan skrining gejala TB baik di wilayah maupun populasi tertentu (sekolah, Ponpes)
	Adanya intervensi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) sehingga dapat menjangkau penderita hipertensi dan skrining PTM di Posbindu
	Adanya aplikasi yang terintegrasi di perijinan mempermudah pemohon untuk mengajukan sertifikat Surat Ijin Praktek (SIP) nakes, hotel dan restoran laik sehat

Sasaran Daerah	Faktor Pendorong
Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	<p>Klasifikasi Rintisan Kelurahan Budaya</p> <p>Kegiatan ini merupakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Rintisan Kelurahan Budaya di Kota Yogyakarta dengan tujuan untuk mengetahui taraf perkembangan RKB (maju, berkembang, tumbuh) serta mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya di wilayah</p>
	<p>Akreditasi Rintisan Kelurahan Budaya</p> <p>Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi budaya serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya di wilayah (kelurahan) yang belum ditetapkan menjadi Rintisan Kelurahan Budaya, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan RKB baru</p>
	<p>Gelar Budaya RKB</p>
	<p>Sekar Rinonce</p> <p>Sekar Rinonce Malioboro merupakan kegiatan pentas budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta pada hari Selasa dan Sabtu Malam yang dimulai pada tanggal 30 Agustus – 27 Desember 2022</p>
	<p>Gelar Budaya Jogja</p> <p>Salah satu Kegiatan Gelar Budaya Jogja merupakan kegiatan fasilitasi pengiriman misi kesenian (kontingen) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam ajang kompetisi kesenian antar Kabupaten/Kota se-DIY sejalan dengan program kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY</p>
	<p>Festival Jogja Kota</p> <p>Dalam rangka pelestarian, pembinaan dan pengembangan kebudayaan, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta akan menyelenggarakan FESTA (Festival Jogja Kota) Tahun 2022 yang diselenggarakan di Embung Giwangan Kota Yogyakarta. FESTA Tahun 2022 menampilkan seni pertunjukan beserta potensi wilayah kolaborasi masyarakat antar Kemantren se Kota Yogyakarta yang terklasterisasi dalam Kawasan Cagar Budaya (KCB)</p>
	<p>Rumaket</p> <p>Rumaket merupakan wadah/ruang masyarakat pelestari Warisan Budaya Takbenda yang ada di Kota Yogyakarta khususnya untuk saling bertemu, saling bersosialisasi, saling bertukar pikiran dan berkolaborasi dalam rangka mengembangkan dan melestarikan Warisan Budaya Takbenda</p>
	<p>Festival Sastra</p> <p>Festival Sastra Yogyakarta tahun 2022 dengan mengusung tema mulih/pulang/kembali merupakan ruang temu bagi sastrawan Kota Yogyakarta, serta menjalin keragaman sastra, baik sastra Jawa, Indonesia, yang tumbuh dan besar di Kota Yogyakarta, dalam satu wadah yang mampu menampung berbagai bentuk dan media sastra serta lingkungan pendukungnya</p>
	<p>Sosialisasi WBCB</p> <p>Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan peraturan terkait pembangunan baru di Kawasan Cagar Budaya dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat Kota Yogyakarta tentang prosedur dan pedoman membangun bangunan baru di kawasan Cagar Budaya dengan tujuan melestarikan arsitektur kawasan guna memperkuat karakter atau citra kawasan sesuai kawasan cagar budayanya sehingga dapat mempertahankan citra keistimewaan Yogyakarta</p>

Adapun faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah sasaran daerah pada misi 4 adalah:

Tabel 4. 30. Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran Daerah Misi 4 Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sasaran Daerah	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Kualitas pendidikan meningkat	Sistem Informasi Pendidikan (SIDIDIK) masih memiliki kendala yaitu belum bisa memilah siswa	Penambahan fitur sinkronisasi data antara server sididik dengan aliran data dari pusdatin untuk memilah data dilakukan sebagai exit strategi sekaligus inovasi

Sasaran Daerah	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
	penduduk kota dan siswa penduduk luar kota yang bersekolah di Kota Yogyakarta dan upload data masih manual oleh operator sididik di sekolah	yang perlu dikembangkan
	Adanya kecenderungan guru dalam memberikan layanan pembelajaran secara klasikal cenderung dengan cara yang sama untuk semua siswa tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan peserta didik secara akademis, psikologis maupun gaya belajarnya. Hal ini membuat suasana pembelajaran monoton dan membosankan bagi peserta didik sehingga hasilnya kurang efektif.	Strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala yang ada antara lain dengan melakukan kerja sama dengan BBGP, BPMP, dan instansi lain untuk memberikan workshop dan pelatihan tentang literasi dan numerasi, melakukan asesmen diasnotik supaya guru bisa menerapkan metode pembelajaran yang berdiferensiasi yang memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan akademis maupun gaya belajar siswa sehingga pembelajaran menjadi hidup dan menyenangkan
Harapan hidup masyarakat meningkat	Sosial Determinan yang mempengaruhi Kematian ibu dan bayi di Kota Yogyakarta diantaranya status pernikahan, beberapa kasus kematian ibu maupun bayi mempunyai latar belakang pernikahan yang tidak sah, hamil diluar nikah, hamil tidak dikehendaki yang tentunya hal ini sangat mempengaruhi dalam perawatan kehamilan	Pemanfaatan dana BOK untuk mendekatkan akses layanan kesehatan Ibu Anak melalui kegiatan kunjungan rumah, kelas ibu hamil dan kelas ibu balita di wilayah, bekerjasama dengan PKK dan Kader dalam pendampingan ibu hamil, peningkatan pemanfaatan buku KIA untuk pemantauan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Peningkatan kualitas ANC dengan Skrining / pemeriksaan oleh dokter di TM I dan TM III dengan dilakukan USG Obstetri terbatas oleh dokter umum di puskesmas
	Penerima informasi kesehatan merupakan masyarakat dengan berbagai tingkatan usia, pendidikan, pekerjaan dan kepercayaan	Informasi kesehatan dikemas dalam bentuk yang beranekaragam dengan bahasa yang menarik. Seperti infografis yang dimuat dalam media sosial (<i>instagram / Whatsapp</i>) atau video iklan layanan masyarakat (<i>youtube</i>). Siaran interaktif melalui radio dan televisi. Juga sosialisasi dengan mobil keliling yang dapat didengar langsung oleh seluruh masyarakat di wilayah mobil keliling beroperasi
	Belum terselenggaranya survei efektivitas media promosi kesehatan yang diberikan kepada masyarakat	Bekerja sama dengan akademisi untuk melakukan survey efektivitas media promosi kesehatan yang telah diberikan kepada masyarakat.
Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Adanya Pandemi Covid-19 yang meningkat kasusnya pada pertengahan tahun sehingga kegiatan sosial budaya tidak dapat terlaksana sesuai dengan tatakala sehingga kegiatan yang bersifat pengumpulan massa dibatalkan dan perubahan konsep kegiatan	Kegiatan yang bersifat pentas, festival dilaksanakan secara daring dan <i>luring (hybrid)</i> serta dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dengan melihat perkembangan situasi perkembangan covid 19 serta mengoptimalkan pemanfaatan social media, sebaga sarana promosi kegiatan event budaya dan juga sebagai media pertunjukan secara Daring, dengan pengemasan yang lebih inovatif.

4.2.4.2. Sasaran dan Program Perangkat Daerah

Berdasarkan status ketercapaiannya diketahui bahwa tidak semua indikator sasaran perangkat daerah memiliki realisasi $\geq 100\%$. Dari total 16 indikator sasaran perangkat daerah, sebanyak 13 indikator atau 81% memiliki capaian $\geq 100\%$ sedangkan 3 indikator sasaran perangkat daerah lain tidak tercapai. Adapun program perangkat daerah memiliki proporsi 89% atau 55 indikator tercapai dan 11% atau 7 indikator tidak tercapai.

Tabel 4. 31. Rekapitulasi Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah

Status Ketercapaian	2021		2022	
	Jumlah Indikator	Capaian 2021	Jumlah Indikator	Capaian 2022
Sasaran Perangkat Daerah				
Tercapai	11	69%	13	81%
Tidak Tercapai	5	31%	3	19%
Program Perangkat Daerah				
Tercapai	56	92%	55	89%
Tidak Tercapai	5	8%	7	11%

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, sasaran perangkat daerah tahun 2022 memiliki proporsi yang lebih baik yakni 81% sedangkan tahun 2021 sebesar 69%. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyak indikator yang tercapai yakni sebesar 13 indikator sementara tahun 2021 terdapat 11 indikator yang tercapai. Adapun level program, tahun 2022 mengalami penurunan capaian dari tahun 2021 dengan selisih 3%. Tahun 2022 proporsi capaian program sebesar 89% sementara tahun 2021 proporsi capaian mencapai 92%. Jumlah indikator program yang tercapai tahun 2022 sebanyak 55 indikator, Adapun tahun 2021 jumlah indikator program dapat tercapai sebanyak 56 indikator.

Berikut rekapitulasi indikator sasaran dan program perangkat daerah yang tidak tercapai pada tahun 2022:

Tabel 4. 32. Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 4 yang Tidak Tercapai (<100%) pada Hasil RPJMD Tahun 2022

Sasaran / Program PD	Indikator	2022			Status Ketercapaian
		Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran PD					
Aksesibilitas pendidikan meningkat	Angka partisipasi kasar SMP	123% - 142%	121,56%	98,83%	Tidak Tercapai
Derajat Kesehatan Meningkat	Angka Kematian Bayi	6,88	10,8	43,02%	Tidak Tercapai
	Cakupan Keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat	52,00%	41,60%	80,00%	Tidak Tercapai
Program					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	88%	88,03%	Tidak Tercapai
	Persentase penduduk yang mempunyai JKN	101%	100%	98,98%	Tidak Tercapai
	Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	87%	87,13%	Tidak Tercapai

Sasaran / Program PD	Indikator	2022			Status Ketercapaian
		Target	Realisasi	Capaian	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SMP akreditasi A	77,59%	77,19%	99,49%	Tidak Tercapai
	Jumlah prestasi siswa SMP Tingkat Nasional	6 medali	5 medali	83,33%	Tidak Tercapai
	Jumlah LKP terakreditasi	14	13	92,86%	Tidak Tercapai
	Persentase guru sesuai kualifikasi	95-99,75%	93,68%	98,61%	Tidak Tercapai

Adapun faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya sasaran dan program perangkat daerah pada Misi 4 adalah:

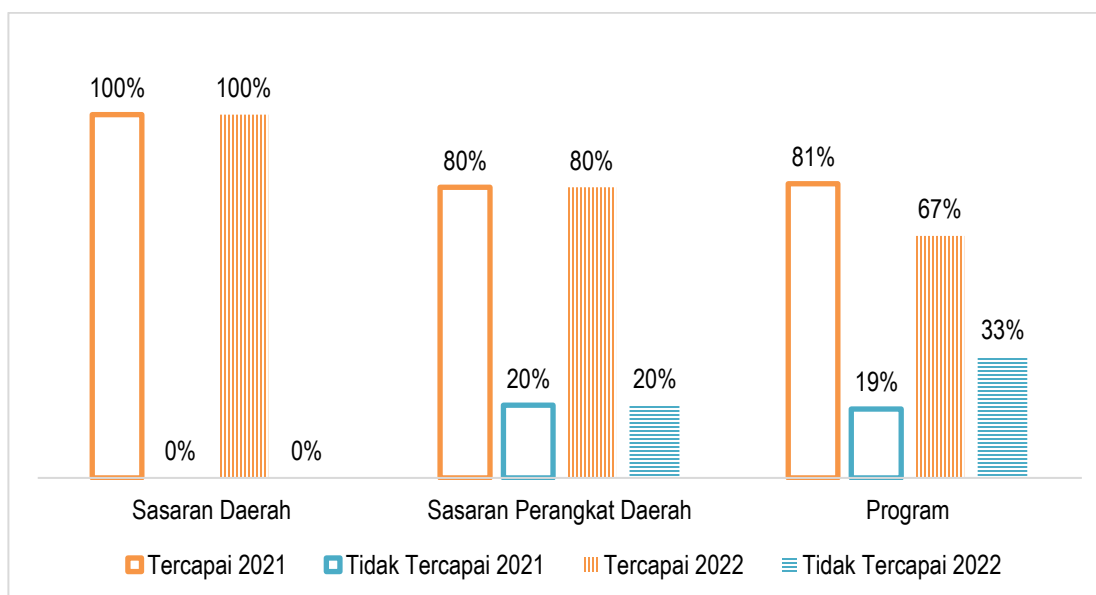
Tabel 4. 33. Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 4 yang Tidak Tercapai (<100%) pada Hasil RPJMD Tahun 2022

Sasaran / Program PD	Indikator	Faktor Penghambat
Sasaran PD		
Aksesibilitas pendidikan meningkat	Angka partisipasi kasar SMP	jumlah siswa usia sekolah (13-15 tahun) di Kota Yogyakarta juga mengalami penurunan, alasannya sama dengan di tingkat usia 7-12 tahun, dimana siswa usia sekolah dari luar kota yang bersekolah di Kota Yogyakarta tidak sebanyak tahun lalu. Dan untuk jumlah penduduk usia sekolah (13-15 tahun) di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu, namun secara angka, jumlah siswa usia sekolah dengan penduduk usia sekolah masih lebih banyak jumlah siswa usia sekolah. masih banyak penduduk usia sekolah tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK.
Derajat Kesehatan Meningkat	Angka Kematian Bayi	70 % terjadi pada 1 bulan pertama kehidupan dan 60 % nya terjadi pada 1 minggu pertama kehidupan, Penyebab utama kematian neonatal di Kota Yogyakarta adalah komplikasi pada bayi dengan berat lahir rendah / BBLR dan prematuritas sebesar 63 %, kelainan kongenital sebesar 15, 7% dan asfiksia sebesar 15%
	Cakupan Keluarga dengan Indikator Keluarga Sehat	masih ada penderita hipertensi yang belum melakukan pengobatan rutin serta orang dengan gangguan jiwa yang tidak diobati sehingga capaian indikator tersebut masih di bawah 50% dan mempengaruhi hasil IKS
Program		
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	a. Balita tidak datang ke posyandu karena sakit atau tidak ada yang mengantar atau sekolah (dititipkan di tempat penitipan anak); b. Orang tua balita yang tidak hadir di posyandu yang melakukan pengukuran mandiri di rumah namun tidak melaporkan hasil pengukurannya ke kader; c. Pemantauan pertumbuhan mandiri di rumah belum bisa dilakukan oleh semua ibu balita yang belum bisa hadir di posyandu karena tidak memiliki timbangan dan alat ukur PB/TB, d. Pelaksanaan SDIDTK belum sesuai tatakala; e. Balita pindah domisili; f. Sweeping belum berjalan 100%; saat pelaksanaan sweeping balita tidak dapat ditemui.
	Persentase penduduk yang mempunyai JKN	1. Penetapan Keluarga miskin yang mendapatkan JKN berdasarkan ketetapan Kementerian Sosial yang tidak bisa diupdate sesuai bulan berjalan dan

Sasaran / Program PD	Indikator	Faktor Penghambat
		<p>Segmen pekerja ada yg belum didaftarkan oleh pemberi Kerja</p> <p>2. Proses verifikasi dan validasi data kependudukan secara manual oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, sambil menunggu hasil verifikasi dan validasi data dari Dirjen Dukcapil Kemendagri</p>
	Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	<p>1. belum optimalnya dukungan dan koordinasi lintas sektor di wilayah, karena anggapan bahwa masalah kesehatan adalah kegiatan sektor kesehatan</p> <p>2. kurangnya partisipasi masyarakat, karena masyarakat merasa sehat sehingga enggan melakukan deteksi dini</p> <p>3. belum optimalnya koordinasi lintas program, karena banyaknya kegiatan di bidang kesehatan yang memerlukan sumber daya manusia sehingga perlu kolaborasi dengan beberapa program terkait.</p> <p>4. Upaya deteksi dini secara massal terkendala karena Pandemi Covid 19 belum sepenuhnya berakhir, sehingga perlu melihat zonasi untuk keamanan pelaksanaan kegiatan.</p> <p>5. Belum optimalnya kerja sama dengan fasilitas kesehatan di wilayah</p> <p>6. Belum optimalnya kerja sama dengan pengelola tempat- tempat kerja di wilayah</p>
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SMP akreditasi A	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sarpras diluar kebutuhan SPM untuk sekolah swasta, penunjang IKM (Impelentasi Kurikulum Merdeka) ditingkatkan antara lain Fasilitas belajar antara lain laboratorium praktikum seperti Laboratorium IPA dan Laboratorium Informatika, tempat ibadah, Fasilitas olahraga, seni dan budaya. - Terdapat sekolah yang belum terakreditasi (2 sekolah merger yang terakreditasi B). - Terdapat kuota akreditasi dari provinsi.
	Jumlah prestasi siswa SMP Tingkat Nasional	Pelaksanaan kegiatan masih online dan ada bbrp lomba di pusat tidak diselenggarakan mba. Terdapat 1 olimpiade (OPSI) yang tidak mendapatkan medali.
	Jumlah LKP terakreditasi	Akhir tahun 2021 dan mulai tahun 2022 LKP sudah tidak ada lagi akreditasi dari BAN PAUD dan PNF
	Persentase guru sesuai kualifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - masih ada beberapa guru yang enggan melanjutkan pendidikan dan penyesuaian kualifikasi, dari realisasi fisik kurang dari target, namun dari jumlah guru dan guru sesuai kualifikasi lebih dari tahun sebelumnya - jumlah guru mengalami penambahan, dikarenakan baru adanya update data guru dari sekolah di tahun 2022

4.2.5. Misi 5: Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan

Tata kota dan kelestarian lingkungan menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari wajah perkotaan. Tata kota yang baik dan layak serta lingkungan yang lestari dan berkelanjutan yang dapat memberikan wadah yang nyaman bagi masyarakatnya, dapat menjadi tolok ukur majunya suatu daerah. Untuk itulah memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan menjadi salah satu misi pembangunan Kota Yogyakarta. Secara umum, capaian realisasi sasaran daerah pada tahun 2022 telah tercapai $\geq 100\%$. Sementara itu, sasaran dan program perangkat daerah telah tercapai dengan proporsi 80% dan 67%.



Gambar 4. 14. Status Ketercapaian Sasaran Daerah, Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 5 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022

4.2.5.1. Sasaran Daerah

Untuk memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan hidup, dua sasaran daerah yang mendukung yakni terkait kualitas penyelenggaraan dan penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup. Dilihat berdasarkan status ketercapaiannya, maka dapat dikatakan bahwa seluruh indikator tersebut telah tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa dua sasaran daerah tersebut telah terlaksana dengan sangat baik. Adapun realisasi capaian sasaran daerah misi kelima Kota Yogyakarta pada tahun 2022 secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 34. Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 5 Kota Yogyakarta

Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	2021		2022				
		Capaian	Status Ketercapaian	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Capaian	Status Ketercapaian
Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	100,30%	Tercapai	82,50%	79,84 - 82,5%	82,53%	100,04%	Tercapai
Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	101,29%	Tercapai	51,64	55,65	60,89	109,42%	Tercapai

Tabel di atas menunjukkan adanya kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2022 yang terealisasi sebesar 82,53%, nilai ini lebih tinggi dari range target renstra yang telah ditentukan yakni 79,84% – 82,50% dan target RPJMD sebesar 82,50%. Indeks kualitas lingkungan hidup Kota Yogyakarta pada tahun 2022 mencapai 60,89, nilai ini lebih besar dari target renstra yang ditentukan sebesar 55,65% dan target RPJMD sebesar 51,64.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, indikator persentase pemanfaatan ruang meningkat mengalami penurunan sebesar 0,26%. Tahun 2021 capaian indikator ini berhasil mencapai 100,30% sementara tahun 2022 berhasil tercapai dengan capaian 100,04%. Adapun

indikator indeks kualitas lingkungan hidup berhasil mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan selisih sebesar 8,12%.

Apabila melihat pencapaian sasaran pada misi 5 pada tahun 2022, seluruh indikator sasaran daerah telah tercapai bahkan tercapai $\geq 100\%$. Berikut faktor pendorong dan penghambat serta strategi untuk mengatasi hambatan yang ada.

Tabel 4. 35. Faktor Pendorong Keberhasilan Sasaran Daerah Misi 5 Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sasaran Daerah	Faktor Pendorong
Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Diterbitkannya Peraturan Daerah No. 2 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencabut Peraturan Daerah No. 2 tahun 2010 dan Perwal No. 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041
	Penyempurnaan Sistem Informasi Tata Ruang (SITARU) yaitu sistem aplikasi mengenai zonasi, pola ruang, dan struktur ruang yang bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui handphone berbasis android dan komputer sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui aturan tata ruang di suatu lokasi
	Penetapan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Reklame sebagai tindak lanjut ditemukannya sejumlah indikasi pelanggaran terhadap peraturan sebelumnya
	Tersusunnya Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang sesuai peraturan terbaru, yaitu Perwal No. 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 yang memengaruhi capaian persentase hasil kesesuaian pemanfaatan ruang
	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan penataan ruang yang mengacu pada Perwal No. 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041
	Adanya Forum Penataan Ruang Daerah yang terkait dengan kebijakan lintas OPD
Kualitas lingkungan hidup meningkat	Bekerja sama dengan Laboratorium pengujian kualitas air dan tenaga ahli dalam menganalisa hasil pengujian sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kota Yogyakarta
	Pemantauan kualitas air dilakukan dari 4 sungai yang ada di wilayah Kota Yogyakarta, yaitu sungai Code, Winongo, Gajah Wong dan Manunggal. Lokasi pemantauan di Sungai Winongo terdiri atas 5 titik pantau, yaitu di Pondok Bener, Jembatan Peta, Jembatan Serangan, Jembatan Tamansari, dan Jembatan Prapanca. Lokasi pemantauan di Sungai Code dilakukan di 5 titik pantau, yaitu Jembatan Petinggen, Jembatan Gondolayu, Jembatan Sayidan, Jembatan Tungkak, dan Perumahan Wirosaban. Lokasi pemantauan kualitas air di Sungai Manunggal terdiri atas 4 titik pantau, yaitu di Jembatan Iromejan, Jembatan Mangkukusuman, Jembatan Kusumanegara, dan Jembatan Menteri Supeno. Lokasi pemantauan di Sungai Gajahwong terdiri dari 5 lokasi pantau, yaitu di sebelah SMA Santo Thomas, Jembatan Balirejo, Jembatan Gembiraloka, Kampung Logatok, dan Jembatan Tegal Gendu
	Adanya alat pemantau kualitas udara secara real time (AQMS), sehingga memudahkan pemantauan kualitas udara secara real time
	Dapat dibangun RTH pada area permukiman meskipun dengan kondisi lahan yang terbatas
	RTHP di Kota Yogyakarta masih harus ditingkatkan lagi luasan dan kualitasnya
	RTHP memiliki banyak manfaat untuk kepentingan kegiatan kemasyarakatan

Adapun faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah sasaran daerah pada misi 5 adalah:

Tabel 4. 36. Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran Daerah Misi 5 Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sasaran Daerah	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Sosialisasi yang dilaksanakan masih belum begitu efektif, sehingga diperlukan adanya inovasi cara mensosialisasikan peraturan-peraturan terbaru	Pelaksanaan sosialisasi peraturan dan kebijakan tata ruang Kota Yogyakarta yang dilakukan dengan diseminasi dan juga dilakukan secara interaktif dengan lomba dan festival. Sasaran sosialisasi ini adalah Perangkat Daerah dan masyarakat umum
	Masih terdapat titik yang belum dapat disimulasikan pada Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang	Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang dengan menggunakan aplikasi gatramatra.jogjakota.go.id. Gapura Aksesibilitas Terintegrasi Pemanfaatan (Gatra Matra Jogja) ini merupakan media informasi yang utuh dan mudah diakses oleh masyarakat terkait ketentuan tata ruang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041. Gatra Matra ini merupakan layanan dengan berbasis persil yang di dalamnya memuat fitur Pelayanan Informasi Kesesuaian Tata Ruang (IKTR)
	Diperlukan review target yang akan dicapai dalam 5 tahunan disesuaikan dengan aturan terbaru dalam Evaluasi Pemanfaatan Ruang	Evaluasi Pemanfaatan Ruang (pengkajian kesesuaian eksisting dengan peraturannya) dilakukan dengan cara menambah jumlah titik pengamatan yang diawasi dan disesuaikan dengan aturan baru yang berlaku.
	Belum ada penentuan target dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang	Selain itu, dilakukan pula pergantian titik pengawasan setiap tahunnya yang disesuaikan dengan peraturan terbaru, untuk selanjutnya dilakukan overlay dengan peta hasil pengamatan tahun sebelumnya
	Belum adanya Tematik untuk pelaksanaan audit tata ruang	Pada masa transisi pasca penetapan Perda Reklame Nomor tahun 2022, dibutuhkan petunjuk pelaksanaannya. Sebanyak 152 titik reklame yang terindikasi melakukan pelanggaran merupakan reklame yang tidak berizin. Reklame yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terkait lokasinya berada di trotoar dan rumija, sehingga tidak memiliki sertifikat untuk pengajuan izinnya. Penegakan indikasi pelanggaran reklame tidak harus dilakukan dengan surat penugasan pembongkaran dari walikota karena terdapat pelimpahan kewenangan dari walikota kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Belum adanya Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Peraturan terbaru	
Kualitas lingkungan hidup meningkat	Masih terjadi pembuangan sampah dan limbah ke sungai, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai	Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktifitas yang menambah beban pencemaran air sungai.
	Berkurangnya jumlah parameter dan titik sampling kualitas air tanah yang dapat diuji sendiri	Titik sampling kedepan akan terus diperbanyak agar data yang didapatkan semakin mewakili kondisi riil kualitas air tanah di kota Yogyakarta
	Keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kota Yogyakarta, penanaman pohon merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan	Membangun RTHP baru dan menambah kerapatan tanaman perindang yang ada di Kota Yogyakarta sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara perkotaan
	Berkurangnya jumlah parameter pengujian kualitas udara yang dapat diuji sendiri sehingga tidak	Analisa hasil dapat lebih mewakili kondisi riil kualitas udara di kota Yogyakarta

Sasaran Daerah	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
	dilaksanakan pengujian udara ambien roadside dan permukiman	

4.2.5.2. Sasaran dan Program Perangkat Daerah

Berdasarkan status ketercapaiannya diketahui bahwa tidak semua indikator memiliki realisasi $\geq 100\%$. Dari total 5 indikator sasaran perangkat daerah, masih ada 1 (satu) indikator yang memiliki realisasi $< 100\%$. Demikian halnya dengan program perangkat daerah, dari 15 indikator program, masih terdapat 5 (lima) indikator program atau 33% yang memiliki realisasi $< 100\%$.

Tabel 4. 37. Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 5 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022

Status Ketercapaian	2021		2022	
	Jumlah Indikator	Capaian 2021	Jumlah Indikator	Capaian 2022
Sasaran Perangkat Daerah				
Tercapai	4	80%	4	80%
Tidak Tercapai	1	20%	1	20%
Program Perangkat Daerah				
Tercapai	13	81%	10	67%
Tidak Tercapai	3	19%	5	33%

Berikut rekapitulasi indikator sasaran dan program perangkat daerah yang tidak tercapai pada tahun 2022:

Tabel 4. 38. Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 5 yang Belum Tercapai ($< 100\%$) pada Hasil RPJMD Tahun 2022

Sasaran / Program PD	Indikator	2022			Status Ketercapaian
		Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Perangkat Daerah					
Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali.	Indeks Kualitas Air	51,20	38,54	75,27%	Tidak Tercapai
Program					
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan	100%	99,22%	99,22%	Tidak Tercapai
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	80,61%	76,18%	94,50%	Tidak Tercapai
	Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian	15,28%	14,37%	94,04%	Tidak Tercapai

Sasaran / Program PD	Indikator	2022			Status Ketercapaian
		Target	Realisasi	Capaian	
	dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Kampung berwawasan lingkungan	100,00%	56,21%	56,21%	Tidak Tercapai
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	43,22%	30,40%	70,34%	Tidak Tercapai

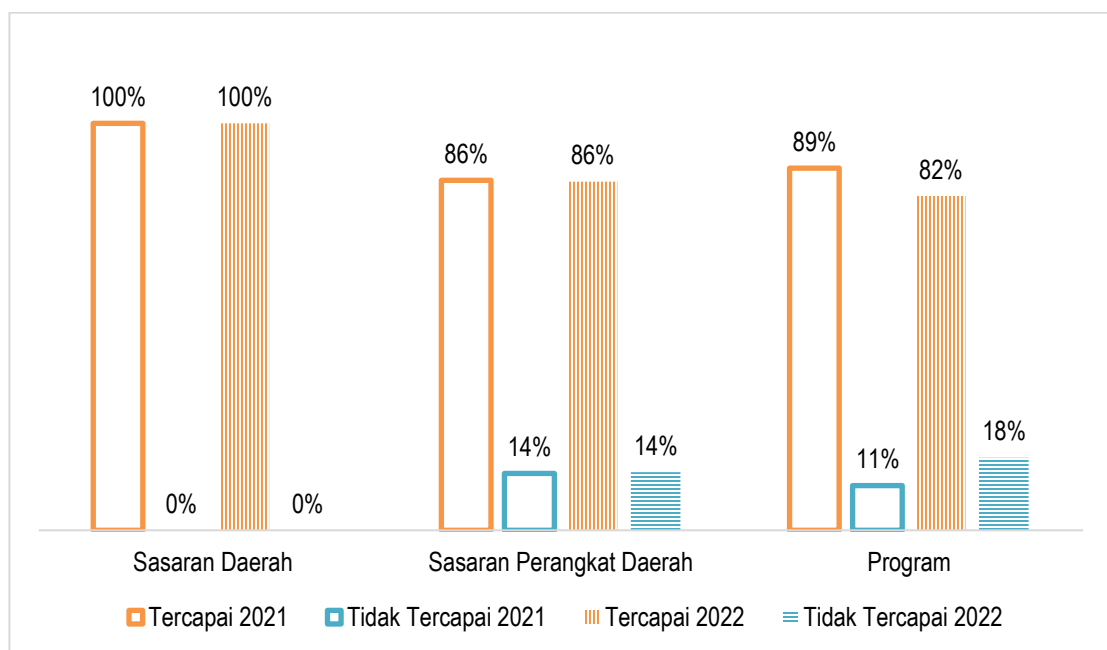
Adapun faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya sasaran dan program perangkat daerah pada Misi 5 adalah:

Tabel 4. 39. Faktor Penghambat Realisasi Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 5 pada Hasil RPJMD Tahun 2022

Sasaran / Program PD	Indikator	Faktor Penghambat
Sasaran Perangkat Daerah		
Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali	Indeks Kualitas Air	Sebagian besar masyarakat masih membuang limbah ke sungai, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta
Program Perangkat Daerah		
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan	1. Keterbatasan kemampuan anggaran Pemkot Yogyakarta menjadi kendala dalam upaya pemenuhan kebutuhan tanah untuk kepentingan umum 2. Harga penawaran di atas harga appraisal (gagal pengadaan tanah untuk pengembangan RSUD Kota Yogyakarta)
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Sebagian proses dokumen lingkungan belum dapat diterbitkan persetujuannya karena proses revisi dari pemohon belum selesai (1) banyak pelaku usaha/ kegiatan yang belum mengetahui syarat dan peraturan yang baru. - untuk saat ini pelaku usaha masih keberatan untuk membuat TPS LB3 terkait biaya, (2) kesulitan dalam pemilihan lokasi untuk membangun TPS LB3
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Kampung berwawasan lingkungan	Masih adanya dampak pandemi Covid yang menyebabkan keterbatasan masyarakat untuk melakukan kegiatan
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	Ketersediaan dana pembangunan RTHP baru ada pada TW IV (RTHP Keparakan, RTHP Warungboto, dan RTHP Rejowinangun)

4.2.6. Misi 6: Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman

Sarana dan prasarana publik dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Suatu daerah hendaknya memiliki sarana dan prasarana publik yang layak dan dapat menyediakan hunian/permukiman bagi masyarakatnya. Sarana dan prasarana minimum suatu daerah pula telah diatur oleh aturan-aturan tertentu, guna menciptakan kondisi yang ideal bagi masyarakat. Untuk itulah membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman menjadi salah satu misi pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Secara umum, berdasarkan status ketercapaiannya, diketahui bahwa 100% sasaran daerah memiliki tingkat realisasi $\geq 100\%$ atau seluruh sasaran daerah pada misi enam telah tercapai. Adapun pencapaian sasaran perangkat daerah memiliki proporsi ketercapaian 86% dan capaian program memiliki proporsi 82% tercapai.



Gambar 4. 15. Status Ketercapaian Sasaran Daerah, Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 6 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, sasaran daerah dan sasaran perangkat daerah memiliki proporsi yang sama yaitu sasaran daerah 100% dan sasaran perangkat daerah 86%. Adapun pada level program, proporsi capaian tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan selisih sebesar 7%. Tahun 2022 proporsi ketercapaian program mencapai 82% sementara tahun 2021 proporsi ketercapaian program berhasil tercapai sebesar 89%.

4.2.6.1. Sasaran Daerah

Misi membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman di Kota Yogyakarta didukung oleh satu sasaran daerah, yakni infrastruktur wilayah meningkat, dengan indikator sasaran indeks infrastruktur wilayah yang didalamnya menyangkut permukiman, sanitasi, drainase, listrik, air bersih, dan lainnya. Indeks infrastruktur wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 45,28 dalam renstra dan 44,41 dalam RPJMD. Adapun realisasi

sasaran daerah pada misi ini telah tercapai melebihi target yang ditentukan yakni 46,49 dengan capaian 102,67 jika dibandingkan dengan target renstra. Besarnya tingkat capaian tersebut menunjukkan sasaran daerah pada misi keenam telah tercapai. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang sangat baik untuk mewujudkan infrastruktur yang lebih baik dari tahun ke tahun. Adapun capaian realisasi sasaran daerah misi keenam Kota Yogyakarta tahun 2022 secara lebih detail dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 40. Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 6 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022

Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	2021		Target RPJMD	2022			
		Capaian	Status Ketercapaian		Target Renstra	Realisasi	Capaian	Status Ketercapaian
Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	103,38%	Tercapai	44,41	45,28	46,49	102,67%	Tercapai

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, capaian tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,71%. Tahun 2021 capaian indeks infrastruktur wilayah berhasil tercapai sebesar 103,38% sementara tahun 2022 tercapai dengan proporsi 102,67%. Akan tetapi angka realisasi indeks infrastruktur wilayah dari tahun ke tahun menunjukkan tren meningkat. Hal tersebut menunjukkan tingginya perhatian pemerintah kota Yogyakarta terhadap peningkatan infrastruktur di wilayah kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di Kota Yogyakarta secara berkelanjutan.

Apabila melihat pencapaian sasaran pada misi 6 pada tahun 2022, indikator sasaran daerah telah tercapai bahkan tercapai $\geq 100\%$. Berikut faktor pendorong dan penghambat serta strategi untuk mengatasi hambatan yang ada.

Tabel 4. 41. Faktor Pendorong Keberhasilan Sasaran Daerah Misi 6 Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sasaran Daerah	Faktor Pendorong
Infrastruktur wilayah meningkat	Perencanaan kegiatan fisik yang sudah sesuai dan tepat waktu
	Partisipasi masyarakat yang baik dalam penataan lingkungan permukiman kumuh cukup tinggi yang dipacu dengan adanya keberhasilan program serupa di wilayah lain
	Adanya sinkronisasi penanganan dengan beberapa sumber dana yang berbeda dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh serta rumah tidak layak huni
	Kolaborasi yang baik antar stakeholder dalam pembangunan infrastruktur maupun kegiatan lain dalam pencapaian sasaran ini, baik di tingkat masyarakat, kota, DIY maupun pusat, seperti kolaborasi penanganan kumuh serta adanya patrol dan operasi gabungan serta koordinasi di bidang transportasi, kebakaran dan penyelamatan serta kebencanaan
	Adanya kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah, misal kelompok pengelola sampah yang tersebar di 45 kelurahan yang cukup berperan dalam rangka pengurangan sampah, keterlibatan dalam Kampung Tangguh Bencana maupun Redkar
	Kompetensi Sumber Daya Manusia yang baik dalam pelaksanaan tugasnya, serta mampu memberikan solusi dan inovasi
	peningkatan kompetensi, pembinaan, pendampingan bagi stakeholder atau anggota masyarakat yang terlibat seperti juru parkir, pengurus bank sampah, anggota Redkar, dan relawan KTB
	Kemampuan SDM dalam berkomunikasi dengan warga untuk memperlancar pembangunan dan pelaksanaan kegiatan

Sasaran Daerah	Faktor Pendorong
	Pengembangan sarana yang ada misalnya pengelolaan sampah di TPS3R Nitikan yang diberi nama Laron Sarungan (Laboratorium Pengolahan Sampah Rumah Tangga Perkotaan)
	Sarana dan prasarana yang cukup baik dan mampu dipergunakan secara optimal walaupun belum sesuai perhitungan ideal dan tidak semuanya dalam performa maksimal, seperti kelengkapan pengujian kendaraan bermotor yang lengkap dan terkalibrasi, sarana pengangkutan sampah dan pemadaman kebakaran
	peningkatan manajemen dan penggunaan aplikasi untuk mengoptimalkan kegiatan dan layanan, seperti pada pelayanan uji kendaraan bermotor dengan aplikasi Siregol dan mengingatkan kepada wajib uji tanggal jatuh tempo pengujian melalui surat pemberitahuan dan WhatsApp serta melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas baik pengaturan arus ataupun manajemen parkir
	peningkatan kegiatan dalam perparkiran, melalui perijinan Andalalin sebagai persyaratan memperoleh izin Penyelenggaraan Bangunan Gedung, mengharuskan setiap bangunan usaha untuk memiliki ketersediaan ruang parkir yang cukup serta mendorong penyelenggaraan parkir swasta untuk menyediakan lahan parkir karena Kota Yogyakarta kekurangan lahan parkir
	Kemudahan layanan dan kejelasan tindak lanjut pelayanan, misalnya dalam pengujian kendaraan serta rekomendasi proteksi kebakaran
	Pelayanan yang cepat dalam merespon masyarakat, baik aduan maupun kejadian bencana

Adapun faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah sasaran daerah pada misi 6 adalah:

Tabel 4. 42. Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran Daerah Misi 6 Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sasaran Daerah	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Infrastruktur wilayah meningkat	Rehabilitasi terhadap RTLH yang terhambat karena beberapa hal seperti kepemilikan lahan, tanah ngindung dan tidak diperbolehkan untuk direhab oleh pemilik tanah serta kerusakan dan luas rumah yang bervariasi dan keterbatasan dana swadaya masyarakat sedangkan nilai bantuan terbatas, selain itu masih adanya masyarakat di lingkungan kumuh yang belum siap untuk ditata, serta adanya keterbatasan lahan untuk penataan Kawasan maupun kecukupan ruang untuk RTLH	<ul style="list-style-type: none"> - Memprioritaskan rehab rumah dengan alas hak legal; - Rehab rumah tidak layak huni hanya komponen utama misal struktur, dinding tanpa plester dan aci, lantai tanpa keramik, serta galvalum untuk menekan biaya; - Menyiapkan rumah susun untuk relokasi warga yang rumahnya terdampak seluruhnya
	Kondisi topografi yang membutuhkan penanganan khusus baik untuk kebutuhan jaringan pembuangan limbah dan drainase maupun menjadi tantangan untuk kebutuhan akses alat berat dalam kegiatan pembangunan talud	Pembangunan SAH baru yang terhubung dengan jaringan yang lebih rendah dari area genangan; Pemutusan saluran limbah atau penyambungan ke SAL eksisting
	Perilaku masyarakat yang belum melaksanakan pengelolaan sampah dengan maksimal seperti 3R, pilah sampah dan kurang tertib dalam pembuangan sampah, khususnya untuk pengunjung dari luar kota	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan optimalisasi pemilahan sampah dengan menggunakan mesin conveyor - Melakukan pencacahan daun/ranting sebelum bahan dikomposkan agar mempercepat proses pengomposan. - Membuat kandang maggot dengan dua tipe, yaitu dengan menggunakan bak yang terbuat dari semen dan bak plastik yang ditempatkan pada ruangan tertutup - Pengadaan mesin cacah pilah sampah

Sasaran Daerah	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
		untuk menghasilkan bubur organik untuk pakan maggot
	Ketergantungan atas kondisi TPA Piyungan sebagai tempat pembuangan akhir, sehingga sering menimbulkan timbunan di TPS/Depo saat TPA ditutup. 10) Keterbatasan ruang parkir off street, serta parkir illegal terutama saat ada liburan	Melakukan pengadaan armada compactor untuk mengoptimalkan pengangkutan sampah
	Masih ditemukan banyak pelanggaran lalu lintas	secara rutin melakukan patroli di setiap ruas jalan kota yogyakarta dan melaksanakan operasi gabungan dengan instansi terkait

4.2.6.2. Sasaran dan Program Perangkat Daerah

Berdasarkan status ketercapaiannya, capaian sasaran perangkat daerah menunjukkan 86% atau 6 indikator berhasil tercapai $\geq 100\%$. Sementara 14% atau 1 indikator sasaran perangkat daerah lainnya tidak tercapai $\geq 100\%$. Adapun capaian program menunjukkan 82% atau 23 indikator program berhasil tercapai $\geq 100\%$. Sedangkan 11% atau 5 indikator program lainnya tidak tercapai $\geq 100\%$ pada tahun 2022.

Tabel 4. 43. Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 6 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022

Status Ketercapaian	2021		2022	
	Jumlah Indikator	Capaian 2021	Jumlah Indikator	Capaian 2022
Sasaran Perangkat Daerah				
Tercapai	6	86%	6	86%
Tidak Tercapai	1	14%	1	14%
Program Perangkat Daerah				
Tercapai	25	89%	23	82%
Tidak Tercapai	3	11%	5	18%

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, capaian sasaran daerah memiliki capaian yang sama yaitu 86%. Adapun pada level program, capaian tahun 2022 cenderung menurun dari tahun 2021 dengan selisih 7%. Capaian tahun 2021 berhasil mencapai 89% sementara tahun 2022 tercapai dengan proporsi 82%.

Berikut rekapitulasi indikator sasaran dan program perangkat daerah yang tidak tercapai pada tahun 2022:

Tabel 4. 44. Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 6 yang Belum Tercapai (<100%) pada Hasil RPJMD Tahun 2022

Sasaran / Program PD	Indikator	2022			Status Ketercapaian
		Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Perangkat Daerah					
Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase pengangkutan sampah.	99,47%	97,41%	97,93%	Tidak Tercapai
Program					

Sasaran / Program PD	Indikator	2022			Status Ketercapaian
		Target	Realisasi	Capaian	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Angkutan Umum dan Barang yang laik jalan	91,50%	86,15%	94,15%	Tidak Tercapai
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	87,97-93,54	87,62%	99,60%	Tidak Tercapai
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	98,00%	97,25%	99,23%	Tidak Tercapai
Program Kawasan Permukiman	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	82,89%	81,14%	97,89%	Tidak Tercapai
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	26,00%	21,65%	83,27%	Tidak Tercapai

Adapun faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya program perangkat daerah pada Misi 6 adalah:

Tabel 4. 45. Faktor Penghambat Realisasi Program Perangkat Daerah Misi 6 pada Hasil RPJMD Tahun 2022

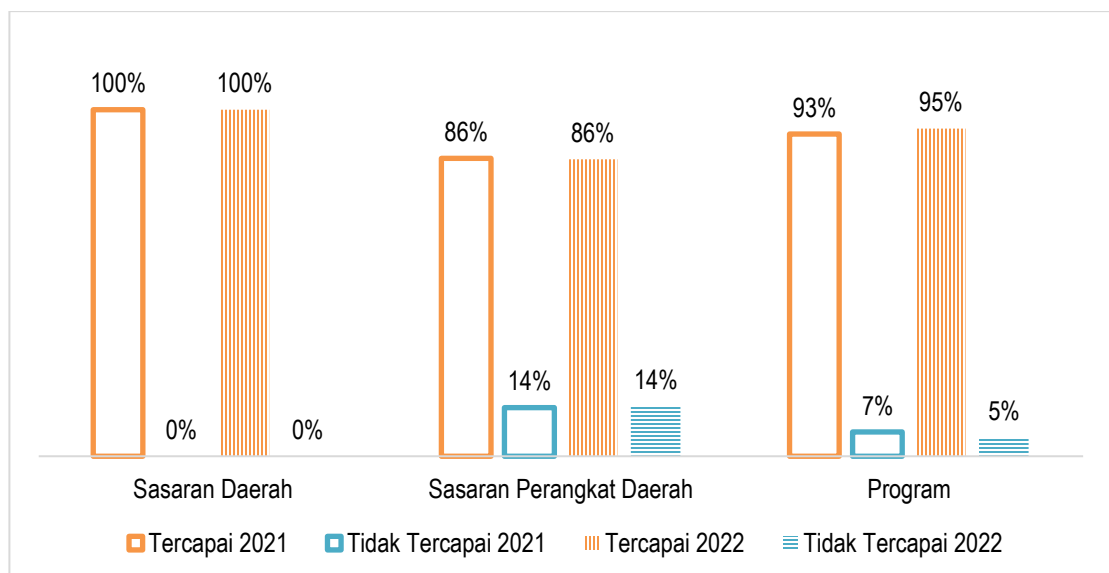
Program PD	Indikator	Faktor Penghambat
Sasaran Perangkat Daerah		
Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase pengangkutan sampah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya lahan di Kota Yogyakarta yang dapat digunakan sebagai tempat pengelolaan sampah 2. Belum terbentuknya budaya memilah sampah sejak dari sumbernya (secara masif & atas kesadaran sendiri) di masyarakat 3. munculnya limbah timbulan sampah baru diluar depo yang telah dijaga 4. masih kurang sadarnya masyarakat luar kota menjadi salah satu penyumbang peningkatan timbulan sampah di Kota Yogyakarta
Program		
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Angkutan Umum dan Barang yang laik jalan	Kondisi kendaraan yang kurang terpelihara membuat banyak yang tidak lulus uji dan banyak pemilik kendaraan yang tidak memperhatikan jatuh tempo kendaraannya untuk diuji ulang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	Permasalahan kondisi cuaca ekstrim berupa hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan pekerjaan menjadi sedikit terhambat dan tidak dapat dikerjakan (contoh pembangunan lantai saluran di Pringgokusuman). Solusi : sisa pekerjaan akan dilaksanakan di 2023 dengan anggaran insidental
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	Penanganan kumuh dilaksanakan sesuai kewenangan: daerah, DIY dan pusat sesuai dengan keluasan kumuh. Pada tahun 2022 penanganan permukiman kumuh hanya dilaksanakan dengan dana APBD Kota Yogyakarta sesuai kewenangan

Program PD	Indikator	Faktor Penghambat
Program Kawasan Permukiman	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	1. Penanganan kumuh dilaksanakan sesuai kewenangan: daerah, DIY dan pusat sesuai dengan keluasan kumuh. Pada tahun 2022 penanganan permukiman kumuh hanya dilaksanakan dengan dana APBD Kota Yogyakarta sesuai kewenangan. 2. Pada tahun 2021 masih ada Bantuan DAK Peningkatan Kualitas RTLH dan BSPS. Pada tahun 2022 DAK RTLH sudah tidak ada (saat ini DAK Integrasi dan Kota Yk kesulitan meraih terkendala lahan). BSPS tidak memenuhi syarat. Solusi penanganan: RTLH terbantu oleh Program DIY kolaborasi dengan pendanaan APBD Kota Yogyakarta.
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	1. belum terbentuknya budaya pemilahan sampah sejak dari sumber sampah 2. terbatasnya lahan di kota Yogyakarta yang dapat digunakan sebagai tempat pengelolaan sampah 3. terbatasnya kapasitas TPS3R Nitikan dibandingkan dengan peningkatan jumlah timbulan sampah

4.2.7. Misi 7: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) merupakan salah satu misi pembangunan Kota Yogyakarta, sebagai salah satu bentuk konsistensi pemerintah untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat Kota Yogyakarta baik dari pelayanan fisik maupun pemerintahan. Tata telola pemerintahan yang baik dan bersih salah satunya dapat diwujudkan dengan pemerintah yang baik dan bersih (*good government*). Untuk mewujudkan hal tersebut, ditunjang oleh sasaran daerah, sasaran perangkat daerah, dan program-program yang selaras.

Apabila dilihat berdasarkan status ketercapaiannya diketahui bahwa 100% sasaran daerah memiliki tingkat realisasi $\geq 100\%$ atau seluruh sasaran daerah pada misi tujuh telah tercapai. Adapun pencapaian sasaran perangkat berhasil tercapai dengan proporsi 86% dan program dengan proporsi 95%.



Gambar 4. 16. Status Ketercapaian Sasaran Daerah, Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 7 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022

4.2.7.1. Sasaran Daerah

Untuk mewujudkan misi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, sasaran daerah Kota Yogyakarta didukung oleh dua indikator, yakni nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini BPK terhadap laporan keuangan. Tahun 2022 nilai akuntabilitas kinerja pemerintah berhasil teralisasi dengan nilai A dari target renstra dan RPJMD dengan nilai A. Adapun indikator opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah berhasil tercapai dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari target renstra dan RPJMD dengan predikat WTP. Kedua realisasi indikator sasaran daerah masih mendasarkan nilai tahun 2021. Namun demikian Pemerintah Kota Yogyakarta selalu berupaya meningkatkan tata Kelola pemerintah agar nilai akuntabilitas dan opini PBK terhadap laporan keuangan mendapatkan hasil yang optimal. Adapun sasaran daerah misi ketujuh secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 46. Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 7 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022

Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	2021		2022				
		Capaian	Status Ketercapaian	Target RPJMD	Target Renstra	Realisasi	Capaian	Status Ketercapaian
Kapabilitas Tata kelola Pemerintahan Meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	100,00%	Tercapai	A	A	A	100,00%	Tercapai
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100,00%	Tercapai	WTP	WTP	WTP	100,00%	Tercapai

Apabila melihat pencapaian sasaran pada misi 7, seluruh indikator sasaran telah tercapai bahkan tercapai $\geq 100\%$. Namun masih perlu dilakukan pembenahan agar target tahun berikutnya sampai akhir tahun RPJMD dapat tercapai dengan baik. Berikut faktor pendorong dan penghambat serta strategi untuk mengatasi hambatan yang ada.

Tabel 4. 47. Faktor Pendorong Keberhasilan Sasaran Daerah Misi 7 Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sasaran Daerah	Faktor Pendorong
Kapabilitas Tata kelola Pemerintahan Meningkat	Komitmen Kepala Daerah dalam meningkatkan kualitas manajemen kinerja
	Komitmen seluruh elemen dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih
	Evaluasi kelembagaan secara berkala untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi mendukung kinerja kepala daerah
	Penyusunan peraturan perundangan yang update dan sesuai kebutuhan
	Semakin bertumbuhnya inovasi pada perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas layanan dan fokus dalam pencapaian kinerja
	Pemanfaatan e-government dalam kerangka besar Jogja Smart Services untuk mendukung pelayanan publik

Adapun faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah sasaran daerah pada misi 7 adalah:

Tabel 4. 48. Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran Daerah Misi 7 Kota Yogyakarta Tahun 2022

Sasaran Daerah	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Kapabilitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Belum membudayanya penyusunan anggaran berbasis kinerja, sehingga masih dijumpai kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap pencapaian <i>outcome</i>	Akan dilaksanakan dialog kinerja antara kepala perangkat daerah dengan kepala daerah agar seluruh perangkat daerah memahami dukungan masing-masing terhadap pencapaian IKU kepala daerah; <i>Cross cutting</i> program dan kegiatan sebagai implementasi proses bisnis dan pohon kinerja juga terus ditingkatkan agar tercipta kolaborasi yang harmonis antar perangkat daerah dalam mewujudkan kinerja pembangunan seperti yang tertuang dalam dokumen perencanaan
	Kurang sinergisnya pelaksanaan kegiatan antar perangkat daerah dalam mewujudkan target IKU kepala daerah	

4.2.7.2. Sasaran dan Program Perangkat Daerah

Apabila dilihat berdasarkan status ketercapaian diketahui bahwa tidak semua indikator sasaran perangkat daerah telah mencapai $\geq 100\%$, 14% atau 2 indikator sasaran perangkat daerah tidak memenuhi target tahun 2022. Adapun level program terdapat 7% atau 4 indikator yang tidak tercapai $\geq 100\%$.

Tabel 4. 49. Capaian Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 7 Kota Yogyakarta Tahun 2021 dan 2022

Status Ketercapaian	2021		2022	
	Jumlah Indikator	Capaian 2021	Jumlah Indikator	Capaian 2022
Sasaran Perangkat Daerah				
Tercapai	12	86%	12	86%
Tidak Tercapai	2	14%	2	14%
Program				
Tercapai	51	93%	52	95%
Tidak Tercapai	4	7%	3	5%

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, capaian indikator sasaran perangkat daerah memiliki proporsi yang sama dengan tahun 2022 yakni 86%. Adapun pada level program, capaian tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 2%. Tahun 2022 capaian indikator program berhasil mencapai 95% sementara tahun 2021 proporsi capaian indikator program tercapai 93%. Berikut rekapitulasi indikator sasaran dan program perangkat daerah yang tidak tercapai pada tahun 2022:

Tabel 4. 50. Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 7 yang Belum Tercapai (<100%) pada Hasil RPJMD Tahun 2022

Sasaran / Program PD	Indikator	2022			Status Ketercapaian
		Target	Realisasi	Capaian	
Sasaran Perangkat Daerah					
Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	95,40	93,34	97,84%	Tidak Tercapai
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkat	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern	3,40	2,89	85,00%	Tidak Tercapai
Program					

Sasaran / Program PD	Indikator	2022			Status Ketercapaian
		Target	Realisasi	Capaian	
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	88,00%	64,56%	73,36%	Tidak Tercapai
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan	100%	95%	94,69%	Tidak Tercapai
	Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPR dan kelompok pakar yang diselesaikan	100%	80%	80,00%	Tidak Tercapai

Adapun faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya sasaran dan program perangkat daerah pada Misi 7 adalah:

Tabel 4. 51. Faktor Penghambat Realisasi Sasaran dan Program Perangkat Daerah Misi 7 pada Hasil RPJMD Tahun 2022

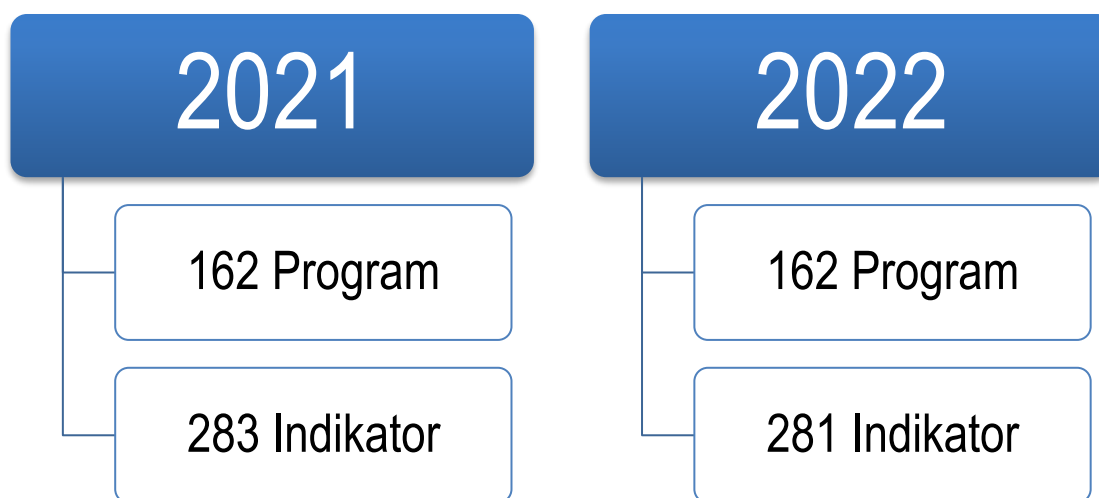
Sasaran / Program PD	Indikator	Faktor Penghambat
Sasaran Perangkat Daerah		
Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga masih terdapat kekeliruan dalam entri data SIRUP yang mengakibatkan adanya perubahan data pada RUP 2. Masih banyak OPD yang melakukan proses pelimpahan berkas pemilihan penyedia barang dan jasa ke BPBJ tidak sesuai dengan tatakala yang tercantum dalam perencanaan pada SIRUP 3. Apabila ada kesalahan dalam dokumen pemilihan tidak segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait sehingga membutuhkan perpanjangan waktu dalam proses pemilihan penyedia 4. Ada kegiatan yang memerlukan pekerjaan secara detail dan perlu sinkronisasi dengan peraturan yang baru sehingga membutuhkan waktu penyelesaian yang agak lama karena peraturan yang disusun perlu diharmonisasi oleh instansi vertikal (berkaitan dengan tahapan penyusunan RAPERWAL)
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkat	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan resiko belum secara maksimal terintegrasi dengan proses perencanaan pemerintah daerah. 2. Masih rendahnya kompetensi SDM dalam bidang pengelolaan resiko. 3. Tahun 2021 proses penialiannya berbeda dengan tahun 2020 dengan system New SPIP. 4. Seluruh OPD beradaptasi dan menyesuaikan dengan situasi yang baru. 5. Proses baseline penilaian ada 3 pokok unsur penilaian yang sebelumnya hanya ada 1 unsur penilaian

Sasaran / Program PD	Indikator	Faktor Penghambat
		6. Adanya dugaan kasus OTT yang melibatkan mantan Walikota Yogyakarta tahun 2017-2022, Kepala DPMPSTSP Kota Yogyakarta, dan Ajudan Walikota Yogyakarta
Program		
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	<p>1. Masih banyak OPD yang melakukan proses pelimpahan berkas pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai dengan tatakala yang tercantum dalam perencanaan SiRUP.</p> <p>2. Apabila ada kesalahan dalam dokumen pemilihan, tidak segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait sehingga membutuhkan perpanjangan waktu dalam proses pemilihan penyedia</p>
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan	Jadwal bimtek yang sering bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan
	Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan	Untuk membentuk kelompok pakar berdasarkan usulan dari masing-masing alat kelengkapan terkait kebutuhan fasilitasi kelompok pakar dalam memberikan advice saat rapat-rapat alat kelengkapan, setelah terpilih kelompok pakarnya kemudian ditindaklanjuti dengan SK Sekretaris DPRD, sudah di konsultasikan ke pimpinan, komisi-komisi, dan alat kelengkapan lainnya. Tetapi sampai dengan akhir tahun kelompok pakar belum terbentuk karena dalam rapat pembahasan di alat kelengkapan masih memprioritaskan agenda kegiatan DPRD yang lain

4.3. Analisis Realisasi RPJMD Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi hasil RPJMD. Berdasarkan peraturan tersebut, evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD. Penilaian digunakan untuk mengetahui realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD kabupaten/kota dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/kota dan realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah provinsi. Proses evaluasi terhadap hasil RPJMD setidaknya dapat dilaksanakan sekali dalam lima (5) tahun. Namun dalam rangka proses pengendalian, evaluasi hasil capaian RPJMD ini dapat dilaksanakan secara berkala sebagai fungsi kontrol pelaksanaan RPJMD. Hal tersebut juga menjadi salah satu dasar bagi Kota Yogyakarta untuk melaksanakan evaluasi hasil RPJMD secara berkala terhadap RPJMD Tahun 2017-2022.

Berdasarkan evaluasi Hasil RPJMD Kota Yogyakarta pada tahun 2022, dapat diketahui bahwa terdapat 162 program dengan 280 indikator. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah program tetap atau tidak mengalami perubahan. Adapun jumlah indikator program mengalami perubahan. Tahun 2022 jumlah indikator program sebesar 181 indikator lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 283 indikator. Perubahan tersebut tercantum dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.



Gambar 4. 17. Perbandingan Program dan Indikator Program Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2022

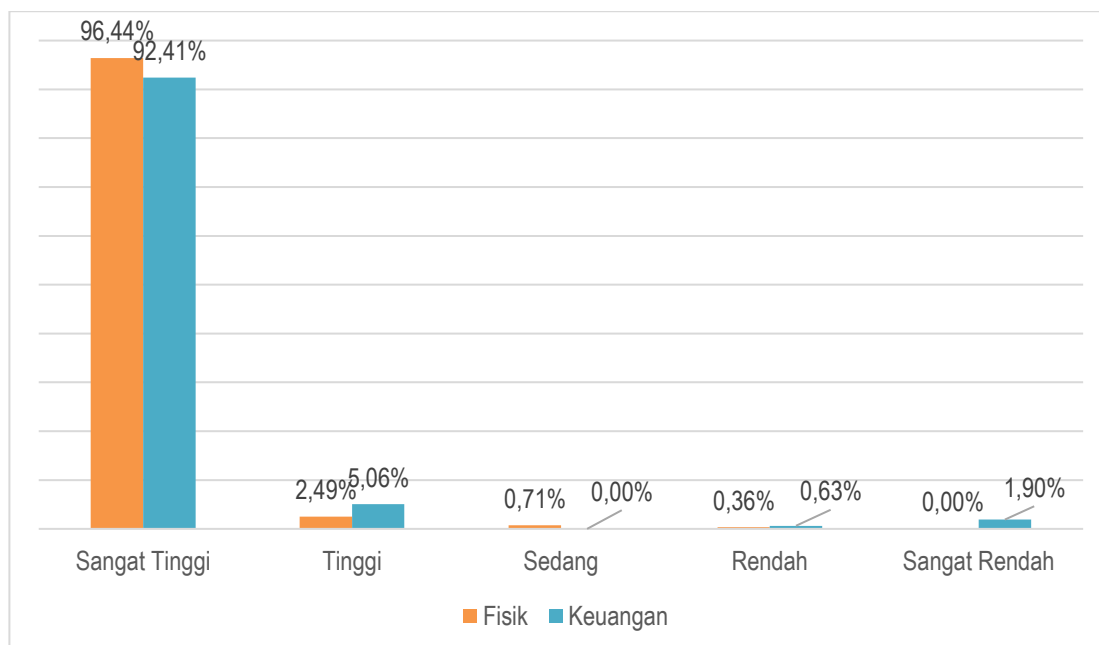
Adapun rekapitulasi indikator program yang berhasil dicapai maupun tidak dalam evaluasi hasil RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2022 yang diukur berdasarkan status capaian Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 4. 52. Rekapitulasi Capaian Indikator Program Berdasarkan Evaluasi Hasil RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2022

Status Indikator Program	Jumlah Indikator Program	% Indikator Program
Sangat Tinggi	271	96,44%
Tinggi	7	2,49%
Sedang	2	0,71%
Rendah	1	0,36%
Sangat Rendah	0	0,00%
Total	281	100%

Diketahui bahwa 96,44% atau 271 indikator program pembangunan Kota Yogyakarta berhasil dilaksanakan dengan predikat sangat tinggi, sedangkan sebesar 2,49% atau 7 indikator diantaranya berpredikat tinggi. Sementara 0,71% atau 2 indikator program tercapai dengan predikat sedang. Proporsi 0,36% atau 1 indikator program tercapai dengan status rendah serta tidak terdapat indikator program dengan status sangat rendah. Dari rekapitulasi capaian indikator program, secara umum indikator program pembangunan Kota Yogyakarta berhasil dilaksanakan dengan sangat baik.

Adapun proporsi status capaian fisik dan keuangan program perangkat daerah pada pelaksanaan RPJMD tahun 2022 sebagai berikut:



Gambar 4. 18. Proporsi Status Capaian Fisik dan Keuangan Program Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022

Pada tahun 2022 capaian fisik dan keuangan telah dicapai dengan sangat baik. Capaian fisik telah tercapai dengan status sangat tinggi dengan tingkat capaian 96,44%. Adapun capaian keuangan tercapai dengan proporsi 92,41% untuk status sangat tinggi. Capaian keuangan pada

status sangat rendah sebesar 1,90%. Sementara pada capaian fisik tidak terdapat indikator program status sangat rendah. Artinya, program-program yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah telah menunjukkan capaian fisik yang sangat baik pada tahun terakhir pelaksanaan RPJDM 2017-2022, sementara itu masih terdapat program dengan capaian keuangan sangat rendah yang menjadi sebuah catatan perbaikan kedepan ditahun pelaksanaan RPD 2023-2026 agar memenuhi target keuangan yang telah ditentukan dalam RPD.

Evaluasi terhadap hasil program pembangunan Kota Yogyakarta diperlukan untuk mengetahui capaian hasil kerja perangkat daerah dalam mengimplementasikan program dan untuk mengetahui program-program mana saja yang telah tercapai dan belum dapat tercapai hingga tahun terakhir pelaksanaan RPJMD yaitu tahun 2022. Hal ini penting untuk mengetahui apakah sasaran pembangunan Kota Yogyakarta telah dapat dicapai dan direalisasikan dengan baik atau belum. Dalam analisis hasil program pembangunan ini, tidak lepas dari capaian indikator program yang menjadi ukuran dalam menjustifikasi keberhasilan capaian program. Adapun penjabaran realisasi program yang diuraikan menurut sasaran daerah dapat dilihat sebagai berikut:

4.3.1. Sasaran 1: Kemiskinan Masyarakat Menurun

Secara umum program-program yang menunjang Sasaran Kemiskinan masyarakat menurun telah dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Hal ini ditandai dari hasil pencapaian fisik seluruh program yang memiliki predikat sangat tinggi telah mencapai 100%. Adapun hasil pencapaian keuangan, 40% atau 2 program berhasil tercapai dengan status sangat tinggi, 40% atau 2 program tercapai dengan status tinggi dan 20% atau 1 program tercapai dengan status rendah. Rendahnya capaian keuangan disebabkan adanya efisiensi anggaran yang menyesuaikan dengan kejadian bencana (situasional) yang sampai pada akhir tahun 2022 kejadian bencana di Kota Yogyakarta sedikit. Berikut capaian fisik dan keuangan program sasaran 1 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022:

Tabel 4. 53. Capaian Program Sasaran Daerah 1 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	102,11%	85%	Sangat Tinggi	Tinggi
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang tertangani	100,00%		Sangat Tinggi	
Program Advokasi Dan Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	109,42%	83%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	100,00%		Sangat Tinggi	
Program Data, Informasi Dan Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100,00%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	100,00%	62%	Sangat Tinggi	Rendah
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase makam pahlawan yang terpelihara	100,00%	98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

4.3.2. Sasaran 2: Keberdayaan Masyarakat Meningkat

Capaian program pada Sasaran Keberdayaan masyarakat meningkat menunjukkan kinerja fisik yang maksimal di akhir tahun pelaksanaan RPJMD. Terbukti bahwa seluruh atau 41 indikator program mendapatkan predikat sangat tinggi pada capaian fisiknya. Hal yang serupa juga tercermin dalam status capaian keuangan yang menunjukkan seluruh program mendapatkan status capaian keuangan sangat tinggi. Berikut capaian fisik dan keuangan program sasaran 2 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022:

Tabel 4. 54. Capaian Program Sasaran Daerah 2 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
Program Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	114,91%	94%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	100,04%		Sangat Tinggi	
Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	100,00%		Sangat Tinggi	
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	101,19%	93%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	121,13%	96%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	114,30%		Sangat Tinggi	

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
-	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase lembaga layanan keluarga yang aktif	100,37%	94%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase keluarga yang terlayani konselingnya melalui lembaga layanan keluarga	131,00%		Sangat Tinggi	
-	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase lembaga yang melaksanakan data pilah	100,00%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Perlindungan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	100,00%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase Puskesmas Ramah Anak	100,00%		Sangat Tinggi	
		Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)	100,00%		Sangat Tinggi	
Program Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	100,00%	97%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat	100,07%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni	106,93%	96%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat	100,90%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni	170,36%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat	100,37%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni	132,68%	98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat	100,06%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni	107,69%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat	100,57%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni	180,74%	97%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat	100,00%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni	100,00%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat	100,22%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni	293,59%	98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
Program Peningkatan Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat	100,01%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni	157,08%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat	100,01%	98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni	143,35%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat	100,01%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni	105,63%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat	100,04%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni	140,27%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
Program Peningkatan Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat	102,15%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni	92,52%	98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat	100,16%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni	174,81%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Pelayanan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai survei kepuasan masyarakat	100,16%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Angka Swadaya Murni	105,07%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

4.3.3. Sasaran 3: Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat

Capaian program pada Sasaran Ketahanan pangan masyarakat meningkat telah dapat dilaksanakan dengan sangat baik dari sisi capaian fisik. Adapun dari sisi capaian keuangan, seluruh program berhasil tercapai dengan status capaian sangat tinggi. Berikut capaian fisik dan keuangan program sasaran 3 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022:

Tabel 4. 55. Capaian Program Sasaran Daerah 3 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
-	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase pemenuhan cadangan pangan pemerintah	111,31%	98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari	100,00%		Sangat Tinggi	

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
Program Pembinaan Ketahanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase wilayah bebas kerawanan pangan	100,00%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pembinaan Pertanian	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase komoditas pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi.	105,41%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase kelompok tani ikan yang telah dikembangkan	145,02%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pelaku usaha komoditas perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan	105,27%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pembinaan Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	100,00%	95%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase varietas tanaman yang telah dikembangkan melalui kultur jaringan	120,18%		Sangat Tinggi	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	100,00%	98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase komoditas pangan segar asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi.	104,84%	98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis yang terkendali.	100,00%		Sangat Tinggi	
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase tindak lanjut pengawasan hasil perizinan	-		-	
Program Pembinaan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani dengan Predikat Kelas Utama	100,00%	92%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

4.3.4. Sasaran 4: Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun

Capaian program pada Sasaran Ketimpangan Antar Penduduk Menurun telah dapat dilaksanakan dengan baik. Program-program yang mendukung keberhasilan sasaran ini telah terlaksana dengan status capaian fisik sangat tinggi sebesar 92% dan capaian keuangan sangat tinggi sebesar 100%. Berikut capaian fisik dan keuangan program sasaran 4 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022:

Tabel 4. 56. Capaian Program Sasaran Daerah 4 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
Program Pengembangan Dan Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	107,10%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Dan Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran	100,00%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
-	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan kinerja Rencana Tenaga Kerja (RTK)	102,56%	95%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
-	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	100,14%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Tejaga Kerja	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	100,00%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	101,74%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	101,74%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	86,73%	100%	Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	100,00%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	110,00%	97%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Jumlah UKM ber-IUM	102,33%		Sangat Tinggi	
	Program Pengembangan Umkm	Jumlah UKM Mandiri	100,00%	98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Jumlah IKM Mandiri				

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
Program Pengembangan Industri Logam		Pendapatan UPT logam	105,63%		Sangat Tinggi	

4.3.5. Sasaran 5: Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

Capaian program pada Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Meningkat telah dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Program-program yang mendukung keberhasilan sasaran ini telah terlaksana dengan predikat capaian fisik dan keuangan sangat tinggi dan tinggi. Hal ini tentu menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya meningkatkan perekonomian Kota Yogyakarta Tahun 2022. Berikut capaian fisik dan keuangan program sasaran 5 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022:

Tabel 4. 57. Capaian Program Sasaran Daerah 5 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan Dan Ketertiban Pasar	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat	100,00%	97%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Penataan, Pengembagan Dan Pendapatan Pasar		Pendapatan retribusi pasar	100,00%		Sangat Tinggi	
Program Pengembangan Pusat Bisnis		Pendapatan UPT Pusat Bisnis	100,00%		Sangat Tinggi	
Program Pembinaan Dan Pengendalian Perdagangan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	3785,67%	94%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	100,00%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan	100,00%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	81,78%	99%	Tinggi	Sangat Tinggi

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
Program Pembinaan Perindustrian Logam	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	100,00%	90%	Sangat Tinggi	Tinggi
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang berijin industri	213,13%		Sangat Tinggi	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	100,00%	93%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Dan Pemasaran Wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	104,05%	87%	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Pengembangan Taman Pintar		Jumah Pengunjung Taman Pintar	-	-	-	-
Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		Indeks kualitas atraksi pariwisata	100,91%		Sangat Tinggi	
Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	100,00%	91%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase SDM Pariwisata yang tersertifikasi	100,00%		Sangat Tinggi	
	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	297,80%	95%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase realisasi investasi				
		Nilai Rencana Investasi	2748,80%	93%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur	109,15%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
Program Pengawasan Dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal Dan Perizinan		Persentase Tindak lanjut pengaduan penanaman modal dan perizinan	100,00%		Sangat Tinggi	
-	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase realisasi kegiatan penanaman modal	-	-	-	-
		Persentase Jumlah Investor yang telah melaporkan LKPM	132,00%	96%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
-	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase jumlah sistem informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	94,12%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

4.3.6. Sasaran 6: Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun

Program - program dalam Sasaran Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun telah dilaksanakan dengan sangat baik pada tahun 2022. Seluruh capaian fisik dan capaian keuangan berhasil terlaksana dengan predikat capaian sangat tinggi bahkan beberapa capaian telah melebihi target yang telah ditentukan. Namun demikian, salah satu indikator kinerja utama (IKU) pada sasaran 6 yaitu Angka Kriminalitas tidak tercapai. Anomali ini menjadi sebuah bahan evaluasi perencanaan kedepan dalam penyusunan program perangkat daerah pengampu sasaran 6 untuk dapat mengintervensi jenis-jenis kriminalitas pembentuk indikator angka kriminalitas dengan tetap memperhatikan tugas pokok fungsi OPD terkait. Berikut capaian fisik dan keuangan program sasaran 6 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022:

Tabel 4. 58. Capaian Program Sasaran Daerah 6 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	101,85%	96%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partisipasi politik masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pilkada/Pileg/Pilpres	100,00%	97%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik	101,03%		Sangat Tinggi	
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta	100,89%	93%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembentukan Satgas anti NAPZA	117,43%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase Penanganan konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya	121,21%		Sangat Tinggi	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi wilayah	100,91%	98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase lembaga kepemudaan yang berperan aktif	100,00%	97%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang berperan aktif	100,00%	96%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	95,07%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Kapasitas Dan Pengkajian Peraturan Perundangan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	100,00%	96%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat		Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	103,73%		Sangat Tinggi	
Program Penegakan Peraturan Perundangundangan		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	100,00%		Sangat Tinggi	
Program Perlindungan Masyarakat		Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	97,09%		Sangat Tinggi	
	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	124,85%	98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	110,69%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	105,09%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	102,44%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	100,00%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	101,43%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	102,33%	96%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	117,24%	96%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	105,26%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	103,18%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	102,38%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	100,00%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	129,17%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelanggaran Perda	95,83%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

4.3.7. Sasaran 7: Kualitas Pendidikan Meningkat

Capaian program pada Sasaran Kualitas Pendidikan Meningkat telah dapat dilaksanakan dengan baik. Program-program yang mendukung keberhasilan sasaran ini telah terlaksana dengan status capaian fisik sangat tinggi dan tinggi serta didukung dengan status capaian keuangan 100% sangat tinggi. Berikut capaian fisik dan keuangan program sasaran 7 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022:

Tabel 4. 59. Capaian Program Sasaran Daerah 7 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
Program Peningkatan Dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SD terakreditasi A	100,00%	95%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Jumlah prestasi siswa SD Tingkat Nasional	100,00%		Sangat Tinggi	

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
Program Peningkatan Dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Persentase SMP akreditasi A	99,49%		Sangat Tinggi	
		Jumlah prestasi siswa SMP Tingkat Nasional	83,33%		Tinggi	
Program Peningkatan Dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal Dan Paud	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Kelulusan UASDA Paket A	-			
		Persentase Kelulusan UNPK Paket B	-			
		Persentase Kelulusan UNPK Paket C	-			
		Persentase Kelulusan warga belajar	104,00%		Sangat Tinggi	
		Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	130,00%		Sangat Tinggi	
		Jumlah LKP terakreditasi	92,86%		Sangat Tinggi	
		Jumlah sekolah inklusi	105,26%		Sangat Tinggi	
		Persentase guru sesuai kualifikasi	98,61%		Sangat Tinggi	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang telah dibina	100,00%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	105,04%		Sangat Tinggi	
Program Pelerstarian Koleksi Pustaka Dan Data Informasi Perpustakaan	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	158,15%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

4.3.8. Sasaran 8: Harapan Hidup Masyarakat Meningkat

Program-program dalam Sasaran Harapan Hidup Masyarakat Meningkat telah dilaksanakan dengan sangat baik. Pada capaian fisik berhasil terlaksana dengan status capaian sangat tinggi dan tinggi dan pada capaian keuangan seluruh program mendapatkan predikat sangat tinggi. Berikut capaian fisik dan keuangan program sasaran 6 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022:

Tabel 4. 60. Capaian Program Sasaran Daerah 8 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	100,00%	98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	100,00%		Sangat Tinggi	
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	100,00%		Sangat Tinggi	
		Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88,03%		Tinggi	
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00%		Sangat Tinggi	
		Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrening kesehatan sesuai standar	100,00%		Sangat Tinggi	
		Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	100,03%		Sangat Tinggi	
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat		Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan	102,89%		Sangat Tinggi	
		Persentase Institusi yang melaksanakan UKK	100,00%		Sangat Tinggi	
Program Pelayanan Kesehatan Dasar		Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas	103,23%		Sangat Tinggi	
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan		Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	107,47%		Sangat Tinggi	
		Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100,00%		Sangat Tinggi	
		Persentase penduduk yang mempunyai JKN	99,97%		Sangat Tinggi	
Program Upaya Pelayanan Kesehatan		Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	108,33%		Sangat Tinggi	
		Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan	100,00%		Sangat Tinggi	
		Persentase jemaah haji mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan	100,00%		Sangat Tinggi	
		Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar	111,11%		Sangat Tinggi	
		Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100,00%		Sangat Tinggi	

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
		Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs	100,00%		Sangat Tinggi	
Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100,00%		Sangat Tinggi	
		Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100,00%		Sangat Tinggi	
		Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	87,13%		Tinggi	
		Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00%		Sangat Tinggi	
		Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00%		Sangat Tinggi	
		Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	100,00%		Sangat Tinggi	
		Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100,00%		Sangat Tinggi	
		Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR	-			
		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	-			
Program Regulasi Dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga Kesehatan yang berijin	110,56%	161%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	104,17%		Sangat Tinggi	
		Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar	111,11%		Sangat Tinggi	
Program Regulasi Dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat	102,66%	93%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	100,51%		Sangat Tinggi	
		Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	102,75%		Sangat Tinggi	
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Program Pemberdayaan	Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR	100,00%	98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
	Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	108,53%		Sangat Tinggi	
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun;	115,70%	98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan	105,17%		Sangat Tinggi	
		Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (<i>Integrated Health System</i>)	107,69%		Sangat Tinggi	
		Presentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal	100,04%		Sangat Tinggi	
Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	CBR (Crude Birth Rate)	139,70%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Cakupan ketersediaan data bangga kencana	-			
Program Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	100,09%	93%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	100,05%		Sangat Tinggi	
Program Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	102,18%	98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

4.3.9. Sasaran 9: Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat

Sasaran Peran sereta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat telah dilaksanakan dengan sangat baik. Seluruh program mendapatkan status capaian fisik dan capaian keuangan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya di Kota Yogyakarta. Berikut capaian fisik dan keuangan program sasaran 9 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022:

Tabel 4. 61. Capaian Program Sasaran Daerah 9 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan	100,00%	98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pelestarian Dan Pengembangan Seni Dan Tradisi		Persentase Pelestarian Kebudayaan berbasis Kelurahan	110,97%		Sangat Tinggi	
Program Pelestarian Dan Pengembangan Sejarah Dan Bahasa		Rasio Kegiatan Kesenian Tradisional berbasis Wilayah	100,00%		Sangat Tinggi	
		Persentase BCB yang dilestarikan	100,00%		Sangat Tinggi	
Program Pelestarian Warisan Dan Nilai Budaya		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	100,00%		Sangat Tinggi	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Museum	-			
		Tingkat Pengenalan Masyarakat terhadap Museum	100,31%		Sangat Tinggi	
		Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton	105,65%		Sangat Tinggi	
	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Pengunjung Taman Budaya	119,64%	90%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

4.3.10. Sasaran 10: Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat

Program-program dalam Sasaran Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat berhasil tercapai 100% dengan sangat baik dengan status capaian sangat tinggi dari segi capaian fisik. Capaian keuangan menunjukkan 67% atau 4 program berhasil tercapai dengan status capaian sangat tinggi dan 33% atau 2 program tercapai dengan status capaian sangat rendah. Adapun capaian keuangan sangat rendah disebabkan oleh tidak terealisasinya pengadaan tanah untuk pengembangan RSUD Jogja akibat harga penawaran di atas harga appraisal yang menyebabkan tidak tercapainya mufakat harga. Berikut capaian fisik dan keuangan program sasaran 10 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022:

Tabel 4. 62. Capaian Program Sasaran Daerah 10 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	100,00%	97%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	100,00%		Sangat Tinggi	
-	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase penerbitan Izin Lokasi	100,00%	96%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
-	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah di Kota Yogyakarta	100,00%	44%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Program Pengelolaan Pertanahan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan.	99,22%	5%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
Program Pengelolaan Pertanahan	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot.	101,26%	91%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
-	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Kejelasan Batas wilayah antar Kabupaten dan Kota, antar kecamatan dan antar kelurahan		90%		Sangat Tinggi
		Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara.	140,00%		Sangat Tinggi	

4.3.11. Sasaran 11: Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat

Program-program pendukung sasaran kualitas lingkungan hidup meningkat telah dilaksanakan dengan cukup baik. Capaian fisik menunjukkan 75% atau 6 indikator program berhasil tercapai dengan status capaian sangat tinggi, 13% atau 1 indikator program tercapai dengan status capaian sedang dan 13% atau 1 program berhasil tercapai dengan status capaian rendah. Adapun capaian keuangan menunjukkan seluruh program berhasil tercapai dengan status capaian sangat tinggi. Berikut capaian fisik dan keuangan program sasaran 11 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022:

Tabel 4. 63. Capaian Program Sasaran Daerah 11 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi.	141,16%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Penataan Pengendalian Dampak Lingkungan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	94,50%	96%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
		Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	94,04%		Sangat Tinggi	
		Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan.	122,05%		Sangat Tinggi	
Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase sekolah berwawasan lingkungan.	130,00%	97%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase Kampung berwawasan lingkungan	56,21%		Rendah	
Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	70,34%	99%	Sedang	Sangat Tinggi
		Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik.	106,06%		Sangat Tinggi	

4.3.12. Sasaran 12: Infrastruktur Wilayah Meningkat

Program-program dalam mewujudkan Sasaran 12: Infrastruktur wilayah meningkat telah dilaksanakan dengan baik pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD. Capaian fisik menunjukkan 96% atau 27 indikator program berhasil tercapai dengan status capaian sangat tinggi dan 4% atau 1 indikator program tercapai dengan status capaian tinggi. Adapun capaian keuangan menunjukkan 92% atau 12 program berhasil tercapai dengan status capaian sangat tinggi dan 8% atau 1 program tercapai dengan status capaian tinggi. Berikut capaian fisik dan keuangan program sasaran 12 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022:

Tabel 4. 64. Capaian Program Sasaran Daerah 12 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Saluran Pengairan Dan Drainase	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	100,59%	89%	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Saluran Pengairan Dan Drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.	99,60%	93%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pembangunan Gedung Pemerintah	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	100,18%	98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	105,30%	95%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	100,76%		Sangat Tinggi	
-	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja trampil	100,16%	98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase peningkatan kapasitas asosiasi jasa konstruksi	140,33%		Sangat Tinggi	
Program Penataan Perumahan, Permukiman Dan Tata Bangunan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	103,92%	97%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	100,00%		Sangat Tinggi	
		Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	100,92%		Sangat Tinggi	
Program Pembangunan Gedung Pemerintah	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	99,23%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
-	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	106,71%	98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	97,89%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	83,27%	99%	Tinggi	Sangat Tinggi
		Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	102,92%		Sangat Tinggi	
Program Pengelolaan Lalu Lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)	129,08%	97%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Perparkiran		Persentase juru parkir yang tertib	100,02%		Sangat Tinggi	
		Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	100,24%		Sangat Tinggi	

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional Dan Keselamatan Lalu Lintas		Jumlah pelanggaran	114,89%		Sangat Tinggi	
		Persentase Angkutan Umum dan Barang yang Laik Jalan	94,15%		Sangat Tinggi	
PROGRAM KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kampung tangguh bencana	100,00%	94%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	100,00%		Sangat Tinggi	
		Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi	100,00%		Sangat Tinggi	
PROGRAM PENCEGAHANKEBAKARAN	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	100,00%	91%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase edukasi proteksi kebakaran	102,04%		Sangat Tinggi	
PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN		Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit	100,00%		Sangat Tinggi	
		Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota	100,00%		Sangat Tinggi	
		Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	100,00%		Sangat Tinggi	

4.3.13. Sasaran 13: Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat

Sasaran kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat telah dilaksanakan dengan baik pada 2022. Capaian fisik menunjukkan 96% atau 53 program berhasil tercapai dengan status capaian sangat tinggi, 2% atau 1 indikator program tercapai dengan status capaian tinggi, dan

2% atau 1 indikator program tercapai dengan status capaian sedang. Adapun capaian keuangan menunjukkan 84% atau 21 program berhasil tercapai dengan capaian sangat tinggi, 12% atau 3 program berhasil tercapai dengan status capaian tinggi, dan 4% atau 1 program berhasil tercapai dengan status capaian sangat rendah. Berikut capaian fisik dan keuangan program sasaran 13 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022:

Tabel 4. 65. Capaian Program Sasaran Daerah 13 pada RPJMD Pelaksanaan Tahun 2022

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	105,88%	92%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	121,58%		Sangat Tinggi	
Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan		Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	100,00%		Sangat Tinggi	
		Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100,00%		Sangat Tinggi	
Program Peningkatan Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Dan Kerjasama	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	100,00%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	100,00%		Sangat Tinggi	
Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	101,44%		Sangat Tinggi	
Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	73,36%		Sedang	
		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	111,59%		Sangat Tinggi	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100,00%	98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	100,00%		Sangat Tinggi	
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, Dan Kerumahtanggaan		Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum dan kerumahtanggaan	-	96%		Sangat Tinggi
Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Dan Keprotokolan Pemerintah Daerah		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	-			
		Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	100,51%		Sangat Tinggi	
Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	105,11%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan	100,00%		Sangat Tinggi	
Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Sosial	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia	105,73%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Ekonomi		Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam	106,25%		Sangat Tinggi	
Program Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Fisik		Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan	103,75%		Sangat Tinggi	
Program Penelitian Dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	100,00%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100,00%	7%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
Program Pengendalian Belanja Daerah Dan Pengelolaan Dana Transfer		Persentase penyerapan belanja daerah	104,51%		Sangat Tinggi	
Program Pengelolaan Pembiayaan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd		Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	100,00%		Sangat Tinggi	
Program Perencanaan, Pemanfaatan Dan Inventarisasi Aset	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	-	85%		Tinggi
Program Pengelolaan Pembiayaan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd		Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang kategori baik	100,00%		Sangat Tinggi	
Program Pelayanan, Pendaftaran Dan Penetapan Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian	100,00%	98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pembukuan Dan Penagihan Pajak Daerah		Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	145,15%		Sangat Tinggi	
		Nilai pendapatan Pajak Daerah	127,11%		Sangat Tinggi	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan Dan Aparatur	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	109,89%	96%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	109,89%		Sangat Tinggi	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Sarana dan Prasarana	109,89%		Sangat Tinggi	

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	109,89%		Sangat Tinggi	
Program Peningkatan Dan Evaluasi Pengawasan		Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	109,89%		Sangat Tinggi	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	100,00%	96%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	128,50%	77%	Sangat Tinggi	Tinggi
		Persentase pelayanan kesejahteraan pegawai	103,09%		Sangat Tinggi	
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian		persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	100,00%		Sangat Tinggi	
Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	103,65%	97%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	100,04%	98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	100,00%	98%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100,00%	97%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	100,00%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
Program Perlindungan, Penyelamatan, Data Dan Informasi Arsip	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	100,00%	100%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase administasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	100,00%	97%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan	100,00%		Sangat Tinggi	
Program Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase produk hukum yang diselesaikan	100,00%	83%	Sangat Tinggi	Tinggi
Program Fasilitas Penganggaran Dan Pengawasan		Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100,00%		Sangat Tinggi	
		Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan	94,69%		Sangat Tinggi	
		Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPR dan kelompok pakar yang diselesaikan	80,00%		Tinggi	
Program Peningkatan Komunikasi Publik	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam	100,39%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Optimalisasi Pemanfaatn Teknologi Informasi Dan Telematika	Program Aplikasi Informatika	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	188,85%	97%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	107,10%		Sangat Tinggi	
		Persentase Kelancaran Pelayanan Pemeliharaan Sarana Telekomunikasi	100,00%		Sangat Tinggi	
		Persentase pelayanan dan pengawasan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan informasi	100,00%		Sangat Tinggi	

Program RPJMD	Program	Indikator Program	Tingkat Capaian Fisik	Tingkat Capaian Keuangan	Status Capaian Fisik	Status Capaian Keu
		Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	-		-	
Program Pengelolaan Informasi Dan Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	100,00%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Pelayanan Persandia	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase pengamanan informasi	100,00%	99%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	125,00%		Sangat Tinggi	
		Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	100,00%		Sangat Tinggi	

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan Evaluasi Hasil RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 pelaksanaan Tahun 2022, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan status ketercapaiannya, capaian sasaran daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 menunjukkan bahwa 94% atau 15 indikator sasaran telah terealisasi $\geq 100\%$ (tercapai), sedangkan 6% lainnya atau sebanyak 1 indikator sasaran terealisasi $< 100\%$ (tidak tercapai).
2. Berdasarkan status ketercapaiannya, capaian sasaran perangkat daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 menunjukkan bahwa 85% atau 76 indikator sasaran telah terealisasi $\geq 100\%$ (tercapai), sedangkan 15% lainnya atau sebanyak 13 indikator sasaran terealisasi $< 100\%$ (tidak tercapai).
3. Berdasarkan status ketercapaiannya, capaian program perangkat daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 menunjukkan bahwa 90% atau 254 indikator program telah terealisasi $\geq 100\%$ (tercapai), sedangkan 10% lainnya atau sebanyak 27 indikator program terealisasi $< 100\%$ (belum tercapai).
4. Rata-rata realisasi program pada RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2022 berdasarkan Formulir E.78 Permendagri No. 86 Tahun 2017 dapat dikatakan sangat berhasil, dilihat dari capaian realisasi sebesar 129,50%. Angka capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa rata-rata capaian program pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2022 mencapai predikat sangat tinggi.
5. Capaian realisasi program perangkat daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 berdasarkan kriteria Permendagri 86 Tahun 2017 menunjukkan bahwa, sebesar 96,44% telah dicapai dengan status sangat tinggi, adapun 2,49% dicapai dengan predikat tinggi, 0,71% memiliki status capaian sedang, dan 0,36% dicapai dengan status rendah.
6. Faktor pendorong dalam realisasi RPJMD Tahun 2022 secara umum meliputi komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat merealisasikan sasaran dan program dengan baik dan memberikan layanan optimal kepada masyarakat; dukungan undang-undang /peraturan hingga sistem operasional yang memadai; kesadaran dan partisipasi masyarakat; sarana dan prasarana yang cukup memadai, hingga adanya bantuan dana dari pemerintah terkait beberapa program tertentu sehingga dapat memudahkan proses pelaksanaan.
7. Beberapa hal yang menjadi penghambat dalam proses realisasi RPJMD Tahun 2022 ialah perilaku masyarakat yang belum melaksanakan pengelolaan sampah dengan maksimal seperti 3R, pilah sampah dan kurang tertib dalam pembuangan sampah, khususnya untuk

pengunjung dari luar kota, sebagian pelaku UKM belum melek digital dan pengelolaan usahanya masih dilakukan secara konvensional hingga masih kurangnya daya tarik wisata pada malam hari.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan tinjauan dan analisis realisasi dan capaian evaluasi hasil RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2022, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi yakni:

- a. Mengidentifikasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 2027-2022 untuk selanjutnya dapat disusun strategi penyelesaian pada perencanaan berikutnya.
- b. Mencermati kembali indikator yang masih relevan untuk dilaksanakan serta menjadikan realisasi 2022 sebagai *baseline* perencanaan periode berikutnya.

Formulir E.78
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan Tahun 2022

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah: Kemiskinan masyarakat menurun

No	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program PD	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun ke 6		Capaian Target RPJMD Kab/Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun ke 6		Tingkat Capaian Target RPJMD Kab/Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun ke 6 (%)		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		
					(6)		(12)		(18)		(24)		(25)		(25)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Kemiskinan masyarakat menurun	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	80%	87%	5.600.973.695,00	87,41%	5.600.973.695,00	89,25%	4.782.180.370,00	102,11%	85%	102%	85%	102%	85%	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang tertangani	100%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%		
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	70%	86,98%	5.909.730.344,00	86,98%	5.909.730.344,00	95,17%	4.878.083.177	109,42%	83%	109%	83%	109%	83%	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	100%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	80%	90,42%	531.638.020,00	90,42%	531.638.020,00	90,42%	528.277.020,00	100,00%	99%	100%	99%	100%	99%	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%	96.531.120,00	100%	96.531.120,00	100%	59.580.320,00	100,00%	62%	100%	62%	100%	62%	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase makam pahlawan yang terpelihara	100%	100%	26.325.000,00	100%	26.325.000,00	100%	25.845.000,00	100,00%	98%	100%	98%	100%	98%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											101,65%	85,44%					
Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Tinggi					

No	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program PD	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun ke 6		Capaian Target RPJMD Kab/Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun ke 6		Tingkat Capaian Target RPJMD Kab/Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun ke 6 (%)		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
					(6)		(12)		(18)		(24)		(25)		(25)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian:			<p>Perlindungan Sosial: Melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, intervensi yang dilakukan diantaranya adalah penyaluran bantuan sosial PKH, pangan, asistensi sosial lanjut usia miskin, bantuan bagi keluarga miskin yang belum mendapat program, dan bantuan langsung tunai bagi masyarakat terdampak kenaikan BBM, bantuan modal usaha untuk UEP PKH Graduasi.</p> <p>Program lain yang terkait adalah Rehabilitasi Sosial. Intervensi yang dilakukan diantaranya adalah pelayanan orang terlantar kehabisan bekal, santunan kematian, dukungan shelter Covid-19 dan shelter mandiri di wilayah, penanganan jenazah terlantar, layanan anak terlantar di Wiloso Projo dan Lansia terlantar di Budhidharma, pemberian motivasi dan pelatihan singkat bagi keluarga penyandang disabilitas, bantuan modal usaha KUBE pengembangan, pemberian bimbingan sosial, motivasi, pelatihan singkat bagi korban tindak kekerasan, perempuan rawan sosial ekonomi, penyandang disabilitas, dan asistensi sosial bagi penyandang disabilitas.</p> <p>Jaminan Pendidikan: Intervensi yang dilakukan Dinas Pendidikan melalui Program Pengelolaan Pendidikan adalah Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Jaminan Pendidikan Daerah (JPD), dan Beasiswa Prestasi.</p> <p>Jaminan Kesehatan: Dinas Kesehatan mengadopsi skema intervensi Cakupan Kesehatan Universal atau Universal Health Coverage (UHC). Skema ini menjamin premi asuransi kesehatan bagi siapapun masyarakat Kota Yogyakarta. Skema tersebut diwujudkan dalam Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan output Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat.</p> <p>Peningkatan Pendapatan: Skema peningkatan pendapatan dijalankan oleh beberapa OPD, diantaranya dengan pelatihan, bantuan permodalan serta pembinaan dan atau pendampingan. Pelatihan diantaranya diselenggarakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui 13 jenis pelatihan.</p>													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:			DTKS sebagai database intervensi kesejahteraan sosial belum jelas parameternya sangat dinamis dan sulit diakses realtime; Penyaluran bansos tidak sesuai jadwal waktu yang reguler dan sering terlambatnya pemberian data bansos dari Pusat; Metode Penyaluran yang berganti antara tunai dan non tunai mempersulit kontrol terhadap penggunaan bansos (BLT).													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kota berikutnya:			Penyusunan Pemeringkatan DTKS melalui Optimalisasi verval DTKS dengan menggunakan parameter lokal; Optimalisasi koordinasi dengan pusat untuk akses DTKS secara cepat; Optimalisasi edukasi kepada KPM penerima bansos terkait penggunaan bantuan tunai agar sesuai dengan tujuan bansosnya.													

Formulir E.78
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan Tahun 2022

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah: Keberdayaan masyarakat meningkat

No	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program PD	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kab/Kota pada RPKD Kab/Kota Tahun ke 6		Capaian Target RPJMD Kab/Kota Melalui Pelaksanaan RPKD Tahun ke 6		Tingkat Capaian Target RPJMD Kab/Kota Hasil Pelaksanaan RPKD Kab/Kota Tahun ke 6 (%)		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
							2022		2022		2022					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(12)		(18)		(24)		(25)		(25)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	Keberdayaan masyarakat meningkat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1%	1,14%	2.708.990.040,00	1,14%	2.708.990.040,00	1,31%	2.536.142.518,08	114,91%	94%	115%	94%	115%	94%
			Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif	82%	85,00%		85,00%		85,03%		100,04%		100%		100%	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Berkembang (nilai 201-350)	Cepat Berkembang		Cepat Berkembang		Cepat Berkembang (nilai 388,33)		100,00%		100%		100%	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	74%	86,88%	809.489.886,00	86,88%	809.489.886,00	87,91%	750.595.052,32	101,19%	93%	101%	93%	101%	93%
		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	47%	78,89%	795.764.403,00	78,89%	795.764.403,00	95,56%	764.250.511,24	121,13%	96%	121%	96%	121%	96%
			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	24%	83,33%		83,33%		95,25%		114,30%		114%		114%	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga layanan keluarga yang aktif	67,47%	78,31%	2.385.000,00	78,31%	2.385.000,00	78,60%	2.249.100,00	100,37%	94%	100%	94%	100%	94%		

No	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program PD	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kab/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun ke 6		Capaian Target RPJMD Kab/Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun ke 6		Tingkat Capaian Target RPJMD Kab/Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun ke 6 (%)		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
							2022		2022		2022					
							(6)		(12)		(18)					
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(12)		(18)		(24)		(25)		(25)	
			Persentase keluarga yang terlayani konselingnya melalui lembaga layanan keluarga	4%	5%		5%		7%		131,00%		131%		131%	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase lembaga yang melaksanakan data pilah	62,00%	72%	1.200.000,00	72%	1.200.000,00	72%	1.200.000,00	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	31%	100%	1.410.644.675,00	100%	1.410.644.675,00	100%	1.403.925.538,32	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Puskesmas Ramah Anak	60%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%	
			Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)	18,5%	100,0%		100%		100%		100,00%		100%		100%	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	100,0%	100%	1.204.109.714,00	100%	1.204.109.714,00	100%	1.172.368.027,00	100,00%	97%	100%	97%	100%	97%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	77	82,03	324.875.651	82,03	324.875.651	82,09	325.031.151	100,07%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	854.865.400	1.247.600.000	2.560.542.607	1.247.600.000	2.560.542.607	1.334.085.000	2.449.461.974	106,93%	96%	107%	96%	107%	96%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	70	84	351.142.294	84	351.142.294	84,76	347.559.894	100,90%	99%	101%	99%	101%	99%		

No	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program PD	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kab/Kota pada RKPDP Kab/Kota Tahun ke 6		Capaian Target RPJMD Kab/Kota Melalui Pelaksanaan RKPDP Tahun ke 6		Tingkat Capaian Target RPJMD Kab/Kota Hasil Pelaksanaan RKPDP Kab/Kota Tahun ke 6 (%)		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
							2022		2022		2022					
							(6)		(12)		(18)					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)												
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	698.202.000	791.346.000	2.033.559.324	791.346.000	2.033.559.324	1.348.166.000	2.026.574.748	170,36%	100%	170%	100%	170%	100%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	76,5	82,00	436.797.594	82	436.797.594	82,3	436.704.264	100,37%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	4.700.000.000	4.973.000.000	4.281.471.067	4.973.000.000	4.281.471.067	6.598.194.000	4.205.672.471	132,68%	98%	133%	98%	133%	98%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	87	88,57	299.651.254	88,57	299.651.254	88,62	300.596.254	100,06%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	460.000.000	478.584.000	1.776.133.394	478.584.000	1.776.133.394	515.392.000	1.761.816.601	107,69%	99%	108%	99%	108%	99%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	82,5	87,5	671.015.028	87,5	671.015.028	88	665.022.530	100,57%	99%	101%	99%	101%	99%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	114.211.900	730.294.500	2.668.658.386	730.294.500	2.668.658.386	1.319.915.900	2.590.751.888	180,74%	97%	181%	97%	181%	97%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	88,31	90,50	506.733.070	90,50	506.733.070	90,50	502.811.910	100,00%	99%	100%	99%	100%	99%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	2.760.000.000	2.960.000.000	3.229.531.957	2.960.000.000	3.229.531.957	2.960.000.000	3.209.107.350	100,00%	99%	100%	99%	100%	99%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	75,19	85,25	416.487.565	85,25	416.487.565	85,44	412.176.724	100,22%	99%	100%	99%	100%	99%

No	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program PD	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kab/Kota pada RKPDP Kab/Kota Tahun ke 6		Capaian Target RPJMD Kab/Kota Melalui Pelaksanaan RKPDP Tahun ke 6		Tingkat Capaian Target RPJMD Kab/Kota Hasil Pelaksanaan RKPDP Kab/Kota Tahun ke 6 (%)		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
							2022		2022		2022					
							(6)		(12)		(18)					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)												
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	429.601.667	429.601.667	2.797.057.851	429.601.667	2.797.057.851	1.261.258.000	2.754.110.762	293,59%	98%	294%	98%	294%	98%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	83,37	84,87	456.250.039	84,87	456.250.039	84,88	455.053.689	100,01%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	550.000.000	1.000.000.000	3.046.992.276	1.000.000.000	3.046.992.276	1.570.751.358	3.033.817.018	157,08%	100%	157%	100%	157%	100%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	70	85	611.270.911	85	611.270.911	85,01	601.186.937	100,01%	98%	100%	98%	100%	98%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	1.000.000.000	1.110.000.000	2.478.038.719	1.110.000.000	2.478.038.719	1.591.231.000	2.472.507.394	143,35%	100%	143%	100%	143%	100%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	81,11	84	788.578.130	84,20	788.578.130	84,21	786.335.700	100,01%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	338.235.000	684.460.000	1.998.995.028	684.460.000	1.998.995.028	722.994.000	1.975.612.077	105,63%	99%	106%	99%	106%	99%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	79,66	81,69	387.250.754	81,69	387.250.754	81,72	386.570.828	100,04%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	629.387.000	635.697.000	2.370.695.244	635.697.000	2.370.695.244	891.703.300	2.368.431.601	140,27%	100%	140%	100%	140%	100%

No	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program PD	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kab/Kota pada RKPDP Kab/Kota Tahun ke 6		Capaian Target RPJMD Kab/Kota Melalui Pelaksanaan RKPDP Tahun ke 6		Tingkat Capaian Target RPJMD Kab/Kota Hasil Pelaksanaan RKPDP Kab/Kota Tahun ke 6 (%)		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
							2022		2022		2022					
							(6)		(12)		(18)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(12)		(18)		(24)		(25)		(25)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	75	81,5	718.917.426	81,5	718.917.426	83,25	713.191.606	102,15%	99%	102%	99%	102%	99%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	127.478.325	1.918.155.806	3.375.678.882	1.918.155.806	3.375.678.882	1.774.711.000	3.312.029.755	92,52%	98%	93%	98%	93%	98%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	80	83	873.730.940	83	873.730.940	83,13	872.763.486	100,16%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	1.101.518.000	2.203.036.000	5.646.620.899	2.203.036.000	5.646.620.899	3.851.194.259	5.634.618.547	174,81%	100%	175%	100%	175%	100%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai survei kepuasan masyarakat	82,5	83,07	740.842.935	83,07	740.842.935	83,20	730.913.206	100,16%	99%	100%	99%	100%	99%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Murni	726.350.000	933.300.000	2.675.438.422	933.300.000	2.675.438.422	980.585.000	2.646.112.150	105,07%	99%	105%	99%	105%	99%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											117,03%	98,52%				
Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian:			Upaya yang dilakukan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya adalah Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak. PUG dan Pemberdayaan Perempuan diantaranya dilakukan melalui pembinaan organisasi/ lembaga PUG di Kota Yogyakarta, dengan berbagai jenis intervensi sesuai kebutuhan. Perlindungan Perempuan dilakukan melalui penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga, baik dengan upaya preventif maupun penanganan kasus; Adanya peningkatan keberdayaan masyarakat pada aspek pemberdayaan masyarakat berbasis kampung ditandai dengan peningkatan jumlah deklarasi tematik pembangunan masing-masing kampung. Asumsi yang dibangun adalah deklarasi suatu tema dilakukan karena kampung tersebut sudah melakukan persiapan pada tema-tema pembangunan terkait, diantaranya Kampung Ramah Anak, Kampung Tangguh Bencana, Kampung Panca Tertib, dan Kampung KB													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:			Kurang minat dan pengetahuan masyarakat dalam mengikuti kegiatan gender corner; Tidak semua korban kekerasan perempuan kooperatif ketika dilakukan pendampingan													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kota berikutnya:			Memperbanyak lokus wilayah dan kegiatan yang diikuti Gender Corner; Pada awal pengaduan disampaikan tahapan-tahapan pendampingan													

Formulir E.78
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan Tahun 2022

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah: Ketahanan pangan masyarakat meningkat

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(12)		(18)		(24)		(25)		(25)	
					Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKP Kab/Kota Tahun ke 6		Capaian Target RPJMD Kab/Kota Melalui Pelaksanaan RKP Tahun ke 6		Tingkat Capaian Target RPJMD Kab/Kota Hasil Pelaksanaan RKP Kab/Kota Tahun ke 6 (%)		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan cadangan pangan pemerintah	26,45%	35%	1.248.541.966,00	35,00%	1.248.541.966,00	38,96%	1.223.971.655,60	111,31%	98%	111%	98%	111%	98%
			Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari	17,5%	26,67%		26,67%		26,67%		100,00%		100%		100%	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase wilayah bebas kerawanan pangan	100,0%	100%	93.970.540,00	100%	93.970.540,00	100%	93.722.540,00	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase komoditas pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi.	91,25%	92,5%	117.557.978,00	92,50%	117.557.978,00	97,50%	116.148.480,00	105,41%	99%	105%	99%	105%	99%
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok tani ikan yang telah dikembangkan	22,06%	29,41%	761.368.238,00	29,41%	761.368.238,00	42,65%	760.073.449,00	145,02%	100%	145%	100%	145%	100%
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani dengan Predikat Kelas Utama	6 kelompok	9 Kelompok	664.066.360,00	9 Kelompok	664.066.360,00	9 Kelompok	610.180.080,00	100,00%	92%	100%	92%	100%	92%
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pelaku usaha komoditas perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan	46,67%	63,33%	48.713.790,00	63,33%	48.713.790,00	66,67%	48.706.890,00	105,27%	100%	105%	100%	105%	100%

No	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program PD	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPd Kab/Kota Tahun ke 6		Capaian Target RPJMD Kab/Kota Melalui Pelaksanaan RKPd Tahun ke 6		Tingkat Capaian Target RPJMD Kab/Kota Hasil Pelaksanaan RKPd Kab/Kota Tahun ke 6 (%)		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
					(6)		(12)		(18)		(24)		(25)		(25)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	100,0%	100%	976.365.188,00	100%	976.365.188,00	100%	924.178.312,00	100,00%	95%	100%	95%	100%	95%
			Persentase varietas tanaman yang telah dikembangkan melalui kultur jaringan	3,42%	6,84%		6,84%		8,22%		120,18%		120%		120%	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	100,0%	100%	252.091.000,00	100%	252.091.000,00	100%	247.385.692,00	100,00%	98%	100%	98%	100%	98%
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase komoditas pangan segar asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi.	95,08%	95,38%	906.456.002,00	95,38%	906.456.002,00	100,00%	888.762.027,00	104,84%	98%	105%	98%	105%	98%
			Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis yang terkendali.	80,0%	84%		84%		84%		100,00%		100%		100%	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase tindak lanjut pengawasan hasil perizinan	100,0%	100%											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											107,67%	97,68%				
Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian:			Peningkatan ketersediaan pangan Masyarakat Kota Yogyakarta melalui program pengembangan kampung sayur dan rintisan kampung pangan di 4 lokasi, rintisan kampung pangan lestari di 4 lokasi serta pengembangan kegiatan pekarangan pangan lestari di 7 lokasi; Pengembangan sistem ketersediaan dan cadangan pangan melalui pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah dan monitoring secara berkala melalui kerja sama dengan Perusahaan Daerah Taru Martani; Pengembangan sistem informasi mutu, stok, pasokan dan harga pangan melalui monitoring pengawasan mutu kualitas, stok, pasokan dan harga pangan secara berkala serta pengembangan peta mutu, stok dan harga pangan. Inovasi yang dilakukan yaitu peta pemantauan pemotongan luar RPH, peta stok pasokan pangan, link data sektor terkait pangan.													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:			Sumber cadangan pangan belum bisa dipenuhi oleh produksi beras dalam wilayah Kota Yogyakarta, pengelolaan cadangan beras belum dikelola oleh BUMD Kota; Perlunya satu sistem terpadu guna melakukan monitoring pengawasan mutu kualitas stok pasokan dan harga pangan.													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kota berikutnya:			Peningkatan Gerakan Konsumsi Pangan Lokal selain nasi tetapi juga umbi-umbian; Meningkatkan pola kerjasama untuk keberlanjutan dan produktivitas pertanian perkotaan melalui intervensi teknologi serta menyusun link data lintas sektor terkait stock pangan sehingga masing-masing perangkat daerah dapat mendukung penguatan ketahanan pangan sesuai tugas pokok dan fungsinya.													

Formulir E.78
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan Tahun 2022

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah: Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun

No	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program PD	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPd Kab/Kota Tahun ke 6		Capaian Target RPJMD Kab/Kota Melalui Pelaksanaan RKPd Tahun ke 6		Tingkat Capaian Target RPJMD Kab/Kota Hasil Pelaksanaan RKPd Kab/Kota Tahun ke 6 (%)		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
					(6)		(12)		(18)		(24)		(25)		(25)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	60,74%	70,18%	1.396.872.840,00	70,18%	1.396.872.840,00	75,16%	1.396.387.140,00	107,10%	100%	107%	100%	107%	100%
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran	100,0%	100,00%	189.963.790,00	100%	189.963.790,00	100%	189.210.950,00	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan kinerja Rencana Tenaga Kerja (RTK)	65,5%	66,69%	157.793.400,00	66,69%	157.793.400,00	68,40%	150.198.400,00	102,56%	95%	103%	95%	103%	95%
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	91,0%	91,64%	1.484.701.900,00	91,64%	1.484.701.900,00	91,77%	1.481.436.740,00	100,14%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	32,65%	38,26% - 41,45%	885.368.500,00	38,26% - 41,45%	885.368.500,00	38,27%	879.188.300,00	100,00%	99%	100%	99%	100%	99%
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	115	115	161.877.600,00	115	161.877.600,00	117	161.870.640,00	101,74%	100%	102%	100%	102%	100%

No	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program PD	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun ke 6		Capaian Target RPJMD Kab/Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun ke 6		Tingkat Capaian Target RPJMD Kab/Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun ke 6 (%)		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
							2022		2022		2022					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(12)		(18)		(24)		(25)		(25)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	115	115	68.220.000,00	115	68.220.000,00	117	68.220.000,00	101,74%	100%	102%	100%	102%	100%
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	465	565	316.828.123,00	565	316.828.123,00	490	316.431.230,00	86,73%	100%	87%	100%	87%	100%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	10 unit	15	473.770.850,00	15	473.770.850,00	15	473.660.800,00	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		5,0%	5%	957.198.160,00		957.198.160,00		929.194.960,00		97%		97%		97%
			Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	100	100		100		110		110,00%		110%		110%	
			Jumlah UKM ber-IUM	400	215		215		220		102,33%		102%		102%	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Mandiri	30	30	591.758.680,00	30	591.758.680,00	30	577.654.426,00	100,00%	98%	100%	98%	100%	98%
			Pendapatan UPT logam	490.027.216	437.900.000		437.900.000		462.535.073		105,63%		106%		106%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											101,38%	98,94%				
Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian:			Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja mulai dari fasilitasi dan peningkatan kapasitas para pencari kerja, channeling calon pekerja dengan perusahaan, advokasi perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui pengesahan peraturan perusahaan, deteksi dini ketenagakerjaan untuk upaya pengawasan, konsultasi masalah ketenagakerjaan, hingga mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing perusahaan agar berkelanjutan; Peningkatan kesejahteraan lapisan masyarakat yang bekerja pada lingkup UMKM dan koperasi mulai dari penumbuhan wirausaha dan koperasi baru/rintis, peningkatan kapasitas koperasi dan UKM, fasilitasi pameran dan pemasaran digital, peningkatan inklusi sosial ekonomi bagi penduduk rentan, Kolaborasi lintas sektor.													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:			Sebagian pelaku UKM belum melek digital, manajemen usaha dan produksi juga masih menjadi kendala; Masih ada beberapa UKM yang dalam pengelolaan usahanya belum menerapkan standar yang ada; Pengelolaan usaha masih secara konvensional.													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kota berikutnya:			Bekerjasama dengan marketplace untuk digital marketing; Berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai legalitas lembaga dan melakukan bimbingan terkait legalitas; Melaksanakan Bimtek Produktivitas 5S (Seiri/ Ringkas, Seiton/Rapi, Seiso/ Resik, Seiketsu/ Rawat, Shitsuke/Rajin).													

Formulir E.78
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan Tahun 2022

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah: Pertumbuhan ekonomi meningkat

No	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program PD	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun ke 6		Capaian Target RPJMD Kab/Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun ke 6		Tingkat Capaian Target RPJMD Kab/Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun ke 6 (%)		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
							2022		2022		2022					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(12)		(18)		(24)		(25)		(25)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	Pertumbuhan ekonomi meningkat	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat	10,0%	27,59%	21.828.407.728,00	27,59%	21.828.407.728,00	27,59%	21.196.748.167,00	100,00%	97%	100%	97%	100%	97%
			Pendapatan retribusi pasar	15.335.808.505	12.578.082.500 - 15.735.808.505	12.578.082.500 - 15.735.808.505	14.963.203.113	100,00%		100%		100%				
			Pendapatan UPT Pusat Bisnis	4.625.112.300	3.723.158.080 - 4.965.244.655	3.723.158.080 - 4.965.244.655	4.138.697.582	100,00%		100%		100%				
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	2,0%	9%	1.368.030.188,00	9,00%	1.368.030.188,00	340,71%	1.290.676.183,00	3785,67%	94%	3786%	94%	3786%	94%
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	20,0%	20%	46.875.000,00	20%	46.875.000,00	20%	46.865.000,00	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan	100,0%	100%	252.749.528,00	100%	252.749.528,00	100%	252.744.528,00	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		2022		2022		2022		(25)		(25)			
					K	Rp	(12)		(18)		(24)		K	Rp	K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp						
			Persentase publikasi informasi harga bahan pokok minimal 2x dalam sebulan	100,0%	100%													
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	92,8%	92,76%	237.843.884,00	92,76%	237.843.884,00	75,86%	235.754.433,00	81,78%	99%	82%	99%	82%	99%		
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi	3,0%	6%	68.899.594.300,00	6%	68.899.594.300,00	6%	61.739.033.908,00	100,00%	90%	100%	90%	100%	90%		
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang berijin industri	1,6%	1,60%		1,60%		3,41%		213,13%		213%		213%			
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	100,0%	100%	350.776.800,00	100%	350.776.800,00	100%	326.634.900,00	100,00%	93%	100%	93%	100%	93%		
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	46,9%	56,25%	2.005.400.100,00	56,25%	2.005.400.100,00	58,53%	1.752.078.846,00	104,05%	87%	104%	87%	104%	87%		
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Indeks kualitas atraksi pariwisata	80	87,95		87,95		88,75		100,91%		101%		101%			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		2022		2022		2022		(25)		(25)			
					K	Rp	(12)		(18)		(24)		K	Rp	K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang tersertifikasi	32,5%	39,71%	2.315.641.000,00	39,71%	2.315.641.000,00	39,71%	2.106.314.379,00	100,00%	91%	100%	91%	100%	91%		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang tersertifikasi	66,87%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%			
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	1.000.000	2.500.000 - 3.828.845	4.059.279.995,00	2.500.000 - 3.828.845	4.059.279.995,00	7.444.893	3.845.982.333,00	297,80%	95%	298%	95%	298%	95%		
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase realisasi investasi	8,75%	86,02%	1.182.056.263,00		1.182.056.263,00		1.096.780.787,00		93%		93%		93%		
			Nilai Rencana Investasi	359.227.706.890	361.897.752.376		361.897.752.376		9.947.844.681.628		2748,80%		2749%		2749%			
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur	30,0%	95,00%	792.267.040,00	95%	792.267.040,00	103,69%	792.255.292,00	109,15%	100%	109%	100%	109%	100%		
			Persentase Tindak lanjut pengaduan penanaman modal dan perizinan	98,0%	100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100%			
				60,0%	70%													
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah investor yang telah melaporkan LKPM	67,0%	75,00%	588.485.772,00	75,00%	588.485.772,00	99,00%	563.708.740,00	132,00%	96%	132%	96%	132%	96%		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		2022		2022		2022		(25)		(25)			
					K	Rp	(12)		(18)		(24)		K	Rp	K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah sistem informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	92,0%	100,00%	339.104.836,00	100,00%	339.104.836,00	94,12%	337.715.832,00	94,12%	100%	94%	100%	94%	100%		
				100,0%	100%													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											433,37%	95,32%						
Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian:			Sektor Pariwisata: Monitoring evaluasi dilakukan terhadap 41 ODTW baik yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta maupun swasta serta kampung wisata. Penambahan variasi daya tarik pariwisata dilaksanakan melalui berbagai festival diantaranya festival Prawirotaman untuk memperkuat citra Kota Yogyakarta di pasar internasional, Festival Pasar Kembang dan Pagelaran seni Kewilayahan yang dikonsepsikan untuk memperkenalkan budaya Kota Yogyakarta serta event Jogja Creative yang diselenggarakan dengan car free day untuk memperkuat daya tarik Kota Yogyakarta; Sektor Industri Pengolahan: Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui sentra industri yang didukung dengan peningkatan kapasitas pelaku pada tahapan produksi, manajemen dan pemasaran menjadi fokus Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM (Dinas PKU); Sektor Perdagangan: Sektor perdagangan berfokus pada pengembangan pasar tradisional dan kemudahan distribusi barang kebutuhan. Standarisasi Pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat dilakukan untuk Pasar Prawirotaman yang mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) 8152															
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:			Adanya kesenjangan kualitas layanan masing-masing ODTW, terdapat ODTW yang telah memiliki kualitas layanan yang baik, sementara ODTW lain memiliki kualitas layanan yang masih harus ditingkatkan; Permasalahan pengembangan sarana prasarana pendukung kampung wisata; Belum kuatnya branding Kota Yogyakarta secara internasional; Masih kurangnya daya tarik pariwisata pada malam hari.															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kota berikutnya:			Melakukan peningkatan kualitas pengelolaan ODTW melalui workshop pengembangan ekosistem pariwisata dan peningkatan komunikasi dengan industri dan pelaku pariwisata serta pemangku kebijakan; Dalam pengembangan suatu ODTW, pembangunan signage (papan penanda dan penunjuk arah) dapat mengoptimalkan penggunaan tiang rambu-rambu lalu lintas yang sudah ada. Merancang desain pispot secara modular sehingga dapat menyesuaikan dengan keluasan lahan yang tersedia dengan terlebih dahulu melakukan kajian untuk FS (Feasibility Study) dan DED (Detail Engineering Detail; Memperkuat citra budaya Kota Yogyakarta sebagai daya tarik utama pariwisata melalui pelestarian pranata seni, budaya, dan sosial Daerah, menjaga fisik, visualisasi arsitektur dan non arsitektur pada kawasan cagar budaya yang bertujuan menjaga keeseimbangan keestetikan budaya dan kemanfaatan sosial ekonomi masyarakat; Mengkonsepkan penambahan event-event pada malam hari yang ditindaklanjuti dengan pembuatan paket wisata full day yang akan berdampak pada peningkatan LoS (Length of Stay).															

Formulir E.78
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan Tahun 2022

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah: Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun

No	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program PD	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun ke 6		Capaian Target RPJMD Kab/Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun ke 6		Tingkat Capaian Target RPJMD Kab/Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun ke 6 (%)		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
							2022		2022		2022					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(12)		(18)		(24)		(25)		(25)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	75,0%	80,00%	1.880.035.250,00	80%	1.880.035.250,00	81,48%	1.810.518.545,00	101,85%	96%	102%	96%	102%	96%
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi politik masyarakat Kota Yogyakarta dalam Pilkada/Pileg/Pilpres	81,0%	81,00%	1.191.174.308,00	81%	1.191.174.308,00	81%	1.150.565.908,00	100,00%	97%	100%	97%	100%	97%
			Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik	55,7%	61,90%		61,90%		62,54%		101,03%		101%		101%	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta	44,0%	51,50%	475.466.544,00	51,50%	475.466.544,00	51,96%	443.897.257,00	100,89%	93%	101%	93%	101%	93%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembentukan Satgas anti NAPZA	75,0%	80,00%	1.084.325.270,00	80%	1.084.325.270,00	93,94%	1.069.822.155,00	117,43%	99%	117%	99%	117%	99%
			Persentase Penanganan konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya	65,0%	70,00%		70%		84,85%		121,21%		121%		121%	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi wilayah	70,0%	75,00%	1.774.896.548,00	75%	1.774.896.548,00	75,68%	1.731.174.212,00	100,91%	98%	101%	98%	101%	98%
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase lembaga kepemudaan yang berperan aktif	64,1%	100,00%	3.403.704.110,00	100%	3.403.704.110,00	100%	3.296.955.276,00	100,00%	97%	100%	97%	100%	97%

No	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program PD	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun ke 6		Capaian Target RPJMD Kab/Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun ke 6		Tingkat Capaian Target RPJMD Kab/Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun ke 6 (%)		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
							2022		2022		2022					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(12)		(18)		(24)		(25)		(25)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang berperanan aktif	76,3%	100,00%	14.620.873.991,00	100%	14.620.873.991,00	100%	14.024.456.967,00	100,00%	96%	100%	96%	100%	96%
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan	66,3%	95,00%		95,00%	298.000.000,00	90,32%	298.000.000,00	95,07%	100%	95%	100%	95%	100%
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	60,0%	100,00%	19.497.125.363,00	100%	19.497.125.363,00	100%	18.800.310.896,08	100,00%	96%	100%	96%	100%	96%
			Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan	80,0%	100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100%	
			Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	60,0%	100,00%		100%		97%		97,09%		97%		97%	
			Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	57,8%	88,24%		88,24%		91,53%		103,73%		104%		104%	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	155	165	146.877.732	165	146.877.732	124	143.397.732	124,85%	98%	125%	98%	125%	98%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	300	290	67.240.000	290	67.240.000	259	67.190.000	110,69%	100%	111%	100%	111%	100%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	300	275	177.114.932	275	177.114.932	261	176.167.246	105,09%	99%	105%	99%	105%	99%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	50	41	57.165.800	41	57.165.800	40	56.662.500	102,44%	99%	102%	99%	102%	99%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	275	123	74.377.424	123	74.377.424	123	73.901.043	100,00%	99%	100%	99%	100%	99%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	72	70	178.345.424	70	178.345.424	69	177.601.714	101,43%	100%	101%	100%	101%	100%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	60	43	106.244.000	43	106.244.000	42	102.299.750	102,33%	96%	102%	96%	102%	96%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	36	29	106.244.000	29	106.244.000	24	102.299.750	117,24%	96%	117%	96%	117%	96%

No	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program PD	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun ke 6		Capaian Target RPJMD Kab/Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun ke 6		Tingkat Capaian Target RPJMD Kab/Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun ke 6 (%)		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
					2022		2022		2022		2022		2022		2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(12)		(18)		(24)		(25)		(25)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	100	38	65.640.500	38	65.640.500	36	64.843.500	105,26%	99%	105%	99%	105%	99%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	160	157	160.615.000	157	160.615.000	152	160.615.000	103,18%	100%	103%	100%	103%	100%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	96	84	109.371.000	84	109.371.000	82	108.442.200	102,38%	99%	102%	99%	102%	99%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	125	58	74.704.000	58	74.704.000	58	74.227.125	100,00%	99%	100%	99%	100%	99%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	144	72	159.559.500	72	159.559.500	51	159.423.500	129,17%	100%	129%	100%	129%	100%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda	24	24	320.102.500	24	320.102.500	25	320.094.000	95,83%	100%	96%	100%	96%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											104,97%	98,11%				
Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian:			<p>Strategi Penegakan Perda secara Represif Yustisi: Represif salah satu sifat dalam sistem pengendalian sosial. Tindakan represif biasanya berbentuk tekanan, kekangan, atau penindasan. Sedangkan pengendalian sosial sendiri adalah suatu proses atau kontrol terhadap kemungkinan penyimpangan sosial. Represif ini adalah tindakan yang kerap diambil untuk menindak pelanggaran. Dengan tindakan represif, penyimpangan akan terkontrol dan berkurang. Upaya represif ini dilakukan dengan cara Penegakan Perda dan Perwal Kota Yogyakarta secara yustisi dan non yustisi;</p> <p>Strategi Penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Peraturan Perundang-undangan lainnya secara Represif Non yustisi: Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan suatu hal negatif agar hal buruk tersebut tidak terjadi. Dalam perspektif pengendalian sosial, preventif adalah tindakan untuk mencegah pelanggaran sosial. Tindakan preventif sangat penting karena bisa menghindarkan kita dari akibat buruk yang fatal. Upaya ini dilakukan dengan cara deteksi dan cegah dini, pengamanan, dan monitoring tertutup kegiatan masyarakat yang berpotensi konflik horizontal maupun vertikal serta indikasi terjadinya pelanggaran peraturan;</p> <p>Strategi penegakan perda secara preemtif melalui Gerakan Panca Tertib: Upaya preemtif yaitu berupa ajakan kepada masyarakat untuk berperan serta aktif dalam penegakkan Perda. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.</p>													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:			Adanya pemasangan reklame yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah (Perda) No.2/2015 yaitu non yustisi sebanyak 2.168 dan yustisi sebanyak 123.													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kota berikutnya:			Secara non-yustisi petugas melakukan penindakan dengan peringatan, pembongkaran atau henti fungsi; Untuk yustisi melalui persidangan karena tidak berizin.													

Formulir E.78
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan Tahun 2022

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah: Kualitas pendidikan meningkat

No	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program PD	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun ke 6		Capaian Target RPJMD Kab/Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun ke 6		Tingkat Capaian Target RPJMD Kab/Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun ke 6 (%)		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)		
							2022		2022		2022						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(12)		(18)		(24)		(25)		(25)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	Kualitas pendidikan meningkat	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SD terakreditasi A	82,0%	92,12%	227.475.445.871,00	92,12%	227.475.445.871,00	92,12%	215.024.740.652,06	100,00%	95%	100%	95%	100%	95%	
			Jumlah prestasi siswa SD Tingkat Nasional	6 medali	3-8 medali		3-8 medali		3 medali		100,00%		100%		100%		
			Persentase SMP akreditasi A	74,0%	77,59%		77,59%		77,19%		99,49%		99%		99%		
			Jumlah prestasi siswa SMP Tingkat Nasional	3 medali	6 medali		6 medali		5 medali		83,33%		83%		83%		
			Persentase Kelulusan warga belajar	90,5%	96,15%		96,15%		100,00%		104,00%		104%		104%		
			Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	20 lbg	60		60		78		130,00%		130%		130%		
			Jumlah LKP terakreditasi	5 lbg	14		14		13		92,86%		93%		93%		
			Jumlah sekolah inklusi	41 Sekolah	95		95		100		105,26%		105%		105%		
			Persentase guru sesuai kualifikasi	92,37%	95-99,75%		95-99,75%		93,68%		98,61%		99%		99%		
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah perpustakaan yang telah dibina	50	300	1.200.584.463,00	300	1.200.584.463,00	300	1.199.327.176,00	100,00%	100%	100%	100%	100%
			Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	75	78		78,00		81,93		105,04%		105%		105%		
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	1.000	1.300	42.262.810,00	1.300	42.262.810,00	2.056	42.148.565,00	158,15%	100%	158%	100%	158%	100%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											106,40%	98,05%					
Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian:			Terpeliharanya dan terpenuhinya kebutuhan bangunan, gedung, dan sarana prasarana pendidikan, baik dengan optimalisasi Dana Alokasi Khusus/DAK yang berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik) maupun yang bersumber dari APBD untuk semua jenjang PAUD, SD, dan SMP; Kelembagaan dan sarpras pendidikan masyarakat dan PAUD Penjaminan kualitas mutu layanan pendidikan di lakukan melalui pendampingan akreditasi Lembaga PAUD; Adanya bimtek perencanaan berbasis data dengan pemanfaatan platform rapat pendidikan untuk guru dan kepala sekolah, pelatihan tingkat dasar penanganan pencegahan stunting dilakukan untuk guru dan uji kompetensi pendidik PAUD; Pembinaan PKBM secara rutin melalui pendamping Jam Belajar Masyarakat/ JBM, petugas JBM diberikan ketugasan lain untuk mendata anak putus sekolah/anak usia sekolah yang														
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:			Sistem Informasi Pendidikan (SIDIDIK) masih memiliki kendala yaitu belum bisa memilah siswa penduduk kota dan siswa penduduk luar kota yang bersekolah di Kota Yogyakarta dan upload data masih manual oleh operator sididik di sekolah; Adanya kecenderungan guru dalam memberikan layanan														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kota berikutnya:			Penambahan fitur sinkronisasi data antara server sididik dengan aliran data dari pusdatin untuk memilah data dilakukan sebagai exit strategi sekaligus inovasi yang perlu dikembangkan; Strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala yang ada antara lain dengan melakukan kerja sama denga														

Formulir E.78
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan Tahun 2022

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah: Harapan hidup masyarakat meningkat

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(12)		(18)		(24)		(25)		(25)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8	Harapan hidup masyarakat meningkat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	100,0%	100%	94.754.783.760,00	100%	94.754.783.760,00	100%	92.487.515.807,00	100,00%	98%	100%	98%	100%	98%		
			Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	100,0%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%			
			Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	100,0%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%			
			Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,0%	100%		100%		88%		88,03%		88%		88%			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,0%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%			
			Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100,0%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%			
			Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	85,0%	96,50%		96,50%		96,53%		100,03%		100%		100%			
			Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan	85,2%	90%		90,00%		92,60%		102,89%		103%		103%			
			Persentase Institusi yang melaksanakan UKK	60,0%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%			
			Indeks kepuasan layanan kesehatan Puskesmas	77	81		81		83,62		103,23%		103%		103%			
			Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	65	77		77		82,75		107,47%		107%		107%			
			Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100,0%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		2022		2022		2022		(25)		(25)	
					K	Rp	(12)		(18)		(24)		(25)		(25)	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN	88,0%	100%		100%		100%		99,97%		100%		100%	
			Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang terakreditasi	79,5%	87,18%		87,18%		94,44%		108,33%		108%		108%	
			Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan	91,0%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%	
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan	100,0%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%	
			Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar	80,0%	90%		90%		100%		111,11%		111%		111%	
			Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100,0%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%	
			Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs	100,0%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%	
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100,0%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%	
			Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100,0%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%	
			Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrening kesehatan sesuai standar	100,0%	100%		100%		87%		87,13%		87%		87%	
			Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,0%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%	
			Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,0%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%	
			Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	100,0%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		2022		2022		2022		(25)		(25)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100,0%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%			
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan yang berijin	70,0%	90%	12.718.245.074,00	90%	12.718.245.074,00	100%	20.524.774.619,00	110,56%	161%	111%	161%	111%	161%		
			Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	80,0%	96%		96%		100%		104,17%		104%		104%			
			Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar	60,0%	80%		80%		89%		111,11%		111%		111%			
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat	55,0%	96%	300.413.000,00	96%	300.413.000,00	99%	278.301.800,00	102,66%	93%	103%	93%	103%	93%		
			Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	95,0%	98%		98%		99%		100,51%		101%		101%			
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	85,0%	95%		95,00%		97,61%		102,75%		103%		103%			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR	364	476	178.334.000,00	476	178.334.000,00	476	175.425.800,00	100,00%	98%	100%	98%	100%	98%		
			Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	22,0%	78%		77,80%		84,44%		108,53%		109%		109%			
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun	25,0%	60%	94.754.783.760,00	60%	94.754.783.760,00	69,42%	92.487.515.807,00	115,70%	98%	116%	98%	116%	98%		
			Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan	76,7%	82%		82,00%		86,24%		105,17%		105%		105%			
			Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (<i>Integrated Health System</i>)	16	26		26		28		107,69%		108%		108%			
			Presentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal	80,0%	80%		80%		80%		100,04%		100%		100%			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		2022		2022		2022		(25)		(25)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	CBR (Crude Birth Rate)	11-10 CBR	11-10 CBR	379.235.110,00	11-10 CBR	379.235.110,00	6,03	377.866.700,00	139,70%	100%	140%	100%	140%	100%
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	11,40%	11%	1.961.694.440,00	11,10%	1.961.694.440,00	11,09%	1.830.183.418,00	100,09%	93%	100%	93%	100%	93%
			CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73,66%	74%		74,00%		74,04%		100,05%		100%		100%	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	27,15%	34%	2.158.409.120,00	34,00%	2.158.409.120,00	34,74%	2.111.736.140,00	102,18%	98%	102%	98%	102%	98%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											102,84%	104,80%				
Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian:			Jumlah fasilitas kesehatan untuk pertolongan persalinan yang memadai, PSC Yes 119 yang dapat diakses masyarakat untuk penanganan kegawatan maternal neonatal; Pendampingan pemantauan pertumbuhan oleh petugas daerah binaan. Sarana dan prasarana yang memadai (alat antropometri yang sesuai standar). Pelaksanaan mobile posyandu dan posyandu konvensional dengan kedatangan balita terjadwal (sesuai dgn kondisi kasus covid di wilayah). Validasi data dan tindak lanjut oleh petugas, edukasi online, peran dari tokoh masyarakat, PKK, pejabat wilayah setempat; Dukungan kegiatan mobile xray dari ZeroTB Yogyakarta dalam penemuan aktif/ active case finding (ACF) dan skrining gejala TB baik di wilayah maupun populasi tertentu (sekolah, Ponpes); Adanya intervensi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) sehingga dapat menjangkau penderita hipertensi dan skrining PTM di Posbindu; Adanya aplikasi yang terintegrasi di perijinan mempermudah pemohon untuk mengajukan sertifikat Surat Ijin Praktek (SIP) nakes, hotel dan restoran laik sehat													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:			Sosial Determinan yang mempengaruhi Kematian ibu dan bayi di Kota Yogyakarta diantaranya status pernikahan, beberapa kasus kematian ibu maupun bayi mempunyai latar belakang pernikahan yang tidak sah, hamil diluar nikah, hamil tidak dikehendaki yang tentunya hal ini sangat mempengaruhi dalam perawatan kehamilan; Penerima informasi kesehatan merupakan masyarakat dengan berbagai tingkatan usia, pendidikan, pekerjaan dan kepercayaan; Belum terselenggaranya survei efektivitas media promosi kesehatan yang diberikan kepada masyarakat													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kota berikutnya:			Pemanfaatan dana BOK untuk mendekatkan akses layanan kesehatan Ibu Anak melalui kegiatan kunjungan rumah, kelas ibu hamil dan kelas ibu balita di wilayah, bekerjasama dengan PKK dan Kader dalam pendampingan ibu hamil, peningkatan pemanfaatan buku KIA untuk pemantauan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Peningkatan kualitas ANC dengan Skrining / pemeriksaan oleh dokter di TM I dan TM III dengan dilakukan USG Obstetri terbatas oleh dokter umum di puskesmas; Informasi kesehatan dikemas dalam bentuk yang beranekaragam dengan bahasa yang menarik. Seperti infografis yang dimuat dalam media sosial (instagram / Whatsapp) atau video iklan layanan masyarakat (youtube). Siaran interaktif melalui radio dan televisi. Juga sosialisasi dengan mobil keliling yang dapat didengar langsung oleh seluruh masyarakat di wilayah mobil keliling beroperasi; Bekerja sama dengan akademisi untuk melakukan survey efektivitas media promosi kesehatan yang telah diberikan kepada masyarakat.													

Formulir E.78
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan Tahun 2022

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah: Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya masyarakat

No	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program PD	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun ke 6		Capaian Target RPJMD Kab/Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun ke 6		Tingkat Capaian Target RPJMD Kab/Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun ke 6 (%)		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
							2022		2022		2022					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(12)		(18)		(24)		(25)		(25)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
9	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan	3 dokumen	18 dokumen	33.568.248.279,00	18 dokumen	33.568.248.279,00	18 dokumen	32.769.808.016,00	100,00%	98%	100%	98%	100%	98%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pelestarian Kebudayaan berbasis Kelurahan	60,0%	62%		62%		69%		110,97%		111%		111%	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Rasio Kegiatan Kesenian Tradisional berbasis Wilayah	471,4%	5,14		5,14		5,14		100,00%		100%		100%	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase BCB yang dilestarikan	52,0%	72%		72%		72%		100,00%		100%		100%	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	21,4%	42,85%		42,85%		42,85%		100,00%		100%		100%	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Tingkat Pengenalan Masyarakat terhadap Museum	78,0%	81%		81%		81%		100,31%		100%		100%	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton	79,0%	81%		81%		86%		105,65%		106%		106%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2022		2022		2022		(25)		(25)			
					(6)		(12)		(18)		(24)		K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		PROGRAM PEGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pengunjung Taman Budaya	172.000	600.000	2.808.264.672,00	600.000	2.808.264.672,00	717.837	2.538.500.747,00	119,64%	90%	120%	90%	120%	90%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											104,57%	94,01%				
Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian:			<p>Klasifikasi Rintisan Kelurahan Budaya: Kegiatan ini merupakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Rintisan Kelurahan Budaya di Kota Yogyakarta dengan tujuan untuk mengetahui taraf perkembangan RKB (maju, berkembang, tumbuh) serta mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya di wilayah;</p> <p>Akreditasi Rintisan Kelurahan Budaya: Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi budaya serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya di wilayah (kelurahan) yang belum ditetapkan menjadi Rintisan Kelurahan Budaya, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan RKB baru;</p> <p>Gelar Budaya RKB;</p> <p>Sekar Rinonce: Sekar Rinonce Malioboro merupakan kegiatan pentas budaya yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta pada hari Selasa dan Sabtu Malam yang dimulai pada tanggal 30 Agustus – 27 Desember 2022;</p> <p>Gelar Budaya Jogja: Salah satu Kegiatan Gelar Budaya Jogja merupakan kegiatan fasilitasi pengiriman misi kesenian (kontingen) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam ajang kompetisi kesenian antar Kabupaten/Kota se-DIY sejalan dengan program kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY;</p> <p>Festival Jogja Kota: Dalam rangka pelestarian, pembinaan dan pengembangan kebudayaan, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta akan menyelenggarakan FESTA (Festival Jogja Kota) Tahun 2022 yang diselenggarakan di Embung Giwangan Kota Yogyakarta. FESTA Tahun 2022 menampilkan seni pertunjukan beserta potensi wilayah kolaborasi masyarakat antar Kemantren se Kota Yogyakarta yang terklasterisasi dalam Kawasan Cagar Budaya (KCB);</p> <p>Rumaket: Rumaket merupakan wadah/ruang masyarakat pelestari Warisan Budaya Takbenda yang ada di Kota Yogyakarta khususnya untuk saling bertemu, saling bersosialisasi, saling bertukar pikiran dan berkolaborasi dalam rangka mengembangkan dan melestarikan Warisan Budaya Takbenda;</p> <p>Festival Sastra: Festival Sastra Yogyakarta tahun 2022 dengan mengusung tema mulih/pulang/kembali merupakan ruang temu bagi sastrawan Kota Yogyakarta, serta menjalin keragaman sastra, baik sastra Jawa, Indonesia, yang tumbuh dan besar di Kota Yogyakarta, dalam satu wadah yang mampu menampung berbagai bentuk dan media sastra serta lingkungan pendukungnya.</p>													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:			Adanya Pandemi Covid-19 yang meningkat kasusnya pada pertengahan tahun sehingga kegiatan sosial budaya tidak dapat terlaksana sesuai dengan tatakala sehingga kegiatan yang bersifat pengumpulan massa dibatalkan dan perubahan konsep kegiatan													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kota berikutnya:			Kegiatan yang bersifat pentas, festival dilaksanakan secara daring dan luring (hybrid) serta dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dengan melihat perkembangan situasi perkembangan covid 19 serta mengoptimalkan pemanfaatan social media, sebaga sarana promosi kegiatan event budaya dan juga sebagai media pertunjukan secara Daring, dengan pengemasan yang lebih inovatif													

Formulir E.78
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan Tahun 2022

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah: Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat

No	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program PD	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun ke 6		Capaian Target RPJMD Kab/Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun ke 6		Tingkat Capaian Target RPJMD Kab/Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun ke 6 (%)		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
							2022		2022		2022					
							(6)		(12)		(18)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(25)	K	Rp	
10	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	52,3%	88%	1.717.180.200,00	88,48%	1.717.180.200,00	88,48%	1.671.066.800,00	100,00%	97%	100%	97%	100%	97%
			Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	43,5%	75%		75,45%		75,45%		100,00%		100%		100%	
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase penerbitan Izin Lokasi	100,0%	100%	8.038.000,00	100%	8.038.000,00	100%	7.715.300,00	100,00%	96%	100%	96%	100%	96%
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan keberatan terhadap permasalahan tanah di Kota Yogyakarta	100,0%	100%	446.450.000,00	100%	446.450.000,00	100%	196.533.000,00	100,00%	44%	100%	44%	100%	44%
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan pertanahan	92,0%	100%	17.271.047.964,00	100%	17.271.047.964,00	99,22%	918.767.136,00	99,22%	5%	99%	5%	99%	5%
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot	29,4%	100%	788.203.920,00	100%	788.203.920,00	101%	718.515.242,00	101,26%	91%	101%	91%	101%	91%
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Kejelasan Batas wilayah antar Kabupaten dan Kota, antar kecamatan dan antar kelurahan	93,3%	93,33%	59.611.260,00		59.611.260,00		53.894.260,00		90%		90%		90%
			Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara.	75,0%	100%		100%		140%		140,00%		140%		140%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											105,78%	70,70%				
Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sedang				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2022		2022		2022		(25)		(25)			
					(6)		(12)		(18)		(24)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					<p>Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian:</p> <p>Diterbitkannya Peraturan Daerah No. 2 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencabut Peraturan Daerah No. 2 tahun 2010 dan Perwal No. 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041; Penyempurnaan Sistem Informasi Tata Ruang (SITARU) yaitu sistem aplikasi mengenai zonasi, pola ruang, dan struktur ruang yang bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui handphone berbasis android dan komputer sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui aturan tata ruang di suatu lokasi; Penetapan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Reklame sebagai tindak lanjut ditemukannya sejumlah indikasi pelanggaran terhadap peraturan sebelumnya; Tersusunnya Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang sesuai peraturan terbaru, yaitu Perwal No. 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 yang memengaruhi capaian persentase hasil kesesuaian pemanfaatan ruang; Terlaksananya pelaksanaan pengawasan penataan ruang yang mengacu pada Perwal No. 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041; Adanya Forum Penataan Ruang Daerah yang terkait dengan kebijakan lintas OPD</p>											
					<p>Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:</p> <p>Sosialisasi yang dilaksanakan masih belum begitu efektif, sehingga diperlukan adanya inovasi cara mensosialisasikan peraturan-peraturan terbaru; Masih terdapat titik yang belum dapat disimulasikan pada Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang; Diperlukan review target yang akan dicapai dalam 5 tahunan disesuaikan dengan aturan terbaru dalam Evaluasi Pemanfaatan Ruang; Belum ada penentuan target dalam pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang; Belum adanya Tematik untuk pelaksanaan audit tata ruang; Belum adanya Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Peraturan terbaru.</p>											
					<p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kota berikutnya:</p> <p>Pelaksanaan sosialisasi peraturan dan kebijakan tata ruang Kota Yogyakarta yang dilakukan dengan diseminasi dan juga dilakukan secara interaktif dengan lomba dan festival. Sasaran sosialisasi ini adalah Perangkat Daerah dan masyarakat umum; Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang dengan menggunakan aplikasi gatramatra.jogjakota.go.id. Gapura Aksesibilitas Terintegrasi Pemanfaatan (Gatra Matra Jogja) ini merupakan media informasi yang utuh dan mudah diakses oleh masyarakat terkait ketentuan tata ruang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041. Gatra Matra ini merupakan layanan dengan berbasis persil yang di dalamnya memuat fitur Pelayanan Informasi Kesesuaian Tata Ruang (IKTR); Evaluasi Pemanfaatan Ruang (pengkajian kesesuaian eksisting dengan peraturannya) dilakukan dengan cara menambah jumlah titik pengamatan yang diawasi dan disesuaikan dengan aturan baru yang berlaku. Selain itu, dilakukan pula pergantian titik pengawasan setiap tahunnya yang disesuaikan dengan peraturan terbaru, untuk selanjutnya dilakukan overlay dengan peta hasil pengamatan tahun sebelumnya; Pada masa transisi pasca penetapan Perda Reklame Nomor tahun 2022, dibutuhkan petunjuk pelaksanaannya. Sebanyak 152 titik reklame yang terindikasi melakukan pelanggaran merupakan reklame yang tidak berizin. Reklame yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terkait lokasinya berada di trotoar dan rumija, sehingga tidak memiliki sertifikat untuk pengajuan izinnya. Penegakan indikasi pelanggaran reklame tidak harus dilakukan dengan surat penugasan pembongkaran dari walikota karena terdapat pelimpahan kewenangan dari walikota kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</p>											

Formulir E.78
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan Tahun 2022

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah: Kualitas lingkungan hidup meningkat

No	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program PD	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPД Kab/Kota Tahun ke 6		Capaian Target RPJMD Kab/Kota Melalui Pelaksanaan RKPД Tahun ke 6		Tingkat Capaian Target RPJMD Kab/Kota Hasil Pelaksanaan RKPД Kab/Kota Tahun ke 6 (%)		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
							2022		2022		2022					
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(12)		(18)		(24)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
11	Kualitas lingkungan hidup meningkat	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi	11,1%	37,78%	409.339.733,00	37,78%	409.339.733,00	53,33%	407.562.718,00	141,16%	100%	141%	100%	141%	100%
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	49,2%	80,61%	1.869.694.830,00	80,61%	1.869.694.830,00	76,18%	1.794.831.607,00	94,50%	96%	95%	96%	95%	96%
			Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	5,7%	15,28%		15,28%		14,37%		94,04%		94%		94%	
			Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan.	23,6%	46,04%		46,04%		56,19%		122,05%		122%		122%	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah berwawasan lingkungan.	78,9%	100,00%	1.736.791.588,00	100%	1.736.791.588,00	130%	1.686.989.965,00	130,00%	97%	130%	97%	130%	97%
			Persentase Kampung berwawasan lingkungan	52,9%	100,00%		100%		56%		56,21%		56%		56%	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	41,58%	43,22%	9.118.015.136,00	43,22%	9.118.015.136,00	30,40%	9.029.582.527,00	70,34%	99%	70%	99%	70%	99%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		2022		2022		2022		(25)		(25)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik	66,31	73,81		73,81		78,28		106,06%		106%		106%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											101,79%	97,93%				
Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian:			Bekerja sama dengan Laboratorium pengujian kualitas air dan tenaga ahli dalam menganalisa hasil pengujian sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kota Yogyakarta; Pemantauan kualitas air dilakukan dari 4 sungai yang ada di wilayah Kota Yogyakarta, yaitu sungai Code, Winongo, Gajah Wong dan Manunggal. Lokasi pemantauan di Sungai Winongo terdiri atas 5 titik pantau, yaitu di Pondok Bener, Jembatan Peta, Jembatan Serangan, Jembatan Tamansari, dan Jembatan Prapanca. Lokasi pemantauan di Sungai Code dilakukan di 5 titik pantau, yaitu Jembatan Petinggen, Jembatan Gondolayu, Jembatan Sayidan, Jembatan Tungkak, dan Perumahan Wirosaban. Lokasi pemantauan kualitas air di Sungai Manunggal terdiri atas 4 titik pantau, yaitu di Jembatan Iromejan, Jembatan Mangkukusuman, Jembatan Kusumanegara, dan Jembatan Menteri Supeno. Lokasi pemantauan di Sungai Gajahwong terdiri dari 5 lokasi pantau, yaitu di sebelah SMA Santo Thomas, Jembatan Balirejo, Jembatan Gambiraloka, Kampung Logatok, dan Jembatan Tegal Gendu; Adanya alat pemantau kualitas udara secara real time (AQMS), sehingga memudahkan pemantauan kualitas udara secara real time; Dapat dibangun RTH pada area permukiman meskipun dengan kondisi lahan yang terbatas; RTHP di Kota Yogyakarta masih harus ditingkatkan lagi luasan dan kualitasnya; RTHP memiliki banyak manfaat untuk kepentingan kegiatan kemasyarakatan													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:			Masih terjadi pembuangan sampah dan limbah ke sungai, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai; Berkurangnya jumlah parameter dan titik sampling kualitas air tanah yang dapat diuji sendiri; Keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kota Yogyakarta, penanaman pohon merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan; Berkurangnya jumlah parameter pengujian kualitas udara yang dapat diuji sendiri sehingga tidak dilaksanakan pengujian udara ambien roadside dan permukiman													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kota berikutnya:			Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktifitas yang menambah beban pencemaran air sungai; Titik sampling kedepan akan terus diperbanyak agar data yang didapatkan semakin mewakili kondisi riil kualitas air tanah di kota Yogyakarta; Membangun RTHP baru dan menambah kerapatan tanaman perindang yang ada di Kota Yogyakarta sebagai upaya untuk mengurangi polusi udara perkotaan; Analisa hasil dapat lebih mewakili kondisi riil kualitas udara di kota Yogyakarta													

Formulir E.78
Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD
Kota Yogyakarta
Periode Pelaksanaan Tahun 2022

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah: Infrastruktur wilayah meningkat

No	Sasaran Daerah	Program	Indikator Program PD	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target pada Akhir Tahun Perencanaan		Target RPJMD Kabupaten/Kota pada RKPD Kab/Kota Tahun ke 6		Capaian Target RPJMD Kab/Kota Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun ke 6		Tingkat Capaian Target RPJMD Kab/Kota Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun ke 6 (%)		Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Rasio Capaian Akhir (%)	
							2022		2022		2022					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(12)		(18)		(24)		(25)		(25)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
12	Infrastruktur wilayah meningkat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	73,0%	91,74%	4.562.157.050,00	91,74%	4.562.157.050,00	92,28%	4.056.251.474,40	100,59%	89%	101%	89%	101%	89%
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	90,7%	87,97 - 93,54	7.030.489.520,00	87,97 - 93,54	7.030.489.520,00	87,62%	6.546.560.302,14	99,60%	93%	100%	93%	100%	93%
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	86,0%	91,00%	15.068.118.260,00	91%	15.068.118.260,00	91%	14.799.789.537,88	100,18%	98%	100%	98%	100%	98%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	82,0%	92,00%	45.335.640.040,00	92%	45.335.640.040,00	96,88%	42.955.703.484,54	105,30%	95%	105%	95%	105%	95%
			Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	21,0%	70,00%		70,00%		70,53%		100,76%		101%		101%	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Prosentase tenaga kerja trampil	67,47%	80,86%	390.842.000,00	80,86%	390.842.000,00	80,99%	384.075.322,00	100,16%	98%	100%	98%	100%	98%
			Persentase peningkatan kapasitas asosiasi jasa konstruksi	12,0%	24,00%		24%		33,68%		140,33%		140%		140%	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	83,22%	87,62%	6.670.223.768,00	87,62%	6.670.223.768,00	91,06%	6.455.929.363,40	103,92%	97%	104%	97%	104%	97%
			Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	30,0%	50,00%		50%		50%		100,00%		100%		100%	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		2022		2022		2022		(25)		(25)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	15,1%	15,26%		15,26%		15,40%		100,92%		101%		101%			
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	91,8%	98,00%	12.094.614.000,00	98,00%	12.094.614.000,00	97,25%	12.007.691.355,00	99,23%	99%	99%	99%	99%	99%		
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	90,0%	95,00%	2.037.673.357,00	95%	2.037.673.357,00	101%	2.005.241.918,76	106,71%	98%	107%	98%	107%	98%		
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	71,57%	82,89%	5.442.078.000,00	82,89%	5.442.078.000,00	81,14%	5.367.877.460,00	97,89%	99%	98%	99%	98%	99%		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	12,0%	26,00%	38.355.422.886,00	26,00%	38.355.422.886,00	21,65%	37.819.576.921,00	83,27%	99%	83%	99%	83%	99%		
			Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	6861,0%	76,11		76,11		78,33		102,92%		103%		103%			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)	20 km/jam	25	9.899.941.808,00	25	9.899.941.808,00	32,27	9.560.049.915,00	129,08%	97%	129%	97%	129%	97%		
			Persentase Juru Parkir yang tertib	97,0%	97,45%		97,45%		97,47%		100,02%		100%		100%			
			Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	80,0%	93,89%		93,89%		94,12%		100,24%		100%		100%			
			Jumlah Pelanggaran	500	470		470		540		114,89%		115%		115%			
			Persentase Angkutan Umum dan Barang yang laik jalan	90%	91,50%		91,50%		86,15%		94,15%		94%		94%			
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kampung tangguh bencana	40,0%	85,80%	9.303.005.227,00	85,80%	9.303.005.227,00	85,80%	8.771.864.717,00	100,00%	94%	100%	94%	100%	94%		
			Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	75,0%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2022		2022		2022		(25)		(25)			
					(6)		(12)		(18)		(24)		(25)		(25)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi	80,0%	100%		100%		100%	100,00%		100%		100%		
		PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	95,0%	100%	8.910.295.310,00	100%	8.910.295.310,00	100%	8.143.501.276,00	100,00%	91%	100%	91%	100%	91%
			Persentase edukasi proteksi kebakaran	95,0%	98%		98%		100%		102,04%		102%		102%	
			Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit	100,0%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%	
			Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota	100,0%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%	
			Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	100,0%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										102,94%	95,94%					
Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

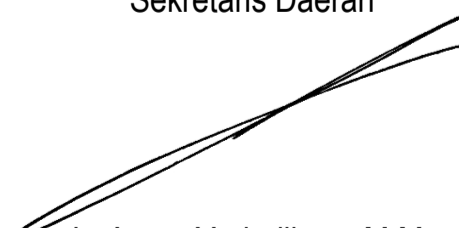
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		2022		2022		2022		(25)		(25)	
					(12)		(18)		(24)		(25)		(25)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81	81		81		81,41		100,51%		101%		101%	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	91,0%	92,40%	505.803.949,00	92,40%	505.803.949,00	97,12%	504.869.215,00	105,11%	100%	105%	100%	105%	100%
			Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan	100,0%	100%		100%		100%		100,00%		100%		100%	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia	91,0%	92,40%	1.610.853.123,00	92,40%	1.610.853.123,00	97,69%	1.606.435.800,00	105,73%	100%	106%	100%	106%	100%
			Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam	91,0%	92,40%		92,40%		98,17%		106,25%		106%		106%	
			Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan	91,0%	92,40%		92,40%		95,86%		103,75%		104%		104%	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	80,0%	90,00%	1.155.509.609,00	90%	1.155.509.609,00	90%	1.150.295.710,00	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100,0%	100,00%		100%	55.578.273.857,00	100%	4.121.776.978,00	100,00%	7%	100%	7%	100%	7%
			Persentase penyerapan belanja daerah	92,5%	88.50% - 92.90%		88.50% - 92.90%		92,49%		104,51%		105%		105%	
			Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	75,0%	97,56%		97,56%		97,56%		100,00%		100%		100%	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	90,0%	94%	8.394.651.336,00		8.394.651.336,00		7.115.517.702,00		85%		85%		85%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		2022		2022		2022		(25)		(25)	
					(12)		(18)		(24)		(25)		(25)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang kategori baik	87,8%	90,24%		90,24%		90,24%		100,00%		100%		100%	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian	100,0%	100,00%	2.768.573.959,00	100,00%	2.768.573.959,00	100,00%	2.712.440.826,00	100,00%	98%	100%	98%	100%	98%
			Nilai Tunggal Pajak Daerah Terbayar	16.000.000.000	16.550.000.000		16.550.000.000		24.022.276.340		145,15%		145%		145%	
			Nilai pendapatan Pajak Daerah	324.060.500.000	379.411.600.000		379.411.600.000		482.269.519.901		127,11%		127%		127%	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	80,0%	91,00%	225.394.440,00	91%	225.394.440,00	100%	217.359.617,00	109,89%	96%	110%	96%	110%	96%
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	80,0%	91,00%		91%		100%		109,89%		110%		110%	
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Sarana dan Prasarana	80,0%	91,00%		91%		100%		109,89%		110%		110%	
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	80,0%	91,00%		91%		100%		109,89%		110%		110%	
			Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	83,0%	91,00%		91%		100%		109,89%		110%		110%	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 2 (untuk 6 elemen penilaian)	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	410.883.800,00	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	410.883.800,00	level 3 (untuk 6 elemen penilaian)	393.224.440,00	100,00%	96%	100%	96%	100%	96%
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	70,0%	88,11%	3.356.456.360,00	88,11%	3.356.456.360,00	113,22%	2.579.030.394,00	128,50%	77%	129%	77%	129%	77%
			Persentase pelayanan kesejahteraan pegawai	92,0%	97,00%		97%		100%		103,09%		103%		103%	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	91,0%	100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100%	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75,0%	95,02%	6.821.386.778,00	95,02%	6.821.386.778,00	98,48%	6.636.841.356,00	103,65%	97%	104%	97%	104%	97%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		2022		2022		2022		(25)		(25)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	99,5%	99,80%	1.191.762.128,00	99,80%	1.191.762.128,00	99,84%	1.165.986.596,00	100,04%	98%	100%	98%	100%	98%		
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	80,0%	100,00%	547.111.450,00	100,00%	547.111.450,00	100,00%	538.407.084,00	100,00%	98%	100%	98%	100%	98%		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	50,00%	100,00%	797.185.320,00	100%	797.185.320,00	100%	773.956.670,00	100,00%	97%	100%	97%	100%	97%		
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	26 perangkat daerah /unit kerja	152	422.676.884,00	152	422.676.884,00	152	421.123.936,00	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%		
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	200	1000	49.291.200,00	1000	49.291.200,00	1000	49.171.560,00	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase administasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	100,0%	100,00%	31.299.484.805	100%	31.299.484.805	100%	30.312.997.283	100,00%	97%	100%	97%	100%	97%		
			Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan	100,0%	100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100%			
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase produk hukum yang diselesaikan	100,0%	100,00%	34.251.011.630,00	100%	34.251.011.630,00	100%	28.285.407.345,00	100,00%	83%	100%	83%	100%	83%		
			Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100,0%	100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100%			
			Persentase kepesertaan bimtek anggota Dewan	100,0%	100,00%		100%		95%		94,69%		95%		95%			
			Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPR dan kelompok pakar yang diselesaikan	100,0%	100,00%		100%		80%		80,00%		80%		80%			
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam	94,0%	98,14%	3.260.859.246,00	98,14%	3.260.859.246,00	98,52%	3.243.704.238,00	100,39%	99%	100%	99%	100%	99%		
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	19,9%	71,93%	19.154.436.752,00	71,93%	19.154.436.752,00	135,84%	18.572.897.576,00	188,85%	97%	189%	97%	189%	97%		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		2022		2022		2022		(25)		(25)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	57,3%	100,00%		100,00%		107,10%		107,10%		107%		107%			
			Persentase Kelancaran Pelayanan Pemeliharaan Sarana Telekomunikasi	100,0%	100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100%			
			Persentase pelayanan dan pengawasan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan informasi	90,0%	100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100%			
			Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	100,0%	100%													
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	100,0%	100,00%	182.714.304,00	100%	182.714.304,00	100%	180.207.790,00	100,00%	99%	100%	99%	100%	99%		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pengamanan informasi	100,0%	100,00%	489.480.710,00	100%	489.480.710,00	100%	485.766.245,00	100,00%	99%	100%	99%	100%	99%		
			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	19,0%	80,00%		80%		100%		125,00%		125%		125%			
			Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	100,0%	100,00%		100%		100%		100,00%		100%		100%			
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		105,32%	92,27%				
											Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian:			Komitmen Kepala Daerah dalam meningkatkan kualitas manajemen kinerja; Komitmen seluruh elemen dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih; Evaluasi kelembagaan secara berkala untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi mendukung kinerja kepala daerah; Penyusunan peraturan perundangan yang update dan sesuai kebutuhan; Semakin bertumbuhnya inovasi pada perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas layanan dan fokus dalam pencapaian kinerja; Pemanfaatan e-government dalam kerangka besar Jogja Smart Services untuk mendukung pelayanan publik															
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:			Belum membudayanya penyusunan anggaran berbasis kinerja, sehingga masih dijumpai kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap pencapaian outcome; Kurang sinergisnya pelaksanaan kegiatan antar perangkat daerah dalam mewujudkan target IKU kepala daerah															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD kota berikutnya:			Akan dilaksanakan dialog kinerja antara kepala perangkat daerah dengan kepala daerah agar seluruh perangkat daerah memahami dukungan masing-masing terhadap pencapaian IKU kepala daerah; Cross cutting program dan kegiatan sebagai implementasi proses bisnis dan pohon kinerja juga terus ditingkatkan agar tercipta kolaborasi yang harmonis antar perangkat daerah dalam mewujudkan kinerja pembangunan seperti yang tertuang dalam dokumen perencanaan															

Yogyakarta, 28 Februari 2023
a.n. Walikota Yogyakarta
Sekretaris Daerah


Ir. Aman Yuriadjaya, M.M.
NIP 19651213 199203 1 006

No	Uraian	K	R	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Persentase website sebagai informasi yang diupdate	57,5%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase Kelancaran Pelayanan Pemeliharaan Sarana Telekomunikasi	100,0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase pelayanan dan pengawalan unit penyelenggaraan telekomunikasi dan informasi	90,0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase Kelancaran Pada Hubungan Komunikasi Band Antar Perangkat Daerah	100,0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISITIK SEKTORAL	Persentase pembaruan data untuk pemantauan pembangunan	100,0%	100,00%	502.714.304,00	100%	132.714.304,00	100%	160.217.790,00	100,00%	90%	100%	90%	100%	90%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERDANGAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Perbaikan pengamanan informasi	100,0%	100,00%	469.489.710,00	100%	469.489.710,00	100%	469.766.245,00	100,00%	90%	100%	90%	100%	90%
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	10,0%	80,00%		80%		100%	125,00%		120%		120%		120%
		Persentase Kelancaran Pada Hubungan Komunikasi Band Antar Perangkat Daerah	100,0%	100,00%		100%		100%	100,00%		100%		100%		100%
Rata-rata Capaian Kinerja (%)									105,32%	92,27%					
Predikat Kinerja									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
Faktor Pendukung Keterlaksanaan Pencapaian	Komitmen Kepala Daerah dalam meningkatkan kualitas manajemen kinerja, komitmen seluruh elemen dalam mewujudkan keteladanan pemerintahan yang baik dan bersih, Evaluasi kelembagaan secara bertahap untuk merapikan pelaksanaan tugas dan fungsi, mendukung kinerja kepala daerah, Penyusunan peraturan perundang-undangan yang update dan sesuai kebutuhan, Semakin bertambahnya inovasi pada perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas layanan dan fokus dalam pencapaian kinerja, Pemanfaatan e-government dalam berbagai bentuk, Jogja Smart Device untuk mendukung pelayanan publik														
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Belum terbudayanya penyusunan anggaran berbasis kinerja, sehingga masih diungkap kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran, Kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan antar perangkat daerah dalam mewujudkan target KPI kepala daerah														
Tingkat lanjut yang diperoleh dalam RP, MD, dan BPD	Akan dilaksanakan dalam kerja antara kepala perangkat daerah dengan kepala daerah agar seluruh perangkat daerah memahani dukungan masing-masing terhadap pencapaian KPI kepala daerah, Cross selling program dan kegiatan sebagai implementasi proses bisnis dan pohon kinerja juga terus dilanjutkan agar terdapat kolaborasi yang harmonis antar perangkat daerah dalam mewujudkan kinerja pembangunan seperti yang terdapat dalam dokumen perencanaan														

Yogyakarta, 28 Februari 2023
 a.n. PI WALIKOTA YOGYAKARTA
 SEKRETARIS DAERAH
 L. AMAN YURIADJAYA, M.M.
 NIP. 19651213 199203 1 006



